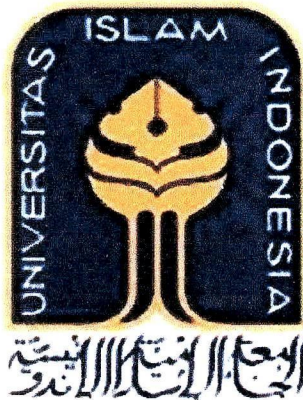


**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
DISTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA INDONESIA  
TAHUN 2008-2012 DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



Oleh:  
Febri Kusuma  
NIM.: 11913007

**T E S I S**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2014**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
DISTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA INDONESIA  
TAHUN 2008-2012 DALAM PERSPEKTIF  
EKONOMI ISLAM**



Oleh:  
**Febri Kusuma**  
NIM.: 11913007

Pembimbing:  
M.B. Hendrie Anto, SE, M.Sc

**T E S I S**

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

**YOGYAKARTA  
2014**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Kusuma

NIM : 11913007

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan

Negara Indonesia Tahun 2008-2012 dalam Perspektif Ekonomi  
Islam

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Februari 2014

Yang menyatakan.



Febri Kusuma



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 1228/PS-MSI/Peng./II/2014

TESIS berjudul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
DISTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA INDONESIA  
TAHUN 2008-2012 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI  
ISLAM**

Ditulis oleh : Febri Kusuma

N. I. M. : 11913007

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

Yogyakarta, 28 Februari 2014

Ketua,



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Febri Kusuma  
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru, 20 Februari 1986  
N. I. M. : 11913007  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISTRIBUSI  
PENDAPATAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2008-2012  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag. (.....)  
Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd. (.....)  
Pembimbing : M.B. Hendrie Anto, SE., M.Sc. (.....)  
Penguji : Dr. H. Sidik Tono, MH (.....)  
Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Februari 2014

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil : **Lulus**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.





PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## NOTA DINAS

No. : 1228/PS-MSI/ND/II/2014

TESIS berjudul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
DISTRIBUSI PENDAPATAN INDONESIA TAHUN 2008-  
2012 DARI PERSPEKTIF ISLAM**

Ditulis oleh : Febri Kusuma

NIM : 11913007

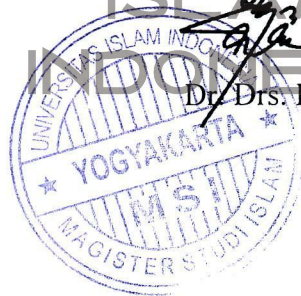
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Yogyakarta, 13 Februari 2014  
Ketua,

  
Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd.



## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan  
Negara Indonesia Tahun 2008-2012 dalam Perspektif  
Ekonomi Islam

Nama : Febri Kusuma

NIM : 11913007

Konsentrasi : Ekonomi Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu  
Agama Islam Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 4 Februari 2014  
Pembimbing,

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

M.B. Hendrie Anto, SE, M.Sc

## HALAMAN MOTTO

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ... ﴿٧﴾

“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. al-Ḥasyr (59): 7).

Dan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu  
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan  
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu  
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada  
takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui  
apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Mā'idah (5): 8).

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku,  
kakak dan adik-adikku  
serta  
semua orang yang telah memberikan kontribusi sehingga  
tesis ini dapat diselesaikan.*



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri  
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā'	<i>t</i>	-
ث	Sā'	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Ẓāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-

ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Hā`	<i>W</i>	-
هـ	Wāwu	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā`	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta`addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta`Marbutah diakhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta` marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al`*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya`</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta` marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitṛ</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	<i>fathah</i>	ditulis	a
-----	<i>kasrah</i>	ditulis	i
-----'	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i> جاهلية	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> تنسى	Ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + wawu</i> كريم	Ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu</i> فروض	Ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

# FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA INDONESIA TAHUN 2008-2012 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Febri Kusuma  
NIM. 11913007

Di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, masalah pemerataan dalam distribusi pendapatan sering mendapatkan perhatian khusus karena ketidakmerataan pendapatan tersebut akan berakibat pada ketimpangan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), upah dan rasio penduduk muslim terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kuantitatif serta menggunakan pendekatan normative yuridis. Data yang digunakan adalah data *time series* tahun 2008-2012 dan *cross section* di 33 propinsi di Indonesia. Data sekunder diambil dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data panel dengan metode *fixed effect model* (FEM). Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa (1) Pertumbuhan Ekonomi (PE), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rasio Penduduk Muslim (Muslim) adalah tidak signifikan dalam mempengaruhi Distribusi Pendapatan (DP), karena peningkatan ketiga variabel tersebut tidak selalu diikuti dengan penurunan DP dan (2) Upah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan, yang berarti bahwa semakin tinggi jumlah upah akan berakibat pada semakin tingginya tingkat pemerataan Distribusi Pendapatan.

Berdasarkan temuan penelitian ini diharapkan bahwa peningkatan PE dan APBD dapat berbanding lurus dengan penurunan dalam rasio gini di masa mendatang. Muslim sebagai mayoritas di Indonesia juga diharapkan untuk mampu memberikan kontribusi positif terhadap distribusi pendapatan, diantaranya dengan memaksimalkan zakāh sebagai sebuah solusi dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

**Kata Kunci:** *Distribusi Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, APBD, Upah, Muslim, Data Panel, FEM.*

## ABSTRACT

### FACTORS THAT AFFECT INDONESIA'S INCOME DISTRIBUTION IN 2008-2012 VIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMICS

Febri Kusuma  
NIM. 11913007

In many developing countries including Indonesia, issues concerning equity in income distribution often receive special attention since inequality in income will result in economic inequality. This study aimed to determine the effect of economic growth, the Regional Budget (APBD), wage and the ratio of Muslim population on income distribution in Indonesia.

This was a descriptive study using a quantitative method and a normative juridical approach. The data used were the time series data in 2008-2012 and the cross section data in 33 provinces in Indonesia. The secondary data were taken from the Central Bureau of Statistics and Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia. The analysis technique used a panel data model with fixed effect method (FEM). The results showed that (1) Economic Growth (PE), the Regional Budget (APBD) and the ratio of Muslim population (Muslims) were not significant in affecting income distribution (DP), because an increase in these three variables was not always followed by a decline in DP and (2) wage had a positive and significant effect on income distribution, meaning that the higher the amount of wages would result in higher levels of the equity rate of income distribution.

Based on the findings of this research, it is expected that the increase in PE and APBD can directly be proportional to the reduction in the Gini ratio in the future. Muslims as the majority in Indonesia are also expected to be able to contribute positively to the income distribution, such as by maximizing Zakāh as a solution viewed from the perspective of Islamic Economic.

**Keywords:** *Income Distribution, Economic Growth, Budget (APBD), Wage, Muslim, Panel Data, FEM*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين و الصلاة و السلام  
على محمد و على اله و أصحابه أجمعين، لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم،  
اما بعد.



Alhamduillah, puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Şalawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan umat yang selalu istiqāmah mengikuti ajarannya.

Dalam proses penulisan tesis ini, banyak hambatan yang penulis hadapi. Namun dengan kontribusi dari berbagai pihak, tesis ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. DR. Drs. H. Dadan Muttaqin, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. DR. H. Ahmad Darmadji, M.Pd, selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. M.B. Hendrie Anto, SE, M.Sc, selaku pembimbing tesis yang telah memberikan waktu untuk membimbing.
6. Seluruh Dosen yang mengajar pada Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Seluruh staff Program Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia atas berbagai bantuan dan pelayanan yang telah diberikan.
8. Orang tua penulis, Bapak Drs. M. Idroes Al-Fasya (alm) dan Bunda Sumarni yang selalu senantiasa mendoakan.
9. Kakak dan adik-adik penulis (kak 'Ayang', Bang Onye, Geri dan *si kembar* Eca-Eci) serta keponakan penulis (Ihsan, Jasmine dan Savana) yang selalu memberikan semangat.
10. Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama RI yang memberikan bantuan dalam mencari 'data' penelitian.
11. Seluruh teman-teman Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang senantiasa mendukung dan memberikan masukan positif.
12. Seluruh teman-teman *kost* 'Wongso' semoga semakin kompak serta diskusinya semakin *ramai* dengan berbagai tema menarik.
13. *The one who captured my very own heart at the night when Mt. Kelud erupted, the final dot in this thesis is devoted specially and solely to you because this thesis will never come to an end without that final dot.*

Semoga Allah SWT memberikan rahmat yang melimpah sebagai balasan atas segala kebaikan. *Jazakumullah khoiron katsiron.*

Yogyakarta, 4 Februari 2014



Febri Kusuma



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS .....	v
HALAMAN NOTA DINAS .....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
ABSTRAK .....	xiv
<i>ABSTRACT</i> .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
DAFTAR TABEL .....	xxiv
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
DAFTAR GRAFIK .....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11

D. Sistematika Pembahasan .....	12
---------------------------------	----

**BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN  
TEORI/KERANGKA TEORI, DAN HIPOTESIS**

A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	15
B. Landasan Teori/Kerangka Teori .....	29
1. Distribusi Pendapatan .....	29
2. Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	31
3. Ketimpangan dalam Distribusi Pendapatan .....	38
4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	47
5. Pertumbuhan Ekonomi .....	49
6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah .....	54
7. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	56
8. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)	58
9. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	63
10. Upah .....	66
11. Upah Minimum .....	70
12. Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	72
13. Kebijakan Upah Minimum dalam Ekonomi Islam ...	78
14. Tingkat Upah yang Adil .....	80

15. Rasio Penduduk Muslim .....	81
16. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk pada Pembangunan Ekonomi .....	82
17. Kependudukan Menurut Perspektif Ekonomi Islam	87
C. Hipotesis .....	89

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	92
B. Tempat atau Lokasi Penelitian .....	95
C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel ..	95
1. Variabel Penelitian .....	95
2. Definisi Operasional Variabel .....	95
D. Jenis dan Sumber Data .....	96
E. Teknik Pengumpulan Data .....	98
F. Uji Asumsi .....	98
1. Uji t ( Pengujian variabel secara individu ) .....	98
2. Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh) .....	99
G. Teknik Analisis Data .....	100
1. Estimasi Model Regresi .....	100
2. Analisis Data Panel .....	101
3. Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data .....	103

## BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian .....	105
1. Diskripsi Data Penelitian .....	105
2. Diskripsi Objek Data Penelitian .....	105
a. Distribusi Pendapatan .....	105
b. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia .....	108
c. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .....	111
d. Tingkat Upah Minimum Regional .....	114
e. Rasio Penduduk Muslim .....	118
B. Analisis Penelitian .....	121
1. Pemilihan Model .....	121
a. Uji F-statistik (Chow Test) .....	121
b. Uji Hausman .....	122
c. Estimasi <i>Fixed Effect</i> .....	123
1) Pengujian Individual Variabel (Uji t) .....	125
2) Pengujian Serempak/Bersamaan Variabel (Uji F) .....	127
3) Koefisien Determinasi ( $\bar{R}^2$ ) .....	128
2. Pembahasan dan Analisis .....	128
a. Analisis Pengaruh PE (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Distribusi Pendapatan .....	129

b. Analisis Pengaruh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap Distribusi Pendapatan	132
c. Analisis Pengaruh Upah terhadap Distribusi Pendapatan .....	136
d. Analisis Pengaruh Rasio Penduduk Muslim (Muslim) terhadap Distribusi Pendapatan .....	137
e. Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Distribusi Pendapatan .....	141

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	151
B. Saran .....	154
C. Keterbatasan Penelitian .....	154

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	156
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**

***CURRICULUM VITAE MAHASISWA***

## DAFTAR TABEL

Tabel 21	Ringkasan Penelitian Terdahulu, 26
Tabel 22	Upah dalam Perspektif Kapitalis, Sosialis dan Islam, 74
Tabel 23	Argumentasi Terhadap Pertumbuhan Penduduk di Dunia Ketiga, 86
Tabel 41	Rasio Gini Menurut Provinsi, 2008-2012 (Persen), 106
Tabel 42	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2008 - 2012 (Persen), 109
Tabel 43	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2008-2012, 113
Tabel 44	Upah Minimum Provinsi per Bulan (Rupiah). 2008-2012, 116
Tabel 45	Rasio Penduduk Muslim Indonesia, 2008-2012 (Persen), 119
Tabel 46	Hasil Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i> , 121
Tabel 47	Hasil Uji Hausman, 122
Tabel 48	Hasil Estimasi <i>Fixed Effect</i> , 123
Tabel 49	Instrumen Kewajiban Fiskal, 143

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 21 Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Indeks Gini 2002-2011,  
18
- Gambar 22 Kurva Lorenz, 41
- Gambar 23 Koefisien Gini, 42
- Gambar 24 Penentuan Upah dalam Perekonomian Konvensional, 74
- Gambar 25 Penentuan Upah dalam Perekonomian Islam, 75
- Gambar 26 Penentuan Upah pada Kebanyakan Negara Muslim, 77
- Gambar 27 Kebijakan Upah Minimum dalam Perekonomian Islam, 79
- Gambar 28 Kerangka Pemikiran Teoritis, 91
- Gambar 31 Pengujian Pemilihan Model dalam Pengolahan Data Panel, 104

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR GRAFIK

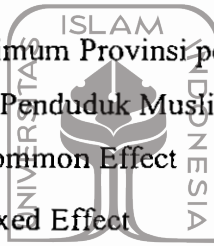
- Grafik 41 Rasio Gini Menurut Provinsi, 2008-2012, 107
- Grafik 42 Rasio Gini Indonesia, 2008-2012, 108
- Grafik 43 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar  
Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2008 - 2012 (Persen), 110
- Grafik 44 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2008-2012, 114
- Grafik 45 Upah Minimum Provinsi per Bulan (Rupiah). 2008-2012, 118
- Grafik 46 Rasio Penduduk Muslim Indonesia, 2008-2012 (Persen), 120
- Grafik 47 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, 130



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Gini Ratio Menurut Provinsi, 2008-2012
- Lampiran II : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2008-2012 (Persen)
- Lampiran III : Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2008-2012
- Lampiran IV : Upah Minimum Provinsi per Bulan (Rupiah). 2008-2012
- Lampiran V : Rasio (%) Penduduk Muslim Indonesia, 2008-2012
- Lampiran VI : Regresi Common Effect
- Lampiran VII : Regresi Fixed Effect
- Lampiran VIII : Uji Signifikansi Fixed Effects
- Lampiran IX : Regresi Random Effect
- Lampiran X : Uji Signifikansi Random Effects



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Selama lebih dari dua dekade yang lalu, fokus perhatian ekonomi dunia ditujukan pada berbagai macam upaya guna meningkatkan pertumbuhan pendapatan nasional riil. Para ekonom memandang bahwa pertumbuhan pendapatan nasional riil dapat digunakan sebagai sebuah ukuran kinerja perekonomian suatu negara<sup>1</sup>. Menurut mereka, ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu: *pertama*, akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik (mesin-mesin), dan sumberdaya manusia (*human resources*). *Kedua*, pertumbuhan penduduk. *Ketiga*, kemajuan teknologi, dan *keempat*, sumberdaya institusi (sistem kelembagaan)<sup>2</sup>. Keempat hal tersebut saling berhubungan secara linear antara satu dengan yang lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu wilayah di kawasan Asia Tenggara yang memiliki area sangat luas<sup>3</sup> dan dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia<sup>4</sup>. Negara dengan julukan *zamburd*

---

<sup>1</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2010), hal. 269.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 270.

<sup>3</sup> Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau 13.466, luas daratan 1.922.570 km<sup>2</sup> dan luas perairan 3.257.483 km<sup>2</sup>. Data dan informasi geospasial produk Badan Informasi Geospasial (BIG) yaitu peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam <http://inafinance.com/2013/01/19/wilayah-indonesia-makin-luas/> diakses pada 7 September 2013.

<sup>4</sup> Jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 sampai September 2013, dalam [http://statistik.ptkpt.net/\\_a.php?\\_a=area&info1=6](http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=area&info1=6) diakses pada 7 September 2013.

*khatulistiwa* ini memiliki berbagai potensi wilayah, sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi penduduk yang beragam, serta memiliki tipologi wilayah yang heterogen. Hal tersebut selain memberikan dampak positif, juga memberikan dampak negatif bagi distribusi pendapatan. Keadaan ini menimbulkan perbedaan kecepatan pembangunan pada masing-masing provinsi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi negara ini dalam meningkatkan perekonomiannya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2012 bila dibandingkan triwulan III-2011 tercatat sebesar 6,17% (*yoY*) dan secara kumulatif mencapai sebesar 6,29% bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011 (*ctc*). Besaran PDB atas dasar harga berlaku secara kumulatif pada triwulan III-2012 mencapai sebesar Rp. 6.151,6 trilyun. Bank Indonesia memperkirakan bahwa pertumbuhan pada triwulan IV-2012 akan mencapai 6,2%, sehingga pertumbuhan untuk keseluruhan tahun 2012 akan mencapai sekitar 6,3%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan *trend* yang terus meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak triwulan II-2012 merupakan pertumbuhan terbesar kedua di dunia setelah China yang meskipun mencatat angka 7,7% namun *trend*-nya menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Dengan demikian tingkat pertumbuhan Indonesia kembali berada di atas rata-rata tingkat pertumbuhan dunia yang pada tahun 2012 diprediksi sebesar 3,5%<sup>5</sup>. Dengan laju pertumbuhan ekonomi maka secara makro ekonomi pembangunan ekonomi di Indonesia dapat

---

<sup>5</sup> Chairil, dkk, *Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2013*, dalam <http://www.setneg.go.id/index.php?option=comcontent&task=view&id=6765&Itemid=29> diakses pada 7 September 2013.

dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda perekonomian dan memiliki struktur perekonomian yang kokoh.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata sering kali menyebabkan bertambah lebarnya ketimpangan antar golongan masyarakat (yang kaya dan yang miskin) dan kesenjangan atau ketimpangan antar daerah (yang maju dan yang tertinggal). Pertumbuhan ekonomi dalam data BPS menunjukkan kontribusi pulau Jawa lebih dominan (57,62%) dibandingkan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sebuah ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam<sup>6</sup>. Hal ini karena tidak semua warga negara Indonesia dapat merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi karena masih terdapat beberapa wilayah yang masih berada di garis kemiskinan, bahkan di bawah garis kemiskinan.

Pada negara berkembang, masalah pemerataan dalam distribusi pendapatan selalu mendapat perhatian yang khusus, karena jika hal pemerataan tidak terjadi, maka masalah ketimpangan atau disparitas yang akan diselesaikan. Terdapat beberapa indikator yang menentukan meratanya distribusi pendapatan. Indikator-indikator yang digunakan di dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dalam bentuk APBD, tingkat upah yang didapatkan untuk memenuhi kebutuhan dan menggunakan indikator rasio penduduk muslim karena cukup representatif karena

---

<sup>6</sup> Annual report *Gini Rasio Kabupaten Bandung Tahun 2008*, (Bandung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung, 2008), hal. 2, dalam [http://bapeda.bandungkab.go.id/index2.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=50](http://bapeda.bandungkab.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=50)..diakses pada 7 September 2013.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia.

Indikator pertama dalam penelitian ini yang digunakan dalam menentukan meratanya distribusi pendapatan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mempengaruhi distribusi pendapatan. Di antara mekanisme untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi adalah dengan penghitungan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP). PDB atau GDP adalah total produksi barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah pada periode tertentu, misalnya satu tahun (di level provinsi di Indonesia biasanya disebut Produk Domestik Regional Bruto-PDRB). PDB jika dibagi dengan jumlah penduduk maka menjadi PDB per kapita. Ukuran ini lebih spesifik karena memperhitungkan jumlah penduduk serta mencerminkan kesejahteraan penduduk di suatu tempat. Nilai total pendapatan nasional dalam satuan harga sekarang disebut dengan PDB nominal (PDB atas dasar harga berlaku). Nilainya tentu berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan kuantitas produksi barang/jasa atau dalam harga dasarnya<sup>7</sup>.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan PNB/PDB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur penduduk terjadi atau tidak<sup>8</sup>. Hal ini merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi

---

<sup>7</sup><http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2009/11/19/mudahnya-menghitung-pertumbuhan-ekonomi-27316.html> diakses pada 20 November 2013.

<sup>8</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33083/4/Chapter%20II.pdf> diakses tanggal 23 Desember 2013.

merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah, indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh masyarakat mulai dari lapisan atas sampai bawah. Masyarakat dapat menikmati hasil tersebut secara langsung maupun melalui campur tangan pemerintah<sup>9</sup>.

Indikator kedua dalam penelitian ini yang digunakan dalam menentukan meratanya distribusi pendapatan adalah jumlah penerimaan dan belanja daerah/provinsi (APBD). Meningkatkan APBD merupakan suatu tantangan bagi pemerintah provinsi dalam mengurangi kesenjangan dalam distribusi pendapatan, karena daerah (provinsi) dapat memanfaatkan potensi alam dan manusia yang dimiliki secara maksimal, ditambah lagi dengan diberlakukannya desentralisasi ataupun otonomi daerah oleh pemerintah pusat. APBD merupakan suatu gambaran atau tolok ukur penting keberhasilan satu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD). Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan belanja masyarakat. Berkembangnya perekonomian daerah di berbagai sektor juga akan memberikan pengaruh positif pada penciptaan lapangan kerja baru, maka kegiatan ekonomi rakyat daerah (lokal) juga turut berkembang<sup>10</sup>. Karena pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup>Udin Rinaldi, "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal EKSOS*, No. 2, Vol. 8 (Juni, 2012), hal. 107.

(PAD) kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab<sup>11</sup>.

Indikator ketiga dalam penelitian ini yang digunakan dalam menentukan meratanya distribusi pendapatan adalah tingkat upah. Upah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan hidup layak bagi buruh dan keluarganya. Secara filosofis dapat diartikan bahwa upah sebagai sumber penghidupan yang layak, ini mendasari penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yang merupakan perkembangan maju dari standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM, hanya mengacu pada standar kebutuhan hidup yang minimum)<sup>12</sup>. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah ditetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi meliputi:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah propinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah propinsi atau kabupaten/kota.

Upah minimum tersebut ditetapkan oleh Gubernur untuk wilayah propinsi, dan oleh Bupati/Walikota untuk wilayah Kabupaten-Kota, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Propinsi atau Bupati/Walikota. Dalam hal ini pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 105.

<sup>12</sup> <http://dimastidano.wordpress.com/2011/12/22/filosofi-ekonomi-dalam-penentuan-upah-minimum-regional-umr/> diakses pada 20 November 2013.

yang telah ditetapkan untuk masing-masing wilayah propinsi dan/atau kabupaten/kota<sup>13</sup>.

Dalam hal ini, harga atas jasa-jasa yang diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan oleh tenaga kerja. Secara umum golongan tenaga kerja menyangkut bagian penduduk tingkat usia 15-64 tahun<sup>14</sup>. Dalam pengertian *angkatan kerja* harus diperhitungkan *tingkat partisipasi* dalam kegiatan ekonomi di antara jumlah tenaga kerja untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin. Pertambahan penduduk dan angkatan kerja di satu pihak dan laju serta arah investasi di pihak lain mempengaruhi perluasan kesempatan kerja dan pengangguran.

Pengalaman empiris sejak Perang Dunia II menunjukkan bahwa di berbagai negara yang termasuk negara berkembang secara menyeluruh jumlah penduduk dan angkatan kerja bertambah dengan laju yang lebih pesat, dibandingkan dengan peluasan lapangan kerja yang bersifat produktif penuh. Dengan kata lain, pengangguran (secara terbuka maupun terselubung) lebih meluas, dibandingkan dengan kesempatan bagi angkatan kerja untuk mendapat pekerjaan yang bersifat produktif penuh (*productive employment*). Tolok ukur yang lazim digunakan untuk pekerjaan yang dianggap produktif penuh ialah: bekerja 35 jam sepenuhnya dalam satu minggu. Berdasarkan tolok ukur tersebut, masalah kesempatan kerja dan pengangguran di negara-negara berkembang ditandai oleh masih luasnya

---

<sup>13</sup>[https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ut.ac.id%2Fhtml%2Fsuplemen%2Fespa4319%2FNASKAHWEB%2FSISTEM%2520PENGUPAHAN.doc&ei=CRCMUoP8DYjZrQf321GgBQ&usg=AFQjCNEOv1ddU-dUOfIp1GyKvn-q3gX\\_Q&bvm=bv.56753253,d.bmk](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ut.ac.id%2Fhtml%2Fsuplemen%2Fespa4319%2FNASKAHWEB%2FSISTEM%2520PENGUPAHAN.doc&ei=CRCMUoP8DYjZrQf321GgBQ&usg=AFQjCNEOv1ddU-dUOfIp1GyKvn-q3gX_Q&bvm=bv.56753253,d.bmk) diakses pada 20 November 2013.

<sup>14</sup> Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 205.

pengangguran secara terselubung. Fenomena ini berkenaan dengan pendayagunaan angkatan kerja yang tidak sepenuhnya efektif-produktif (*underemployment*). Hal itu menyangkut pengangguran yang tidak kentara di masyarakat pedesaan (*rural disguised unemployment*) yang sebagian besar terlibat di sektor pertanian maupun pengangguran terselubung dalam lingkungan kota (*urban underemployment*)<sup>15</sup> dengan adanya pengangguran tersebut dapat mempengaruhi distribusi pendapatan karena faktor upah tidak dapat memberikan dampak yang positif.

Distribusi pendapatan juga ditentukan oleh pertumbuhan penduduk yang mencakup sumber daya manusia secara umum. Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti (a) semakin banyak jumlah angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan (b) semakin banyak jumlah penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik<sup>16</sup>. Namun, jika suatu negara tidak dapat memanfaatkan seluruh sumber daya manusia yang sedang produktif tidak secara penuh dan efisien (dalam kondisi *full employment*), maka hal tersebut akan mengakibatkan ketimpangan distribusi pendapatan pada negara tersebut. Sebagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim sebesar 87,21% (sebanyak 207.176.162 jiwa dari jumlah total penduduk Indonesia: 237.556.363 jiwa pada 2012), hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi distribusi pendapatan di Indonesia.

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal. 206.

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara berkembang, yaitu: (1) penambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita, (2) inflasi, di mana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proporsional oleh penambahan produksi barang-barang. (3) ketidakmerataan pembangunan antar daerah, (4) investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan dari tambahan modal lebih besar daripada persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga angka pengangguran bertambah. (5) rendahnya mobilitas sosial, (6) pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor. (7) memburuknya nilai tukar, dan (8) hancurnya industri-industri kerajinan rakyat<sup>17</sup>.

Distribusi dalam ekonomi Islam didasarkan pada nilai kebebasan dan nilai keadilan. Nilai kebebasan berlandaskan kepada hak milik pribadi dan mengakui perbedaan penghasilan. Perbedaan penghasilan disebabkan oleh kecakapan dan keahlian, potensi dan kemampuan umum dan khusus, potensi akal, jiwa dan jasmani.

Kemudian Allah memerintahkan zakāh untuk menyalurkan harta yang dimiliki orang kaya kepada orang miskin sebesar 2,5 % serta 5-10 % pada zakāh pertanian. Selain zakāh, Islam juga menganjurkan untuk melaksanakan infāq, ṣadāqah dan waqāf. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kesenjangan antar manusia.

---

<sup>17</sup>Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan*, hal. 284.

Di sisi lain Islam memberikan kesempatan yang adil bagi kaum fakir untuk berdiri sejajar dengan orang-orang kaya. Pintu kerja dan usaha terbuka lebar bagi semuanya. Bagi pemerintah, berkewajiban menyiapkan lapangan pekerjaan, jika belum ada kesempatan kerja atau tidak mampu bekerja atau upah kerjanya tidak mencukupi, maka wajib atas pemerintah untuk mengurusnya<sup>18</sup>.

Dengan demikian, ekonomi Islam –dengan pengakuannya terhadap adanya perbedaan dalam pendapatan, melihat bahwa di antara prinsip keadilan ialah mendekatkan jurang perbedaan antara warga masyarakat untuk merealisasikan keseimbangan (*tawāzun*), mematkan api kecemburuan dan kemarahan sosial, dan demi menghindari faktor-faktor permusuhan dan perbenturan antar individu dan kelas-kelas sosial<sup>19</sup>.

Berdasarkan latar belakang dari pemikiran tersebut maka perlu dilakukan kajian yang dapat melihat tingkat disparitas pendapatan di Indonesia. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Distribusi Pendapatan Negara Indonesia Tahun 2008-2012 Dalam Perspektif Ekonomi Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 437.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 438.

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh APBD terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh tingkat upah terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh rasio penduduk muslim terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?
5. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap distribusi pendapatan di Indonesia?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
  - b. Untuk menganalisis pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
  - c. Untuk menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
  - d. Untuk menganalisis pengaruh rasio penduduk muslim terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
  - e. Untuk menganalisis pandangan ekonomi Islam terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat dalam aplikasi keilmuan karena penelitian ini berusaha menganalisa fenomena ekonomi yang memberikan dampak terhadap kestabilan ekonomi secara makro dalam sebuah negara.
- b. Manfaat praktis. Bagi praktisi khususnya pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa sebagai bahan masukan mengenai distribusi pendapatan di Indonesia.

## D. Sistematika Pembahasan



Sistem penulisan tesis ini disajikan secara integral dan saling berkaitan pada tiap babnya. Gambaran umumnya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan sebagai awal penelitian ini dengan pembahasan mengenai rasionalitas latar belakang masalah. Selanjutnya menguraikan latar belakang masalah tersebut, yang kemudian menjadi landasan dalam rumusan masalah. Kemudian dijelaskan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah mengenai pembahasan telaah pustaka yang secara *content* merupakan penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan pada Negara-negara OKI dengan menggunakan indikator tingkat kesehatan dan pendidikan. Variabel kehidupan penduduk, tabungan domestik, kemiskinan penduduk dengan menggunakan *gini*

*coefficient* 0.36 menunjukkan ketidakmerataan sedang pada negara-negara OKI pada penelitian tersebut. Selanjutnya, penelitian yang melibatkan antar negara-negara di dunia, yang menunjukkan setelah Perang Dunia Kedua, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan pada negara-negara berkembang dan terbelakang sangat tinggi di bandingkan dengan negara-negara maju di Eropa. Kemudian, berbagai penelitian terhadap distribusi pendapatan di Indonesia dengan menggunakan berbagai pendekatan.

Selanjutnya pembahasan kerangka teoritik secara lebih komprehensif dan rasionalitas yang dibangun dari bangunan kerangka teori tersebut untuk menjawab masalah penelitian. Adapun kerangka teoritik tersebut terdiri dari makna dan hakikat distribusi pendapatan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang menggunakan koefisien Gini sebagai indikatornya. Kemudian penjelasan tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam perannya terhadap distribusi pendapatan. Kemudian tentang peran APBD dalam distribusi pendapatan di Indonesia. Lebih lanjut, juga pembahasan teoritik tentang tingkat upah yang merupakan jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, rasio penduduk muslim sebagai representasi dalam distribusi pendapatan sebagai variabel Islam dan yang akan menjadi variabel bebas untuk mendeteksi tingkat distribusi pendapatan di Indonesia periode tahun 2008 hingga 2012 karena pada periode tersebut terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi, penerimaan APBD serta kenaikan upah oleh pemerintah, dan pada saat bersamaan juga tingkat kesenjangan berada pada level ketidakmerataan sedang. Pada bab ini juga dijelaskan tentang distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, tingkat upah, dan populasi penduduk

(kependudukan) dalam perspektif Islam yaitu dengan menggunakan rasio penduduk muslim. Pada bagian akhir bab ini akan dirumuskan hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.

Bab III membahas metode penelitian. Metode penelitian meliputi; Jenis, Sifat, Pendekatan serta Lokasi Penelitian. Kemudian menjelaskan tentang data penelitian yang meliputi; Variabel dan Definisi Operasional Variabel, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, Pemilihan Model dalam Pengolahan Data, Uji t (Pengujian variabel secara individu) dan Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh) yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan dari penelitian. Ditampilkan hasil perhitungan dari data yang kemudian diuraikan sebagai analisis tentang perhitungan data tersebut seperti: diskripsi data penelitian, diskripsi objek data penelitian, pemilihan model analisis, dan respon serta kontribusi ekonomi Islam terhadap masalah distribusi pendapatan di Indonesia.

Bab V merupakan bab penutup. bab ini memberikan kesimpulan dari seluruh pembahasan, dan memberikan saran terkait dengan penelitian ini, serta memuat tentang keterbatasan pada penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU, LANDASAN TEORI/KERANGKA TEORI, DAN HIPOTESIS

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berbagai studi empiris mengenai distribusi pendapatan telah banyak dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Sadegh Bakhtiari dan Hossein Meisami (2010), dalam penelitiannya yang berjudul *An empirical investigation of the effects of health and education on income distribution and poverty in Islamic countries*, bertujuan untuk mengukur secara empiris dampak dari kesehatan dan pendidikan di berbagai negara Islam<sup>20</sup>.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari Bank Dunia dan Laporan Ekonomi Tahunan pada negara-negara OKI (Statistik, Riset Ekonomi dan Sosial dan Pusat Pelatihan untuk negara-negara Islam, 2008). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan variabel GDP per kapita (1995 US\$) pada angka 9.164. Kemudian variabel kesehatan dan pendidikan dalam mempengaruhi distribusi pendapatan pada angka 0.655 dan 3.5% dari GDP. Variabel kehidupan penduduk pada level usia 66,4 tahun. Variabel tabungan domestik pada angka 10.4% dari

---

<sup>20</sup> Negara-negara Islam yang dijadikan objek penelitian adalah Negara-negara anggota OKI, antara lain: Albania, Aljazair, Azerbaijan, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Chad, Cote d'Ivoire, Mesir, Gambia, Guinea-Bissau, Indonesia, Iran, Yordania, Kazakhstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Maroko, Mozambik, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Senegal, Sierra Leone, Singapura, Sudan, Somalia, Tajikistan, Turki, Uganda, Uni Emirat Arab, Uzbekistan dan Yaman.

GDP. Variabel melek huruf pada level 6.234. Variabel penduduk yang berada di garis kemiskinan sebanyak 33.4%. Dengan *gini coefficient* 0.36. Dengan demikian tingkat disparitas distribusi pendapatan pada negara-negara tersebut berada pada tingkat **ketidakmerataan sedang**<sup>21</sup>.

Edward Nissan dan Farhang Niroomand (2010) dalam penelitiannya yang berjudul *Distribution of income and expenditures across nations*. Penelitian ini menggunakan sumber data dari UNDP (2007) yang meneliti sebanyak 126 negara. Penelitian ini juga menggunakan kriteria dari Bank Dunia, yaitu: (a) *low income* sebesar \$905 atau kurang, (b) *lower middle income* sebesar \$906-3.595, (c) *upper middle income* sebesar \$3.596-11.115, dan (d) *high income* sebesar \$11.116 atau lebih. Dari penelitian tersebut GDP negara-negara Eropa seperti Prancis dan Jerman dengan angka 31.2% dan 30.8% berada pada level GDP tertinggi dibandingkan dengan negara dibenua lain. Dalam penelitian ini tampak jelas disparitas antara negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang bahkan negara-negara miskin setelah Perang Dunia II<sup>22</sup>.

Rasidin Karo Karo Sitepu. dkk (2009) dalam penelitian yang berjudul *Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia (The Impact of Human Capital Investment on Income Distribution and Poverty Incidence in Indonesia)*. Penelitian yang menggunakan data *Input-Output* Nasional Tahun 2003, data SNSE 2003, dan data untuk melihat kemiskinan dan distribusi pendapatan yang diperoleh dari Survey Sosial Ekonomi

<sup>21</sup> Sadegh Bakhtiari dan Hossein Meisami, "An Empirical Investigation Of The Effects Of Health And Education On Income Distribution And Poverty In Islamic Countries", *International Journal of Social Economics*, No. 4, Vol. 37 (2010), hal. 293.

<sup>22</sup> Edward Nissan dan Farhang Niroomand, "Distribution Of Income And Expenditures Across Nations", *Journal of Economics and Finance*, No. 2, Vol. 34 (2010), hal. 173.

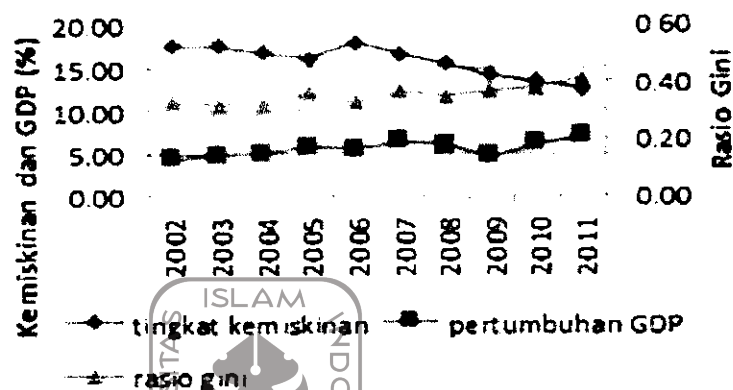
Nasional (SUSENAS) Tahun 2002, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik ini mengindikasikan bahwa dampak investasi sumber daya manusia terhadap distribusi pendapatan mengelompokkan pendapatan penduduk dengan penghasilan terkecil adalah bukan angkatan kerja dan golongan tidak jelas di desa, sedangkan pendapatan tertinggi dimiliki oleh kelompok rumah tangga pengusaha bebas golongan atas di kota, yaitu sebesar Rp 13.904.49 ribu. Sumber daya manusia dalam penelitian ini menggunakan indikator makro ekonomi Indonesia, pendapatan rumah tangga (dari jenis pekerjaan di kota dan desa yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan kesehatan), dimana investasi pendidikan dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan terutama untuk rumah tangga pengusaha bebas golongan atas di desa, pada kelompok rumah tangga ini investasi kesehatan lebih baik dibandingkan dengan investasi pendidikan. Investasi pendidikan dapat menurunkan *poverty incidence*, *poverty depth*, dan *poverty severity* kecuali untuk rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan kerja di kota, dan bukan pertanian golongan atas di kota. Investasi kesehatan hanya di rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota yang mengalami peningkatan, sedangkan rumah tangga lainnya mengalami penurunan<sup>23</sup>.

Mudrajat Kuncoro (2013) dalam tulisannya berjudul *Mengurangi Ketimpangan* dengan menampilkan data dari BPS 2012 menunjukkan ketika pertumbuhan ekonomi meningkat di Indonesia, ternyata ketimpangan pendapatan

---

<sup>23</sup> Rasidin Karo Karo Sitepu, dkk., "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia (*The Impact of Human Capital Investment on Income Distribution and Poverty Incidence in Indonesia*)", *Jurnal Forum Pascasarjana*, No. 2, Vol. 32 (2009), hal. 117-127.

yang diukur dengan indeks Gini juga meningkat, tetapi kemiskinan cenderung menurun (gambar 1).



Gambar 21. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Indeks Gini 2002-2011

Sumber: *Kompas*, (2 Maret 2013)

Dengan kata lain, makin tinggi pertumbuhan, memang jumlah dan kemiskinan cenderung menurun, tetapi ketimpangan antara si kaya dan si miskin cenderung kian lebar saat pertumbuhan semakin meningkat di Indonesia selama periode 2002-2011. Menurut Kuncoro dalam studi empiris ada dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. *Pertama*, ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan indeks Gini dan persentase efek positif distribusi pendapatan yang dapat dimanfaatkan. Di Indonesia, tingkat ketimpangan makin melebar sebagaimana yang tercermin dari rasio Gini yang meningkat dari 0,33 (2002) ke 0,41 (2011). *Kedua*, ketimpangan aktivitas ekonomi antar daerah di Indonesia yang secara geografis lebih terkonsentrasi ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama lebih dari lima dasawarsa terakhir. Data BPS hingga triwulan IV

2012 menunjukkan, kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5% oleh Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera 23,9%. Sementara itu Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya 18,6%. Dengan kata lain, ketimpangan antar wilayah terus terjadi<sup>24</sup>.

Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti (2008) dalam penelitiannya berjudul *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. Penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah dan beberapa variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang pada tingkat provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data panel yang terdiri dari 26 provinsi selama kurun waktu 1980 sampai 2006. Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun sebelumnya memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui sektor pengeluaran pemerintah, variabel sumber daya alam, lokasi dan variabel desentralisasi. Sedangkan variabel populasi memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk bukan angkatan kerja jumlahnya cukup besar sehingga menurunkan rata-rata produktivitas penduduk yang menjadi angkatan kerja. Variabel lainnya yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini adalah variabel inflasi<sup>25</sup>.

Penelitian Indra Maipita, Mohd. Dan Jantan dan Nor Azam Abdul Razak (2010) dengan judul *Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia*. Tujuan dari penelitian ini menguji perubahan indikator makroekonomi, kinerja sektor ekonomi, dan perubahan angka

---

<sup>24</sup> Mudrajat Kuncoro, "Mengurangi Ketimpangan", *Kompas*, (2 Maret 2013).

<sup>25</sup> Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, No. 1, Vol. 9 (2008), hal. 44-55.

kemiskinan dan distribusi pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak dari meningkatnya subsidi lebih baik daripada dua kebijakan fiskal sebelumnya. Walaupun kebijakan transfer pendapatan memberikan dampak positif untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga di pedesaan dan menurunkan angka kemiskinan, di sisi lain kebijakan ini memiliki dampak negatif dalam mengurangi GDP. Berdasarkan indikator kemiskinan (*head count index, poverty depth and poverty severity*), ditemukan bahwa peningkatan pajak dapat meningkatkan intensitas kemiskinan, kesenjangan, dan rasio kemiskinan untuk semua kategori rumah tangga. Umumnya, dampak peningkatan pajak pada kemiskinan lebih tinggi pada rumah tangga di area urban dibandingkan rumah tangga di area pedesaan<sup>26</sup>.



Ruslan Abdul Ghafur Noor (2012) dalam paper berjudul *Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*. Melalui *paper* ini penulis memberikan solusi pada usaha meminimalisir tingkat disparitas dalam distribusi pendapatan yaitu bersinerginya antara pemerintah dan masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan tanggung jawab bersama. Jika telah terealisasi maka keadilan dan pemerataan yang juga diajarkan dalam ekonomi Islam akan dapat direalisasikan. Keadilan yang dimaksud terdapat dalam sektor distribusi<sup>27</sup>.

Penelitian Sri Kusreni dan Sultan Suhab (2009) dengan judul: *Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi*

<sup>26</sup> Indra Maipita, Mohd. Dan Jantan dan Nor Azam Abdul Razak. "Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, (2010), hal. 444.

<sup>27</sup> Ruslan Abdul Ghafur Noor. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, No. 2, Vol. 6 (Maret, 2012), hal. 316 – 327.

*Selatan*. Peran strategis pemerintah daerah melalui APBD sebagai implementasi dari kebijaksanaan keuangan daerah diharapkan berperan efisien dan efektif dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Penelitian tersebut bertujuan, antara lain untuk: *Pertama*, mengetahui pengaruh kapasitas fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan; *kedua*, mengetahui pengaruh alokasi belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan; dan *ketiga*, mengetahui pengaruh pembiayaan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama implementasi desentralisasi fiskal, 2003-2007. Variabel digolongkan dalam dua jenis yakni variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen mencakup tiga variabel yakni kapasitas fiskal (X1) alokasi belanja modal (X2), serta pembiayaan daerah (X3), sedangkan variabel dependen berupa tingkat kesejahteraan masyarakat (Y). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel (*pooled data*) yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time-series*) lima tahun (2003-2007) dan data silang tempat (*cross-section*) 22 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Secara keseluruhan dampak kebijaksanaan APBD terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan tingkat koefisien determinasi ( $\bar{R}^2$ ) mencapai 0,231. Hal ini menunjukkan pengaruh variabel-variabel kebijaksanaan APBD sebagai variabel bebas terhadap variabel terikat, kesejahteraan masyarakat hanya mencapai 23,1% dan signifikan pada tingkat kepercayaan 90%. Berarti, variabel-variabel bebas lainnya di luar

model berpengaruh lebih besar, hingga mencapai 76,9% terhadap kesejahteraan masyarakat kabupatenkota di Provinsi Sulawesi Selatan<sup>28</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian SMERU (2001) tentang *Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia*. Dalam studi ini dampak kebijakan upah minimum terhadap tingkat upah yang berlaku dan penyerapan tenaga kerja diuji melalui pendekatan ekonometrik dengan menggunakan data yang bersumber dari Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas).

Hasil studi ini menunjukkan bahwa upah minimum telah menguntungkan sebagian pekerja tetapi merugikan sebagian lainnya. Analisis statistik menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum telah mendongkrak upah pekerja kasar. Adanya hubungan yang positif antara tingkat upah minimum dan tingkat upah rata-rata juga ditemukan di berbagai kelompok pekerja lainnya, misalnya pekerja perempuan, muda usia, berpendidikan rendah, dan pekerja kerah putih (*white collar*).

Berbeda dengan dampak terhadap upah, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum berdampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor formal perkotaan, dengan perkecualian bagi pekerja kerah putih. Secara total, perkiraan elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum adalah  $-0,112$  dan nyata secara statistik. Angka ini menunjukkan bahwa untuk setiap 10% kenaikan tingkat upah minimum riil

---

<sup>28</sup>Sri Kusreni dan Sultan Suhab, "Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, No. 3, Vol. 5 (April, 2009), hal.11.

terdapat lebih dari 1% pengurangan penyerapan tenaga kerja total. Ini dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja, misalnya pertumbuhan ekonomi dan jumlah angkatan kerja, tidak berubah.

Temuan yang lebih penting lagi dari studi ini adalah bahwa dampak negatif dari upah minimum sangat dirasakan oleh kelompok yang mempunyai kerentanan tinggi terhadap perubahan dalam kondisi pasar tenaga kerja, seperti pekerja perempuan, pekerja muda usia, dan pekerja berpendidikan rendah. Perlu diingat bahwa mereka ini merupakan mayoritas dari pekerja di Indonesia, baik di sektor formal maupun sektor informal. Bagi pekerja perempuan dan muda usia, elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum lebih besar dari  $-0,3$ . Implikasinya adalah bahwa setiap 10% kenaikan upah minimum riil akan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja perempuan dan muda usia dengan lebih dari 3%. Sementara itu, elastisitas penyerapan tenaga kerja bagi mereka yang berpendidikan rendah juga relatif cukup besar dengan angka  $-0,2$ . Artinya, untuk setiap 10% peningkatan upah minimum maka penyerapan tenaga kerja berpendidikan rendah akan turun sekitar 2%. Hal tersebut terjadi karena pihak perusahaan lebih memprioritaskan tenaga kerja dengan pendidikan tinggi dibandingkan dengan tenaga kerja dengan pendidikan rendah karena jarak antara upah tidak terlalu signifikan dan perusahaan mendapatkan hasil yang maksimal.

Sebaliknya, pekerja kerah putih adalah satu-satunya kategori pekerja yang mendapat keuntungan dari upah minimum dalam hal penyerapan tenaga kerja. Elastisitas penyerapan tenaga kerja pekerja kerah putih terhadap upah minimum adalah 1,0 dan nyata secara statistik. Ini berarti bahwa untuk setiap 10%

peningkatan upah minimum riil maka penyerapan tenaga kerja pekerja kerah putih akan meningkat sebesar 10% pula. Hal ini menunjukkan adanya efek substitusi dari upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dari berbagai jenis pekerja.

Hasil analisis ekonometrik juga menunjukkan bahwa meningkatnya penerapan peraturan upah minimum cenderung memperkuat efek positif upah minimum terhadap upah rata-rata dan juga memperbesar efek negatif terhadap penyerapan tenaga kerja<sup>29</sup>.

Indonesia merupakan salah satu negara muslim terbesar di seluruh dunia. Meskipun 87,21% penduduknya beragama Islam<sup>30</sup>, Indonesia bukanlah negara Islam. Muslim di Indonesia juga dikenal dengan sifatnya yang moderat dan toleran<sup>31</sup>. Untuk dapat memberikan kontribusi yang positif bagi distribusi pendapatan, maka umat Islam hendaknya mampu memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Penelitian oleh Supriyati Istiqomah (2008) dengan judul *Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam* menjelaskan bahwa situasi ekonomi masyarakat Islam Indonesia bukan untuk diratapi, melainkan untuk dicarikan jalan pemecahannya. Untuk keluar dari himpitan ekonomi ini, diperlukan perjuangan besar dan gigih dari setiap komponen umat. Setiap pribadi muslim ditantang untuk lebih keras dalam bekerja, berkreasi dan berwirausaha (*enterpreneurship*) hal tersebut agar masalah kemiskinan yang telah

<sup>29</sup> Tim Peneliti SMERU, "Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia", Laporan dari Lembaga Penelitian SMERU dengan dukungan dari USAID/PEG. Oktober 2001, dalam [http://www.smeru.or.id/report/research/minimumwage\\_minimumwage\\_exumind.pdf](http://www.smeru.or.id/report/research/minimumwage_minimumwage_exumind.pdf) diakses pada 27 Desember 2013.

<sup>30</sup> Total penduduk muslim Indonesia pada 2012 adalah 207.176.162 dari total penduduk Indonesia 237.556.363. data dari Kementerian Agama RI dalam Angka 2012.

<sup>31</sup> <http://rossyatesyak.blogspot.com/2013/08/negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak.html> diakses pada 8 Januari 2014.

menjadi identik dengan masyarakat Islam di Indonesia dapat dipecahkan oleh umatnya sendiri. Pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri, yang selama ini selalu terpinggirkan. Dalam konteks ekonomi, seorang putra Islam dari generasi Qur'ani awal, Sayyidina 'Alī ra menyatakan, “Sekiranya kefakiran itu berwujud seorang manusia, sungguh aku akan membunuhnya”<sup>32</sup>.

Penelitian ini menekankan bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam adalah merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat<sup>33</sup>. Hal tersebut karena rasio penduduk muslim di Indonesia merupakan kelompok masyarakat yang mayoritas di negeri ini. Pemberdayaan tersebut mencakup bidang ruhaniyah, intelektual dan bidang ekonomi yang dapat dilakukan melalui proses dan tahap-tahap sebagai berikut: pemberdayaan melalui individu, pemberdayaan melalui keluarga, pemberdayaan melalui masyarakat, dan pemberdayaan dalam konteks negara.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara makro, distribusi pendapatan ditentukan oleh berbagai variabel independen yang telah dijelaskan yang dapat memberikan pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Penelitian ini memiliki karakteristik tersendiri dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu,

---

<sup>32</sup> Supriyati Istiqomah. “Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam”, *Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2008, hal 69, dalam <http://komunitas.wikispaces.com/file/view/PEMBERDAYAAN+DALAM+KONTEKS+PENGEMBANGAN+MASYARAKAT+ISLAM.pdf> diakses pada 8 Januari 2014.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 65.

variabel-variabel independen yang digunakan, yaitu: pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, upah dan ditambah dengan variabel rasio penduduk muslim sebagai representasi di bidang studi Islam. Di dalam penelitian ini, variabel-variabel tersebut akan dielaborasi dengan prinsip-prinsip dalam perspektif ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam variabel-variabel tersebut mendapatkan posisi yang strategis yang dapat menjadi rujukan dalam hal distribusi pendapatan.

Tabel 21 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel yang Digunakan, Sumber Data dan Metode	Hasil
1	Sadegh Bakhtiari dan Hossein Meisami  <i>"An empirical investigation of the effects of health and education on income distribution and poverty in Islamic countries"</i>	Variabel: a. Kesehatan b. Pendidikan Sumber data: a. PDB tahun 1995 b. IPM c. Koefisien Gini Metode: • Pendekatan data panel	a. Variabel GDP per kapita (1995 US\$) pada angka 9,164. b. Variabel kesehatan dan pendidikan dalam mempengaruhi DP pada angka 0.655 dan 3.5% dari GDP. c. Gini coefficient 0.36. DP berada pada tingkat ketidak merataan sedang.
2	Edward Nissan dan Farhang Niroomand  <i>"Distribution of income and expenditures across nations"</i>	Variabel: a. Tingkat Pendapatan b. IPM Sumber data: a. UNDP (2007) yang meneliti sebanyak 126 negara b. Bank Dunia (2007) c. Koefisien Gini Metode: • Pendekatan data panel	a. Tingkat GDP negara-negara Eropa pada angka 31.2% dan 30.8% berada pada level GDP tertinggi. b. Sedangkan negara berkembang pada angka 20,4% sampai 22,5%.
3	Rasidin Karo Sitepu,dkk  <i>"Dampak Investasi Sumber Daya"</i>	Variabel: a. SDM b. Pendapatan yang dipengaruhi oleh kesehatan dan	a. Peningkatan investasi SDM meningkatkan produktivitas tenaga kerja. b. Untuk daerah kota,

Lanjutan Tabel 21

	<i>Manusia terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia</i>	<p>pendidikan</p> <p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Data Input-Output Nasional (2003)</li> <li>Data SNSE 2003</li> <li>SUSENAS (2002)</li> </ol> <p>Metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Model modal manusia</li> <li>Pertumbuhan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>investasi pendidikan lebih baik jika dibandingkan investasi kesehatan.</li> <li>Daerah desa, investasi kesehatan lebih baik jika dibandingkan investasi pendidikan.</li> </ol>
4	Mudrajat Kuncoro <i>"Mengurangi Ketimpangan"</i>	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pertumbuhan ekonomi</li> <li>Kemiskinan</li> <li>Indeks Gini.</li> </ol> <p>Sumber data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BPS (2012)</li> </ul> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pendekatan data panel</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PE meningkat di Indonesia, ternyata ketimpangan pendapatan yang diukur dengan indeks Gini juga meningkat, tetapi kemiskinan cenderung menurun.</li> <li>Kontribusi Pulau Jawa terhadap PDB sebesar 57,5% dan Pulau Sumatera 23,9%.</li> <li>Sementara itu Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya 18,6%.</li> </ol>
5	Ahmad Ma'ruf dan Latri Wihastuti <i>"Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya"</i>	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PDRB</li> <li>SDA</li> <li>Lokasi</li> <li>Desentralisasi</li> <li>Inflasi</li> </ol> <p>Sumber data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laporan tahunan provinsi, BPS</li> </ul> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Analisis data panel 26 provinsi (1980-2006)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Variabel PDRB, pengeluaran pemerintah, SDA, lokasi, dan desentralisasi memberikan dampak positif terhadap PE.</li> <li>Sedangkan variabel pertumbuhan penduduk dan inflasi memberikan dampak sebaliknya</li> </ol>
6	Penelitian Indra Maipita, Mohd. Dan Jantan dan Nor Azam Abdul Razak <i>"Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka</i>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kebijakan fiskal</li> </ul> <p>Sumber data:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tabel Input-Output (IO)</li> <li>SNSE</li> <li>SUSENAS</li> <li>BPS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan transfer pendapatan memberikan dampak positif untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga di pedesaan dan menurunkan angka kemiskinan.</li> </ol>

Lanjutan Tabel 21

	<i>Kemiskinan di Indonesia</i>	<p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Foster, Greer, dan Thorbecke (F-G-T) untuk mengevaluasi angka kemiskinan di setiap kelompok rumah tangga</li> </ul>	<p>b. Peningkatan pajak di daerah urban dapat meningkatkan intensitas kemiskinan, kesenjangan, dan rasio kemiskinan dibanding dengan daerah rural.</p>
7	Ruslan Abdul Ghafur Noor <i>"Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia"</i>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>kebijakan distribusi</li> </ul> <p>Sumber data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Literatur</li> </ul> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Library research, kualitatif</i></li> </ul>	<p>a. Keadilan dalam DP dapat meminimalisir tingkat disparitas.</p> <p>b. Hal tersebut dapat dengan bersinerginya antara pemerintah dan masyarakat.</p>
8	Sri Kusreni dan Sultan Suhab <i>"Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan"</i>	<p>Variabel:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kapasitas fiskal</li> <li>Alokasi belanja modal</li> <li>Pembiayaan daerah</li> <li>Tingkat kesejahteraan masyarakat.</li> </ol> <p>Sumber Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BPS</li> </ul> <p>Metode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regresi Linear Berganda</li> </ul>	<p>a. Kapasitas fiskal dan Alokasi belanja modal berhubungan positif dan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kab./kota di Prov. Sulsel.</p> <p>b. Pembiayaan daerah berhubungan negatif dan tidak signifikan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kab. kota di Prov. Sulsel.</p> <p>c. Kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara signifikan ditentukan oleh 23,1% variabel-variabel kebijaksanaan APBD, selebihnya 76,9% ditentukan oleh variabel-variabel lainnya di luar model.</p>
9	Lembaga Penelitian SMERU <i>"Dampak Kebijakan</i>	<p>Variabel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan Upah Minimum</li> </ul>	<p>a. Upah minimum telah menguntungkan sebagian pekerja tetapi merugikan sebagian</p>

Lanjutan Tabel 21

	<i>Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia</i>	Sumber data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas)</li> </ul> Metode: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonometrik</li> </ul>	lainnya. b. Secara total, perkiraan elastisitas dan nyata secara statistik, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) -0,112 untuk penyerapan tenaga kerja.</li> <li>b) -0,3, untuk pekerja usia muda dan perempuan.</li> <li>c) -0,2 untuk tenaga kerja yang berpendidikan</li> <li>d) 1,0 untuk tenaga kerja kerah putih.</li> </ol>
10	Supriyati Istiqomah  <i>"Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam"</i>	Variabel: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan</li> </ul> Sumber data: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Literatur</li> </ul> Metode: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Library research, kualitatif</li> </ul>	a. Pemberdayaan dalam bidang; ruhaniyah, intelektual dan ekonomi. b. Bidang ekonomi agar umat Islam dengan rasio mayoritas dapat membawa distribusi pendapatan secara merata.

## B. Landasan Teori/Kerangka Teori

### 1. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan di sebuah perekonomian adalah merupakan hasil akhir kerja seluruh proses ekonomi<sup>34</sup>. Faktor yang mempengaruhi perubahan distribusi pendapatan menurut kaum marginalis pada 1870 diantaranya perubahan kuantitas faktor relatif, elastisitas substitusi, perubahan permintaan akan produk, dan sifat perubahan teknis. Alternatif dari model ini diajukan oleh Kalecki (1950)

<sup>34</sup> Norman Gemmill, ed., *Ilmu Ekonomi Pembangunan, Beberapa Survei*, alih bahasa: Nirwono, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1992), hal. 205.

dan Kaldor (1956). Dalam model Kalecki analisa monopoli digunakan untuk menetapkan besar kecil bagian fungsional (upah, laba). Menurut Kaldor dan pendukung Keynes lainnya, distribusi pendapatan dengan mekanisme tingkat investasi ditentukan oleh kecenderungan pekerja dalam menabung. Hal ini bertolak belakang dengan Neo-Klasik adalah tabungan menentukan besar-kecil investasi, sedang kenaikan investasi dalam model Neo-Keynes harus mengarah pada peningkatan laba, karena kecenderungan untuk menabung yang berasal dari laba lebih tinggi daripada kecenderungan untuk menabung yang berasal dari upah<sup>35</sup>.

Distribusi pendapatan oleh Pareto (1987) adalah pendapatan didistribusikan sesuai dengan kecakapan atau kemampuan seseorang. Sementara itu, Pigou (1932) berpendapat bahwa distribusi yang tidak simetris disebabkan oleh kenyataan bahwa kekayaan itu diwariskan, dan yang juga relevan adanya kelompok yang tidak sanggup bersaing serta tidak mempunyai mobilitas<sup>36</sup>.

Menurut Aliran modal manusia (*the human capital school*, Becker, 1964; Mincer, 1958, 1974) berpendapat individu adalah alat pengoptimalan yang memutuskan menanam modal untuk dirinya sendiri, bisa dalam bentuk pendidikan. Lalu, Bliss dan Stern (1978) menampilkan teori yang menyatakan bahwa para majikan memberikan upah lebih kepada pekerjanya dengan tujuan mendapatkan pendapatan yang lebih maksimal dan menjadikan pekerjanya sebagai modal dalam bentuk modal manusia<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 207.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 208.

<sup>37</sup> *Ibid.*

## 2. Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Afzalurrahmān (1997) mengatakan bahwa distribusi pendapatan atau lebih dikenal sebagai distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, karena penyelesaiannya yang adil dan wajar akan menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh penduduk. Sektor produksi (*income* pada negara) sangatlah penting dan perlu, tetapi yang lebih penting lagi adalah cara pendistribusian pendapatan itu. Beberapa instrument penerimaan negara menurut ekonomi Islam seperti; Ganîmah, Şadaqah, Infaq, Zakāh, ‘Usyr (lahan pertanian), Fai’, Jizyah, Kharaj, ‘Uşr (bea cukai), Pajak atas Pertambangan dan Harta Karun, Waqāf, dan Pajak-pajak lain.



Menurut Chapra (2000) prinsip-prinsip pengeluaran dalam ekonomi Islam, harus memperhatikan *maqāsid* yang tercakup dalam kaidah *uşul* yang telah dikembangkan oleh para fuqaha, antara lain:

1. Kriteria pokok semua alokasi pengeluaran harus diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat.
2. Penghapusan kesulitan dan bahaya harus didahulukan daripada penyediaan kenyamanan.
3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sempit.
4. Suatu pengorbanan atau kerugian privat dapat ditimpakan untuk menyelamatkan korban atau kerugian publik, dan suatu pengorbanan atau

kerugian yang lebih besar dapat dihindari dengan merelakan suatu pengorbanan atau kerugian yang lebih kecil.

5. Siapa saja yang menerima manfaat harus membayar ongkos.
6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka sesuatu itu wajib hukumnya.

Kaidah-kaidah tersebut memiliki bobot yang sangat penting pada pengeluaran pemerintah dalam perspektif ekonomi Islam<sup>38</sup>. Apabila kaidah-kaidah tersebut tidak dilakukan, dampak negatif yang dirasakan akan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Kemudian akan menyebabkan sebagian besar pendapatan suatu negara hanya dimanfaatkan oleh sebagian kecil penduduk, sedangkan penduduk lain tidak akan dapat bermanfaat bagi yang lain. Firman Allah berikut:


  
 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”* (QS. al-Hasyr (59): 7).

Ayat ini menegaskan prinsip yang mengatur pembagian kekayaan (distribusi pendapatan) adalah bahwa kekayaan/pendapatan itu harus dibagikan ke seluruh kelompok masyarakat dan bahwa kekayaan pendapatan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar di antara orang-orang kaya

<sup>38</sup> Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 287.

saja”<sup>39</sup>. Lebih lanjut menurut Nabḥani kewajiban negara dalam menjamin pendistribusian pendapatan kepada seluruh masyarakatnya, atas dasar inilah pemerintah harus memberikan harta, baik yang bergerak maupun yang tetap. Sebab, maksud pemberian harta tersebut bukan sekadar memenuhi kebutuhan bersifat temporal, tetapi untuk terpenuhinya kebutuhan penduduknya. Apabila negara tidak memiliki harta, atau harta negara tidak cukup untuk mewujudkan keseimbangan, maka negara tidak boleh memungut pajak dari penduduknya<sup>40</sup>.

Menurut Qardāwī (2004), termasuk dalam prinsip keadilan adalah *takaful* (kesetiakawanan sosial) yang menyeluruh, yaitu jaminan sosial bagi kaum lemah dan tidak mampu di masyarakat. Sebagaimana dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)” (QS. al-Ma’ārij (70): 24-25).

Hal ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok orang miskin, dan termasuk juga kesetiakawanan sosial adalah memberikan pelatihan kepada tenaga kerja yang membutuhkan bimbingan khusus agar menghasilkan *output* produksi yang maksimal.

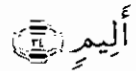
<sup>39</sup> Afzalurrahmān, *Muhammad sebagai Pedagang*, alih bahasa: Dewi Nurjulianti, dkk., (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), hal. 286. Dan A.A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa: Anshari Thayib. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 294.

<sup>40</sup> Taqyuddin An-Nabḥani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*, alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hal. 272

<sup>41</sup> Yūsuf Qardāwī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa: Didin Hafiduddin, Setiawan Budiutomo, Annur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hal. 411.

Selain *takāful*, prinsip keadilan dalam Islam adalah: mendekatkan jurang perbedaan antar manusia. Islam membatasi ambisi kaum kaya dan mengangkat taraf hidup kaum miskin. Diantaranya melalui pengharaman atas usaha yang dilakukan secara batil, riba dan monopoli, berbuat *tabzir*, serta menimbun harta. Firman Allah:

وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ



“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.” (QS. at-Taubah (9): 34).

Menurut Antonio (2004) pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat (seperti dalam zakāh, infāq, ṣadaqah, warisan, dan waqāf)<sup>42</sup>. Sedangkan menurut Sudarsono dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek ekonomi tetapi juga pada aspek sosial dan politik<sup>43</sup>.

Nafkah yang dilakukan oleh manusia harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat dalam kehidupan, agama dan berdasarkan ilmu. Pertama untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan jasmani. Kedua, kebutuhan ruhiyyah

<sup>42</sup> M. Safi'i Antonio, "Konsep Distribusi Islam", *Republika*, 5 April 2004 dalam Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 119.

<sup>43</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 231.

dengan menafkahnnya di jalan kebaikan sebagai bekal di akhirat, ketiga kewajiban sosial, yaitu membantu menyelesaikan problem-problem sosial dan membantu mewujudkan kemaslahatan mereka dalam kehidupan<sup>44</sup>.

Islam menghadirkan konsep zakāh sebagai wahana distribusi kekayaan, hal ini dapat memberikan dampak positif karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio penduduk muslim yang mayoritas, kemudian dengan adanya pajak dalam waktu tertentu, menjaga kehidupan keluarga dengan konsep hukum waris, agar tercipta distribusi yang merata dalam keluarga. Sedangkan, negara mempunyai tanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat, serta bertugas untuk menjamin kebutuhan dasar hidup. Lalu, diantara peran negara yang begitu strategis adalah menentukan peraturan dan hukum yang bertujuan demi kemaslahatan masyarakat, bukan untuk golongan tertentu<sup>45</sup>. Di antara hak-hak masyarakat yang harus diberikan oleh pemerintah antara lain:

- a. Menyediakan lapangan kerja bagi pengangguran.
- b. Memberikan nafkah bagi orang yang tidak mampu dan tidak ditemukan orang yang menanggungnya. sampai ia menemukan lapangan kerja dan mampu untuk hidup mandiri.
- c. Menanggung kehidupan keluarga, setiap bayi yang lahir berhak mendapatkan rezeki.
- d. Menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>44</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa: Dimyauddin Djuwani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 235.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 237.

- e. Menyediakan tempat bagi orang yang bepergian, serta memberikan nafkah bagi mereka yang kehabisan bekal.
- f. Mengembangkan konsep solidaritas sosial, serta menjamin kehidupan dan pekerjaan masyarakat<sup>46</sup>.

Demikianlah Islam membangun hubungan antara orang yang kaya dan orang yang fakir atas dasar keadilan, persamaan, dan persaudaraan. Ia menyamakan di antara semua orang dalam prinsip, hak dan kewajiban, serta memberikan kesempatan bagi semua orang untuk berusaha dan mengatakan kepada mereka:


  
 وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

*“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* (QS. at-Taubah (9): 105).

Dan mengatakan kepada orang-orang kaya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

*“Ambillah zakāh dari sebagian harta mereka, dengan zakāh itu kamu membersihkan<sup>47</sup> dan mensucikan<sup>48</sup> mereka dan mendoalah untuk mereka.*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 238.

<sup>47</sup> Maksudnya: zakāh itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta benda.

<sup>48</sup> Maksudnya: zakāh itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. at-Taubah (9): 103).

Juga mengatakan kepada orang yang fakir: jangan iri dan jangan dengki:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۚ

“Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah Kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk Kami coba mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal.” (QS. Tāhā (20): 131).

Setelah itu mengatakan kepada semua orang:

“Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara!” (HR. Ahmad dan Muslim dari Abū Hurairah, *Sahih al-Jami’ah aṣ-Ṣagīr* (7242)).

Begitulah persaudaraan yang mendominasi masyarakat Islam semuanya.

Pada masa Rasūlullāh saw. tidak ditemukan orang fakir yang dengki kepada orang kaya dan mencemburui mereka, kecuali dalam hal ilmu, iman dan amal<sup>49</sup>.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ قَالَ : أَوْ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا يَتَصَدَّقُونَ : إِنَّ لَكُمْ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا

<sup>49</sup> Yūsuf Qarḍawī, *Peran Nilai*, hal. 449.

أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وَزْرٌ ؟ فَكَذَلِكَ

إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. [رواه مسلم]

"Dari Abū Zār Raḍiyallāhu 'anhu bahwa beberapa orang dari Sahabat berkata kepada Nabi Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam: "Wahai Rasūlullāh! Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat seperti kami shalat, mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Beliau Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbīḥ adalah sedekah, setiap takbīr adalah sedekah, setiap tahmīd adalah sedekah, setiap tahlīl adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'rūf adalah sedekah, mencegah dari yang munkar adalah sedekah, dan salah seorang dari kalian bercampur (berjima') dengan istrinya adalah sedekah." Mereka bertanya: "Wahai Rasūlullāh! Apakah jika salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya (bersetubuh dengan istrinya) maka ia mendapat pahala di dalamnya?" Beliau menjawab: "Apa pendapat kalian seandainya ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka ia memperoleh pahala." (HR. Muslim dalam *Hadīs Arba'in* karya Imam Nawawi, hadīs ke 25).

### 3. Ketimpangan dalam Distribusi Pendapatan

Ketimpangan dapat diterjemahkan sebagai *gap* antara yang tertinggi dan yang terendah. Dalam konteks ekonomi aspek "keadilan dan pemerataan" selain dapat ditinjau berdasarkan hubungan interpersonal, namun dapat pula ditinjau menurut perbandingan antar daerah. Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik memenuhi beberapa syarat seperti:

- a. Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.

- b. Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- c. Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- d. Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini<sup>50</sup>.

Selain itu ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Dapat didekomposisi. Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub kelompok masyarakat (sub grup).
- b. Dapat diuji secara statistik. Peneliti harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap interval* (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

---

<sup>50</sup>Annual report, *Gini*, hal. 8-9.

Indikator yang dapat digunakan dalam distribusi pendapatan, melalui:

a. Kurva Lorenz

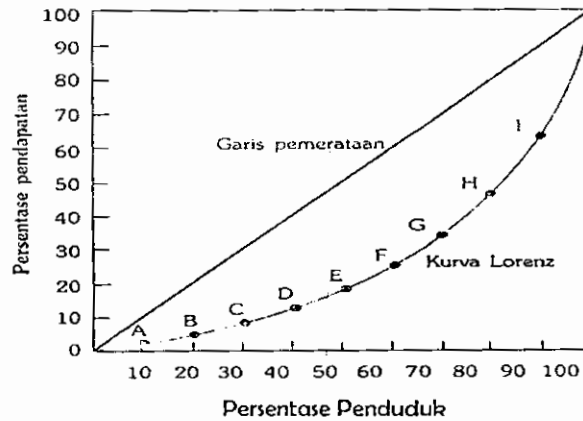
Dinamakan kurva Lorenz karena yang memperkenalkan kurva tersebut adalah Conrad Lorenz (pada 1905) di Amerika Serikat. Kurva ini memiliki sumbu vertikal dan sumbu horizontal, jumlah penerima pendapatan pada sumbu horizontal dan pangsa pendapatan yang diterima oleh masing-masing persentase jumlah penduduk dinyatakan tidak dalam angka mutlak, tetapi dalam persentase kumulatif sampai 100%, dengan demikian kedua sumbu itu sama panjangnya dan akhirnya membentuk bujur sangkar<sup>51</sup>.

Kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dan persentase pendapatan yang mereka terima. Semakin jauh kurva Lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), semakin tinggi derajat *ketidakmerataan* yang ditunjukkan. Keadaan paling ekstrim dari *ketidakmerataan sempurna*, apabila seluruh pendapatan hanya diterima oleh satu orang, yang ditunjukkan dengan berimpitnya kurva Lorenz dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Cet. 2, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta, 2004), hal. 230.

<sup>52</sup> *Ibid.*

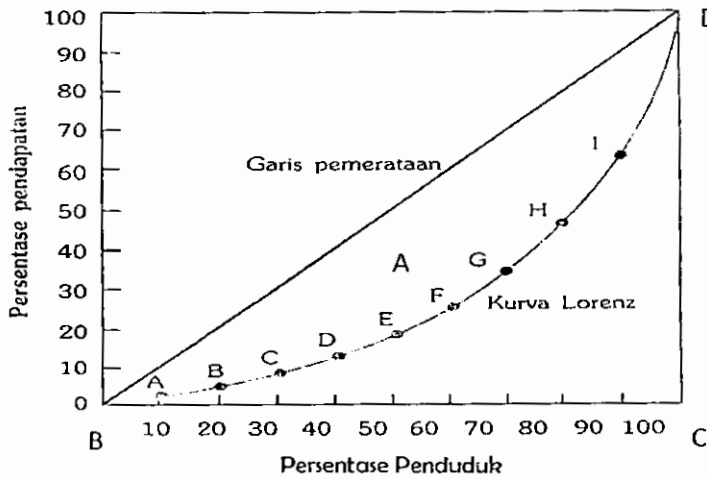


Gambar 22 Kurva Lorenz

#### b. Koefisien Gini

Menurut Todaro pengukuran ketimpangan atau ketidakmerataan pendapatan yang relatif sangat sederhana pada suatu negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang pada kurva Lorenz tersebut. Pada gambar 23, rasio yang dimaksud adalah rasio atau perbandingan bidang A terhadap total segitiga BCD. Selanjutnya, rasio inilah yang dinamakan dengan Rasio Konsentrasi Gini (*Gini concentration ratio*) yang disingkat dengan koefisien Gini (*Gini coefficient*). Istilah ini diambil dari seorang ahli statistik Italia bernama C. Gini yang merumuskannya pada 1912<sup>53</sup>.

<sup>53</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Duni Ketiga*, alih bahasa: Haris Munandar, editor: Yati Sumiharti, Ed. 6, cet. 1, (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 173.



$$\text{koef. Gini} = \frac{\text{Daerah A}}{\text{Luas } \triangle BCD}$$

Gambar 23 Koefisien Gini

Secara matematis rumus koefisien Gini sebagai berikut:

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n P_i(Q_1 + Q_2)}{1000}$$

Keterangan :

G = Gini Ratio

$P_i$  = Persentase rumah tangga pada kelas pendapatan ke-i

$Q_i$  = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas-i

$Q_{i-1}$  = Persentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

n = Banyaknya kelas pendapatan

Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (tidakmerataan sempurna). Koefisien Gini dari negara-negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50 – 0,70; ketidakmerataan

sedang berkisar antara 0,36–0,49; dan yang mengalami ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20–0,35<sup>54</sup>.

c. Kriteria Bank Dunia.

*Relative inequity* diartikan sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Kriteria ini sering juga disebut sebagai tingkat kemiskinan relatif, yaitu:

- 1) *High inequity*, jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12% dari bagian pendapatan nasional atau GNP.
- 2) *Moderat inequity*, jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12-17% dari bagian pendapatan nasional.
- 3) *Low inequity*, jika 40% penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari bagian pendapatan nasional<sup>55</sup>.

Ketimpangan dalam distribusi pendapatan juga berkaitan erat dengan kemiskinan. Kemiskinan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia miskin adalah tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). sedangkan kemiskinan absolut merupakan situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum<sup>56</sup>.

Kemiskinan memiliki permasalahan yang sangat kompleks dan telah ditelaah oleh para ilmuwan sosial dari berbagai latar belakang disiplin ilmu dengan menggunakan berbagai konsep dan ukuran. Istilah “standar hidup”, “pendapatan”, dan “distribusi pendapatan” lebih sering digunakan dalam ilmu ekonomi,

<sup>54</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi.*, hal. 233.

<sup>55</sup> Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi.*, hal. 119.

<sup>56</sup> Dalam KBBI offline versi 1.3.

sedangkan istilah “kelas”, “stratifikasi” dan “marginalitas” digunakan oleh para sosiolog<sup>57</sup>.

Menurut Andre Bayo Ala (1981) kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi berbagai aspek –primer dan sekunder. Aspek primer seperti kemiskinan akan aset, pengetahuan, keterampilan serta organisasi sosial politik. Dan aspek sekunder berupa miskin akan jaringan sosial, informasi dan sumber-sumber keuangan. Hasilnya, dimensi-dimensi kemiskinan terealisasi dalam bentuk kekurangan gizi, air serta perumahan sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik dan tingkat pendidikan yang rendah<sup>58</sup>. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika fenomena kemiskinan diobjektifkan dalam bentuk angka-angka<sup>59</sup>.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep pendekatan kebutuhan dasar dalam memperkirakan angka kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berupa makanan dan non makanan. yang diperkirakan dengan menggunakan pengeluaran rumah tangga. Dengan menggunakan pendekatan ini, tiga perkiraan tentang kemiskinan, contohnya *Headcount Index* menjelaskan orang-orang yang tinggal di bawah garis

<sup>57</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi.*, hal. 236.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 237.

<sup>59</sup> Muhammad Soekarni, “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islam” dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (ed.) *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 126.

kemiskinan, indeks tingkat kemiskinan mendalam (P1) dan indeks kemiskinan yang sangat mencekam (P2) dapat dihitung.

Metode yang digunakan adalah perhitungan garis kemiskinan (GK), terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM). Perkiraan garis kemiskinan dihitung secara terpisah untuk area perkotaan dan pedesaan di setiap provinsi. Orang miskin adalah mereka yang pendapatan per kapitanya di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk makanan yang sama dengan 2.100 kilo kalori per kapita/hari. Cakupan komoditas kebutuhan dasar terdiri dari 52 item, di antaranya adalah beras, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan minyak<sup>60</sup>.

Selo Sumardjan (1980) berpendapat selain ditimbulkan oleh hal yang sifatnya alamiah/kultural, masalah kemiskinan juga disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, sehingga oleh para pakar hal ini digolongkan kepada kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka<sup>61</sup>.

Kebutuhan dasar manusiawi menurut Thee Kian Wie (1981) terdiri atas beberapa kategori, yaitu; a) barang kebutuhan dasar, seperti: pangan, sandang, dan pemukiman. b) jasa-jasa kebutuhan dasar, seperti: fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan saluran air sehat. c) lapangan kerja yang

---

<sup>60</sup> Indra Maipita, Mohd. Dan Jantan dan Nor Azam Abdul Razak, *Dampak*. hal 433-434.

<sup>61</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi*., hal. 238.

produktif, yang dapat menjamin pendapatan yang mencukupi untuk membiayai penyediaan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan dasar. d) partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup sendiri<sup>62</sup>.

Di antara faktor yang menjadikan kesenjangan dalam distribusi pendapatan di Indonesia adalah karena perilaku korupsi. Di mata internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Pandangan ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai entitas asing seperti: *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang diumumkan pada Bulan Maret Tahun 2002. Penelitian tersebut menempatkan Indonesia dengan tingkat skor 9.92 berdasarkan skala tertinggi 10. Sedangkan dari sumber *Transparency International* (TI) Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk Indonesia pada tahun 2003 menempati posisi yang cukup memprihatinkan, yaitu 1.9 dan peringkat 122 dari 133 negara yang disurvei. Pada tahun 2004, IPK Indonesia menjadi 2.0 dan menduduki urutan 137 dari 146 negara yang disurvei. Semakin rendah IPK, semakin parah tingkat korupsinya. Berdasarkan data terakhir yang diperoleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2005, menurut data *Political Economic and Risk Consultancy*, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia<sup>63</sup>. Tahun 2012 Indonesia bahkan tergabung dalam 60 besar negara terkorup di dunia versi Transparansi Internasional. Indonesia duduk di peringkat 118 dari daftar peringkat

---

<sup>62</sup>Thee Kian Wie. *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan; Beberapa Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Harapan, 1981). hal. 57-58.

<sup>63</sup>Yusran, "Kerjasama Indonesia-UNCAC Menangani Kejahatan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional: Transnasional*, No.1, Vol.7 (Juni. 2012), hal. 89 dalam [http://fisip.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/TRANSNASIONAL.VOL7\\_1-2012.pdf](http://fisip.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/TRANSNASIONAL.VOL7_1-2012.pdf) diakses pada 8 Januari 2014.

indeks persepsi korupsi 174 negara dunia. Namun jika mengacu poin tiap negara, Indonesia duduk di posisi 56 negara terkorup. Peringkat Indonesia ini menurun bila dibanding tahun 2011, di mana Indonesia berada di posisi 100<sup>64</sup>.

Dengan kondisi seperti ini pemerintah mesti melakukan pembenahan yang komprehensif agar praktek korupsi yang terjadi tidak semakin menyengsarakan masyarakat nasional dan mengganggu distribusi pendapatan.

#### 4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Qardāwī (2004) yang diperhatikan oleh Islam mengenai *gap* pendapatan antar manusia terletak pada pemerataan kesempatan dalam berusaha atau beramal. Dalam lanjutannya masing-masing manusia akan memiliki keahlian yang berbeda. Dari hal inilah mereka akan mendapatkan pendapatan yang berbeda pula, linear dengan keahlian dan kerja keras mereka. Al-Qur`ān telah menetapkan hakikat ini dengan mengatakan:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ

*Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran". (QS. az-Zumar (39): 9).*

Kemudian pada ayat-Nya yang lain:

<sup>64</sup><http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/06/mela7d-inilah-instrumen-pengukur-tingkat-korupsi> diakses pada 8 Januari 2014.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ... ﴿٩٥﴾

“Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat”. (QS. an-Nisā (4):95).

Dan juga firman-Nya pada surat al-Mujādilah ayat 11

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٥٨﴾

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. al-Mujādilah (58): 11).

Dari rangkaian ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa perbedaan pendapatan merupakan suatu ketidaksamaan yang adil. Ini merupakan aksioma yang telah diungkapkan oleh Al-Qur`ān dalam sejumlah ayat, seperti dalam surat an-Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِنْمَةِ اللَّهِ تُجْحَدُونَ ﴿٧١﴾

“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?<sup>65</sup>”. (QS. an-Nahl (16): 71).

Mungkin ayat yang paling mudah diterima oleh akal di sini adalah firman-Nya:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. az-Zukhruf (43): 32).

Kelebihan tersebut bukan berarti tidak memberikan kesempatan kepada sebagian orang, namun penekananannya lebih kepada penggunaan waktu, ilmu, kerja dan penunaian tugas dengan baik<sup>66</sup>.

## 5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Output per kapita mencakup total GDP<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaan dalam Islam.

<sup>66</sup> Yūsuf Qardāwī, *Peran.*, hal. 400.

dan jumlah penduduk. Yang dimaksud dengan jangka panjang ialah kenaikan output tersebut selama satu atau dua tahun<sup>68</sup>. Sedangkan Arsyad (2004) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak<sup>69</sup>. GDP tidak mempertimbangkan kebangsaan perusahaan atau warga negara yang menghasilkan barang atau jasa negara tersebut. GDP dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berdomisili di negara tersebut, baik pribumi maupun warga negara asing. Nilai GDP dapat dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku atau harga dasar yang konstan. GDP nominal mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut. Sedangkan GDP riil mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap<sup>70</sup>.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan pendapatan nasional dari tahun ke tahun. Dalam membandingkannya harus disadari bahwa perubahan nilai pendapatan nasional yang terjadi dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi dan perubahan harga-harga. Adanya pengaruh dari faktor yang kedua tersebut disebabkan oleh penilaian pendapatan nasional menurut harga yang berlaku pada

---

<sup>67</sup> *Gross Domestic Product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun.*

<sup>68</sup> Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1985), hal. 1.

<sup>69</sup> Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE-YKPN, 2004), hal. 13.

<sup>70</sup> <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/pengertian-gross-domestic-product-produk-domestik-bruto-gdp/> diakses pada 13 Januari 2014.

tahun yang bersangkutan. Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau perkembangan jika tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai lebih tinggi dari waktu sebelumnya.

Menurut Sukirno (1994) faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain:<sup>71</sup>

- a. Tanah dan kekayaan alam lain. Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi.
- b. Jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah akan mendorong maupun menghambat pertumbuhan ekonomi. Akibat buruk dari penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi yang tersedia.
- c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi. barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi.
- d. Sistem sosial dan sikap masyarakat. Sikap masyarakat akan menentukan sampai di mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai.

---

<sup>71</sup> Bambang Prishardoyo, "Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, No. 1, Vol. 1 (September, 2008), hal. 3.

- e. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialisasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas karena ini merupakan salah satu tujuan pembangunan. Akan tetapi, gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah relatif tinggi<sup>72</sup>, tetapi tidak berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, pada akhirnya akan membuat jurang kemiskinan yang semakin melebar. Inilah kondisi paradok pertumbuhan ekonomi (*paradox of economics growth*) yang kini terjadi di Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tinggi lebih banyak ditopang oleh laju pertumbuhan tingkat konsumsi dari pada investasi. Dampak selanjutnya, karena masih rendahnya tingkat investasi, khususnya investasi *human capital* dan teknologi, maka nilai tambah dari produktivitas menjadi tetap rendah dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi tidak berkualitas.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadi pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan yang ditopang oleh investasi. Pertumbuhan yang ditopang oleh investasi dianggap akan dapat meningkatkan produktivitas sehingga membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi<sup>73</sup>. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama ini cukup

<sup>72</sup> Menurut data BPS Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,46% pada tahun 2011, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,20%, sumber: Statistik Indonesia 2012, BPS.

<sup>73</sup> Dewi Ernita, dkk, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi*, No. 02, Vol. I (Januari, 2013), hal. 177.

tinggi, tetapi belum berkualitas, karena secara riil pertumbuhan ekonomi tersebut belum mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diharapkan mampu mengurangi pengangguran dan kemiskinan seperti yang diharapkan. Harapan besar pemerintah bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dapat menyejahterakan rakyat melalui (*growth with equality*), seharusnya berawal dari kesiapan prakondisi yang menuntut kemampuan atau kinerja stabilitas ekonomi makro yang kondusif sebagai prasyaratnya. Hasilnya harus dapat berimplikasi yang positif pada tumbuh dan berkembangnya aktivitas riil di semua sektor ekonomi terutama UMKM. Karena, aktivitas di sektor UMKM pada dasarnya lebih mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sebagai salah satu indikator keberhasilan dari pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tersebut.

Meningkatkan sektor investasi khususnya investasi di bidang *human capital*, *capital social*, infrastruktur dan teknologi khususnya teknologi informasi dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Penguatan investasi pada semua sektor melalui bidang tersebut akan menciptakan efek ganda (*multiplier effect*) yang lebih tinggi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu bangsa (Indonesia). Penyaluran kredit dikatakan berkualitas, apabila memiliki *multiplier effect* baik bagi pelaku usaha, pekerja, dan terhadap pemerintah kabupaten/kota, di mana pelaku usaha tersebut tinggal, misal dengan meningkatnya lapangan kerja. Dalam upaya ini, dibutuhkan instrumen-instrumen

untuk mendorong penyaluran kredit yang berkualitas agar sektor riil mampu bergerak dan mendominasi penyaluran kredit di sektor produktif<sup>74</sup>.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada masyarakatnya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya; *pertama*, kemajuan atau penyesuaian teknologi, *kedua* dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk, *ketiga* secara institusi (lembaga) dan dasar terhadap berbagai tuntutan kondisi yang ada, dan *keempat* yaitu pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara<sup>75</sup>.

## 6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pada dasarnya pembangunan regional tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan pembangunan nasional. salah satu sasaran pembangunan nasional Indonesia adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan, termasuk di dalamnya pemerataan pendapatan antar daerah (wilayah). Untuk mencapai sasaran di atas bukanlah pekerjaan ringan karena pada umumnya pembangunan ekonomi suatu daerah berkaitan erat dengan potensi ekonomi dan karakteristik yang dimilikinya.

<sup>74</sup> P. Eko Prasetyo. "The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, No. 1, Vol. 1 (September, 2008), hal. 31.

<sup>75</sup> Wilsa R.B. Sitepu, dkk, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Singapura", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, hal. 2, dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34824/1/Appendix.pdf> diakses pada 9 Januari 2014.

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat lokal, dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat banyak dan mendorong perekonomian untuk maju. Bila memperbandingkan pertumbuhan antara daerah, maka akan ditemui kenyataan bahwa ada daerah yang tumbuh lebih cepat diantaranya disebabkan oleh struktur ekonominya sebagian besar mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sebaliknya bagi daerah yang pertumbuhannya lambat, sebagian besar sektor ekonominya mempunyai laju pertumbuhan yang lambat<sup>76</sup>.

Suatu daerah terbagi ke dalam wilayah-wilayah atau sub-sub wilayah. Misalnya daerah provinsi dalam wilayah tersebut masih terbagi atas berbagai sub wilayah seperti kabupaten atau kota. Pertumbuhan daerah tersebut akan ditentukan oleh faktor-faktor utama yang antara lain:

- a. Sumber daya alam yang tersedia.
- b. Tersedianya modal bagi pengelolaan sumber daya alam.
- c. Adanya prasarana dan sarana (infrastruktur) yang menunjang seperti transportasi dan komunikasi.
- d. Tersedianya teknologi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya alam.

---

<sup>76</sup> Anna Yulianita, "Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, hal 71, dalam [http://eprints.unsri.ac.id/2834/1/Analisis\\_Sektor\\_Unggulan\\_dan\\_Pengeluaran\\_Pemerintah\\_di\\_Kab\\_OKI--isi.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/2834/1/Analisis_Sektor_Unggulan_dan_Pengeluaran_Pemerintah_di_Kab_OKI--isi.pdf) diakses pada 9 Januari 2014.

e. Tersedianya kualitas sumber manusia untuk pengelolaan teknologi.

Pembangunan daerah harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Apabila pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan<sup>77</sup>.

Sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah dapat berupa lahan pertanian, bahan tambang atau galian yang dapat mendukung industri pengolahan atau sumber daya alam lainya yang akan mempunyai arti penting bagi daerah yang memilikinya. Daerah tersebut akan berspesialisasi dalam suatu sub sektor atau sektor dan akan mempunyai keuntungan absolut bagi daerah lainnya jika daerah tersebut dikelola secara baik dengan modal dan teknologi yang memadai maka daerah tersebut dapat diharapkan akan mengalami pertumbuhan dengan pesat<sup>78</sup>.

## 7. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Mahrusy (2009), Ekonomi Islam pada dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan dengan *a sustained growth of a right kind of output which can contribute to human welfare* (Pertumbuhan terus-menerus dari

<sup>77</sup> Taufik Zainal Abidin, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Asahan (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan SWOT)", *QE Journal*, No. 01, Vol. 02, hal. 33.

<sup>78</sup> Anna Yulianita, *Analisis*, *Ibid.*

faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk, dan tidak bermanfaat bagi manusia<sup>79</sup>. Sedangkan istilah pembangunan ekonomi yang dimaksudkan dalam Islam adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* (Proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman, kenyamanan dan tata susila dalam kehidupan). Dalam pengertian ini, maka pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral<sup>80</sup>.

Pertumbuhan ekonomi dalam Islam memiliki tujuan penting mesti diprioritaskan seperti: pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap alam. Hal tersebut agar menciptakan harmonisasi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam yang menyediakan berbagai sumber daya, baik sumber daya hewani maupun nabati.

Menurut Ibrahim (2011) konsentrasi utama ekonomi pembangunan pada sistem ekonomi Islam adalah kesejahteraan manusia (*human welfare*). Proses

---

<sup>79</sup> Atidyet Mahrusy, al. 2009. "Pembangunan Ekonomi dalam Islam". *Paper Ekonomi Islam* dalam <http://jurnalekis.blogspot.com/2011/09/ekonomi-pembangunan-perspektif-ekonomi.html#sthash.3mGqoE15.dpuf> diakses pada 13 Januari 2014.

<sup>80</sup> *Ibid.*

pembangunan ekonomi dalam Islam menurutnya harus semanusiawi mungkin. Ia harus memerhatikan pendidikan, mengutamakan integrasi sosial dan konservasi terhadap lingkungan. Baginya, pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan tidak melupakan generasi yang akan datang<sup>81</sup>.

Ahmad (2000) menilai bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan tidak dibedakan. Artinya, tidak ada pertentangan yang *inheren* antara nilai-nilai Islam dengan nilai yang ekonomi pembangunan inginkan. Meskipun pada faktanya banyak negara berkembang adalah negara-negara mayoritas berpenduduk muslim, termasuk Indonesia<sup>82</sup>.

#### 8. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 13 Tahun 2006 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran,

<sup>81</sup> Ibrahim dkk, 2011, "Sustainable Economic Development: Concept, Principles and Management from Islamic Perspective". *European Journal of Social Sciences*, No. 3, Vol. 24.

<sup>82</sup> Ausaf Ahmad, "Economic Development in Islamic Perspective: Revisited". *Review of Islamic Economics*, No. 9 (2000), dalam <http://jurnalekis.blogspot.com/2011/09/ekonomi-pembangunan-perspektif-ekonomi.html#sthash.3mGqoE15.dpuf> diakses pada 13 Januari 2014.

dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju<sup>83</sup>.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah menurut pasal 15 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan berpedoman kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Menurut Kunardjo (1996) penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD) mempunyai fungsi utama yaitu:

1. Fungsi alokasi, dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta.
2. Fungsi distribusi adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dan penerimaan pendapatan dapat dikurangi.
3. Fungsi stabilisasi adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai<sup>84</sup>.

Adapun D.J. Mamesah (1995) mengemukakan, bahwa dalam penyusunan APBD perlu ditambah empat prinsip lagi:<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Anna Yulianita, *Analisis*, hal 77.

<sup>84</sup> Kunardjo, *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*, Edisi ketiga, (Jakarta: UI-Press, 1996), hal. 138.

1. Prinsip kemandirian, di mana adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta adanya upaya ketepatan penggunaan dana yang tersedia agar dapat mengurangi ketergantungan kepada instansi yang lebih tinggi.
2. Prinsip prioritas, di mana dalam penyusunan anggaran agar diupayakan mempertajam prioritas dalam penggunaan dana.
3. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran, di mana pengendalian pembiayaan dan penghematan yang menyeluruh pada prioritas daerah tersebut di atas.
4. Prinsip disiplin anggaran, di mana setiap dinas/lembaga/satuan kerja daerah yang memperoleh anggaran harus dapat menggunakan secara efisien, tepat guna dan tepat waktu pertanggungjawabannya, serta tidak melaksanakan kegiatan atau proyek yang tidak tersedia/ belum tersedia kredit anggarannya dalam APBD<sup>86</sup>.

Anggaran pembangunan merupakan mata rantai yang mempunyai kaitan langsung dengan kemajuan pembangunan itu sendiri, baik keterkaitan kebelakang (*backward linkage*) maupun keterkaitan dengan kedepan (*forward linkage*). Dengan demikian anggaran pembangunan mempunyai dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> D.J Mamesah, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hal. 82.

<sup>86</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/penyusunan-anggaran-pemerintah-daerah.html> diakses pada 14 Januari 2014.

<sup>87</sup> Anna Yulianita, *Analisis*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak-pajak daerah<sup>88</sup>. Dalam perspektif pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijaksanaan APBD setiap tahunnya. APBD kabupaten/kota merupakan gambaran keseriusan pemerintah daerah untuk mengkonkritkan perannya dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan yang menjadi kewenangannya untuk dibiayai dalam satu tahun berjalan<sup>89</sup>.

APBD sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (17) UU Nomor 33 Tahun 2004, adalah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karenanya untuk menjalankan pemerintahan, daerah diharuskan menyusun rencana program dan kegiatan yang dilaksanakannya selama satu tahun ke depan, lengkap dengan tujuan dan rincian biaya yang dibutuhkan<sup>90</sup>.

Konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung

<sup>88</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33083/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 23 Desember 2013.

<sup>89</sup> Sri Kusreni dan Sultan Suhab, *Kebijaksanaan.*, hal. 5.

<sup>90</sup> Gribaldi, "Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Penyusunan APBD", *Jurnal on-line dinamika FISIP UNBARA*, Vol. 1, No. 2, Desember 2008, hal. 13, dalam <http://jod-fisipunbara.blogspot.com/2012/05/otonomi-daerah-dan-paradigma-baru.html> diakses pada 8 Januari 2014.

jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga keuangan, lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>91</sup>. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa latin yaitu "de" artinya "lepas", dan "centrum" artinya pusat. Dengan demikian desentralisasi dapat berarti penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 32 Tahun 2004). Sementara menurut B.C. Smith, desentralisasi adalah lawannya dari pemusatan kekuasaan di satu tangan dan menyerahkan kekuasaan itu kepada daerah-daerah<sup>92</sup>.

Dengan lahirnya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, telah membawa perubahan yang fundamental dalam hubungan pemerintahan sekaligus membawa perubahan penting dalam pengelolaan keuangan Daerah. Gubernur/Bupati/Walikota selaku wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur pengelolaan keuangannya dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, dengan kewenangan tersebut maka masing-masing provinsi melakukan inovasi-inovasi yang berkaitan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk menjadi contoh nasional<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup>Frahmawati Bumulo, "Peran APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah", *Jurnal Legalitas*, NO. 1, Vol. 2 (Februari, 2009), hal. 135.

<sup>92</sup>*Ibid.*, hal. 138.

<sup>93</sup>*Ibid.*, hal. 140.

Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan<sup>94</sup>.

Dengan dua Undang-undang di atas (UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004) dapat dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai acuan dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan sektor potensial yang terdapat pada daerahnya yang pada akhirnya dapat diharapkan memberi kontribusinya dalam mengurangi ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

## 9. Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pada dasarnya APBD ini merupakan sub dari APBN. Kebijakan dalam menentukan APBD ini berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dalam menyusun APBN. Namun, dalam cakupan yang lebih kecil, karena obyeknya adalah daerah. Dalam Islam penyusunan pendapatan dan belanja anggaran tersebut harus tidak bebas nilai, karena ditopang oleh tuntunan syāri'ah yang terkerangka dalam *maqāṣid asy-syāri'ah* yaitu: perlindungan terhadap aqidah (*faith*), jiwa (*life*), akal (*intellect*), keturunan (*posterity*), kepemilikan/harta (*property*). Dengan dijalankan

<sup>94</sup> *Ibid.*, hal. 138.

secara syāri'ah tersebut, pertimbangan-pertimbangan nilai moral harus selalu dikedepankan dalam kebijakan ini<sup>95</sup>.

Dalam peradaban Islam terutama dalam bidang *public finance* yang erat kaitannya dengan kebijakan fiskal tercatat tokoh-tokoh seperti Abū Yūsūf (731-798) dengan karyanya *al-Kharāj* yang berbicara tentang pajak yang proporsional atas hasil pertanian dari tanah *kharāj*. Sedangkan dari sektor pembelanjaan, Abū Yūsūf menekankan akan pentingnya pembangunan infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Semacam irigasi, jembatan dan lain-lain. Demikian juga dengan Abū 'Ubaid (838 M) dengan kitabnya *al-Amwāl* yang lebih awal dari bukunya Adam Smith, *The Wealth of Nation*. Kemudian al-Mawārdi (1058) dengan karyanya *al-Ahkām as-Sultaniyyah*, kemudian Ibnu Taimiyah (1263-1328) dengan karyanya seperti; *As-Siyāsah asy-syār'iyyah*, *al-Hisbah*, *al-Amwāl al-Mustarakah* serta ulama lainnya yang juga memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi seperti al-Gazāli dan Ibnu Khaldūn<sup>96</sup>. Peradaban Islam lebih awal jika dibandingkan dengan dunia Eropa. Negara-negara Eropa dan Amerika Serikat baru muncul pada tahun 1930-an. Sebelum tahun tersebut, pemerintah negara-negara Kapitalis, hanya menjadikan pajak sebagai sumber pembiayaan negara sedangkan pengeluaran pemerintah hanya dijadikan sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tanpa melihat dampaknya terhadap perekonomian nasional baik secara mikro maupun makro.

<sup>95</sup> Fajar Hidayanto, dalam *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, No. 1, Vol. IV (Juli, 2010), hal. 133.

<sup>96</sup> Umi Karomah Yaumidin, *Teori Ekonomi Dalam Islam*, editor- Masyhuri, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hal. 67.

Sejak terjadinya depresi ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1930, negara-negara Kapitalis menghadapi permasalahan yang besar dengan turunnya pendapatan pemerintah, perekonomian yang lesu, pengangguran yang meluas, dan inflasi. Kebijakan moneter yang selama ini digunakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi tidak dapat mengatasi depresi ekonomi. Sampai akhirnya John M. Keynes pada tahun 1936 menerbitkan bukunya yang terkenal "*The General Theory of Employment Interest and Money*". Buku Keynes ini merupakan peletak dasar diberlakukannya kebijakan fiskal oleh negara yang pada saat itu digunakan untuk mengatasi depresi ekonomi terutama di Amerika Serikat. Jadi kebijakan fiskal dalam perekonomian Kapitalis baru muncul sejak abad 20<sup>97</sup>.

Pemerintahan Islam tak hanya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti yang dilakukan oleh pemerintahan modern tetapi juga memainkan peran yang efektif, sesuai dengan karakteristik Islam, dalam pembangunan moral dan spiritual masyarakat Muslim<sup>98</sup>.

Menurut Syaikh T.N (2004) dalam perencanaan penggunaan anggaran ada dua komponen utama yang perlu diperhitungkan yaitu: komponen pertama pengeluaran berdasarkan asumsi-asumsi kebutuhan menurut syāri'ah secara hirarki prioritas mulai dari yang paling vital dan urgen dari kebutuhan yang bersifat pelengkap. Untuk menghitung pos-pos pengeluaran digunakan rasio-rasio ideal berdasarkan data wilayah, kependudukan, proyeksi siklus jangka panjang dan menengah serta harga pasar rata-rata saat ini. Sedangkan pengeluaran anggaran ditetapkan berdasarkan enam kaidah: harta yang menjadi kas tersendiri

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*. (Jakarta: SEBI, 2001), hal. 333.

dalam harta kas negara (Baitul Māl), pembelanjaan yang bersifat wajib, pembelanjaan yang sifatnya kompensasi, pembelanjaan karena kondisi darurat, pembelanjaan untuk kemaslahatan, pembelanjaan yang bersifat sekunder<sup>99</sup>. Adapun komponen kedua pos penerimaan disusun berdasarkan pos-pos yang ditetapkan berdasarkan normatif Islam yaitu: harta rampasan perang (fai') dan tanah rampasan perang (*kharāj*), kepemilikan umum, ṣadāqah, karena keadaan sekarang tidak ada lagi peperangan maka penerimaan dari fai' dan *kharāj* serta ganīmah maka pos penerimaan seperti zakāh dan waqāf lebih diprioritaskan.

## 10. Upah



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu<sup>100</sup>.

Menurut David Ricardo dan Adam Smith yang mengemukakan tentang teori upah alami atau sewajarnya, bahwa tinggi rendahnya tingkat upah ditentukan oleh 2 (dua) faktor, yaitu<sup>101</sup>:

- a. Biaya hidup minimum pekerja dengan keluarganya, upah ini disebut upah alamiah atau upah kodrat. Menurutnya, tinggi rendahnya biaya hidup ditentukan oleh tempat, waktu dan adat istiadat penduduk.

<sup>99</sup> <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-26463-3509201003-Chapter1.pdf> diakses pada 14 Januari 2014.

<sup>100</sup> Dalam KBBI offline versi 1.3.

<sup>101</sup> Teori upah menurut David Ricardo, Adam Smith, dan Ferdinand Lasalle dalam <http://matakristal.com/teori-upah-menurut-david-ricardo-adam-smith-dan-ferdinand-lasalle/> diakses pada 19 September 2013.

- b. Permintaan dan penawaran kerja, ini disebut upah pasar. Menurutnya tinggi rendahnya upah pasar akan bergerak di sekitar upah kodrat.

Secara teoritis, dapat dibedakan dua sistem pengupahan yaitu didasarkan pada teori Marxist dan teori neoklasik. Teori Marx didasari atas teori nilai bahwa tiap orang harus bekerja menurut kemampuannya dan tiap orang memperoleh upah menurut kebutuhannya. Dengan kata lain, upah harus disesuaikan dengan kebutuhan seseorang. Sementara teori neoklasik mendasarkan pandangannya pada asas nilai tambah marginal faktor produksi. Dalam hal ini upah merupakan imbalan atas usaha kerja yang diberikan karyawan kepada pengusaha. Dua teori tersebut hanya menjadi landasan pikir bagi sistem pengupahan di suatu negara. Sistem pengupahan tidak semurni dua kerangka pemikiran di atas, karena disesuaikan dengan karakteristik dan kultur masing-masing negara. Di Indonesia kebijakan penetapan upah dilakukan oleh pemerintah<sup>102</sup>.

Upah menurut Edwin (1995) adalah "Harga atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada orang lain. Dimaksudkan para pemberi kerja memberi suatu imbalan kepada penerima kerja atas sumbangan atau jasa yang telah mereka berikan kepada pihak pemberi kerja"<sup>103</sup>.

Menurut Vander Veil (1982) upah diartikan lebih luas yaitu sebagai tujuan objektif kerja ekonomis. Soepomo menyatakan: "Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan"<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno. "Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, No. 3, Vol. 5 (Maret, 2002). hal. 298.

<sup>103</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16824/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 19 September 2013.

<sup>104</sup> *Ibid.*

Sedangkan upah menurut Hadi Purwono (1981) adalah jumlah keseluruhan yang ditetapkan sebagai upah pengganti jasa yang telah dikeluarkan oleh tenaga kerja melalui masa atau syarat-syarat tertentu. Tenaga kerja menerima balas jasa berupa jumlah yang telah ditetapkan terlebih dahulu atas jasa tenaga yang mereka berikan pada tempat mereka bekerja, di samping itu juga diperkirakan mengenai jangka waktu dari tenaga kerja itu melaksanakan pekerjaannya dan ketentuan lain yang perlu.

Hijrahman (1984) menyatakan bahwa "Upah adalah suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, serta peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja"<sup>105</sup>.

Menurut Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 No. 33 pasal 7 ayat a dan b. upah adalah: tiap-tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan. Selain itu upah juga termasuk di dalamnya perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian dengan cuma-cuma yang nilainya ditaksir menurut harga umum di tempat itu.

Adapun fungsi dan tujuan pengupahan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan produktivitas kerja.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

- b. Untuk mengalokasikan sumber daya manusia tersebut secara efisien dan efektif.
- c. Mendorong stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya.

Menurut Cascio, agar bisa berjalan efektif, upah harus mampu; memenuhi kebutuhan dasar, mempertimbangkan adanya keadilan internal dan eksternal, dan pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan individu<sup>106</sup>. Keadilan distributif merupakan keadilan dalam bentuk upah yang diterima, sedangkan keadilan prosedural adalah dalam prosedur yang ditentukan dalam menentukan upah. Dengan kata lain, keadilan distributif berkaitan dengan hasil akhirnya, sedangkan keadilan prosedural berkaitan dengan alat yang digunakan. Sebagai akibatnya, keadilan distributif lebih mempengaruhi kepuasan terhadap apa yang diberikan, sedangkan keadilan prosedural lebih mempengaruhi kepuasan terhadap pimpinan dan komitmen organisasi<sup>107</sup>.

Menurut Don Bellante dan Mark Jackson (1990) terdapat hubungan antara permintaan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja terhadap upah. Suatu kenaikan dalam stok modal suatu bangsa menaikkan permintaan tenaga kerja yang meliputi ekonomi keseluruhan. Untuk suatu penawaran tenaga kerja tertentu, kenaikan permintaan tenaga kerja akan menaikkan keseimbangan tingkat upah. Kemajuan teknologi akan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat upah. Sebaliknya, kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan penawaran

---

<sup>106</sup> Wayne F. Cascio. "Managing Human Resources: Productivity, Quality of Work Life". (Profit: McGraw-Hill, 1995). hal. 330. Dalam Mutiara S. Panggabean, "Manajemen Sumber Daya manusia", Cet. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 78. Sebagaimana dikutip dari Undang Nindin, "Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam". Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006, hal. 44.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hal. 45.

tenaga kerja. Jika kondisi permintaan adalah konstan, maka kenaikan penduduk akan mengakibatkan penurunan upah. Apabila tingkat penambahan stok modal suatu bangsa lebih besar daripada tingkat penambahan penduduknya (angkatan kerjanya), maka jumlah modal setiap karyawan (yang disebut ratio “modal/tenaga kerja”) akan naik. Pada gilirannya, upah dan sebagai akibatnya juga pendapatan akan mengalami kenaikan. Apabila kemajuan teknologi menyertai pertumbuhan ratio modal/tenaga kerja, maka upah bahkan akan terus meningkat<sup>108</sup>.

### 11. Upah Minimum

Adanya realitas yang menunjukkan bahwa masih banyak pekerja di Indonesia berpenghasilan rendah dan minimnya perlindungan terhadap para pekerja agar tidak menjadi korban sikap *opportunistis* pengusaha telah mendorong pemerintah memandang perlu diberlakukannya kebijakan penetapan upah minimum. Jika penetapan upah didasarkan pada mekanisme pasar, maka dapat dipastikan buruh akan memperoleh upah yang sangat rendah, karena melimpahnya tenaga kerja di Indonesia. Dengan demikian, kebijaksanaan penentuan upah minimum dimaksudkan untuk menjamin penghasilan karyawan, meningkatkan produktivitas buruh serta mengembangkan perusahaan dengan cara-cara yang lebih efisien<sup>109</sup>.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam

<sup>108</sup> Don Bellante dan Mark Jackson, *Ekonomi Ketenaga Kerjaan*, alih bahasa Wimandjaja K. Liotohe, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 1983), hal. 145.

<sup>109</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Kebijakan*., hal. 299.

lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Menurut Keputusan Menteri No.1 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap di sini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya: tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi<sup>110</sup>.

Menurut Jaka Sriyana (2001) dalam Suparjan dan Hempri Suyatno pada *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan mengapa peran pemerintah dalam penetapan upah minimum dapat diterima. *Pertama*, jika dilihat dari porsi pembagian hasil produksi kepada faktor produksi, maka nilai yang diterima oleh tenaga kerja relatif rendah. Di Indonesia, angka ini hanya berkisar 15% jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Misalnya, di Philipina telah mencapai 30% dan di Malaysia lebih dari 20%.

<sup>110</sup> <http://eprints.undip.ac.id/29172/1/JURNAL.pdf> diakses pada 27 Desember 2013.

Alasan *kedua* adalah dalam siklus tahunan terjadi perubahan makro ekonomi yang mengarah pada peningkatan harga-harga barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan penurunan upah riil bagi pekerja. Artinya, kebijakan penetapan upah minimum merupakan penyesuaian terhadap nilai *income* riil pekerja. Berdasarkan dua alasan tersebut maka memang sangat diperlukan kebijakan pemerintah untuk memberikan batasan upah yang akan diberikan oleh pengusaha. Dalam rangka itu, Pemerintah menetapkan upah minimum pada tingkat regional yang dikenal dengan UMR. Untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat untuk masing-masing daerah, maka sekarang ini penetapan kebijakan upah minimum didelegasikan ke tingkat propinsi (Upah Minimum Propinsi) dan lingkup yang lebih kecil lagi yaitu Upah Minimum Kabupaten (UMK)<sup>111</sup>.

## 12. Upah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut al-Māliki (2009) dalam *Politik Ekonomi Islam*, upah (*ujrāh*) merupakan setiap harta yang diberikan oleh *mustajir* kepada *ʿājir* sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakannya, baik berupa uang atau barang, karena semua itu adalah *māl* (harta). Kompensasi berupa uang, jika dikaitkan dengan barang, dinamakan harga, sedangkan jika dikaitkan dengan tenaga dinamakan upah. Penentuan harga harus sebanding dengan harta, adapun penentuan manfaat tenaga, sebanding dengan manfaat yang diberikan<sup>112</sup>.

<sup>111</sup> Suparjan dan Hempri Suyatno, *Kebijakan.*, hal. 298.

<sup>112</sup> Abdurrahmān al-Māliki, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa Ibnu Sholah, (Bogor: Al Azhar Press, 2009), hal. 144-145.

Yūsūf al-Qarḍāwī berpandangan, ada dua hal yang diperhatikan dalam penentuan upah, yaitu:

a) Nilai kerja itu sendiri (yang dikerjakan oleh tenaga kerja profesional dengan yang tidak profesional) sebagaimana firman Allah: *"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?"* (QS. az-Zumar (39): 9). Dan firman-Nya yang lain: *"Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan"* (QS. al-An'ām (6): 132).

b) Kebutuhan pekerja, seperti pemenuhan kebutuhan pokok yang meliputi; makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan (transportasi), pengobatan, dan pendidikan anak.<sup>113</sup> Dalam sebuah hadis, Rasūlullāh bersabda:

مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا، فَلْيُكْتَسِبْ زَوْجَةً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ خَادِمٌ فَلْيُكْتَسِبْ خَادِمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنٌ فَلْيُكْتَسِبْ مَسْكَنًا

*"Barang siapa menjadi seorang pekerja pada kami, maka hendaklah ia mencari seorang istri. jika ia tidak punya pembantu maka hendaklah ia mencari pembantu. jika ia tidak punya tempat tinggal maka hendaklah ia mencari tempat tinggal"*<sup>114</sup> (HR. Abū Dāwud).

Lebih lanjut lagi, Hendrie Anto (2003) merumuskan perbedaan upah dari perspektif kapitalis, sosialis dan Islam<sup>115</sup>, sebagai berikut:

<sup>113</sup> Yūsūf Qarḍāwī, *Peran Nilai.*, hal. 406.

<sup>114</sup> Abū Dāwud dari al-Mustaurad bin Syidad (2945), al-Hākim dalam zakāh dan di-*shahih*-kannya menurut syarat Bukhāri (1/46) dan disepakati oleh adz-Zahabi, disebutkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami' ash-Shaghir* (6486) dalam Yūsuf Qarḍawī, *Peran Nilai.*, hal. 407.

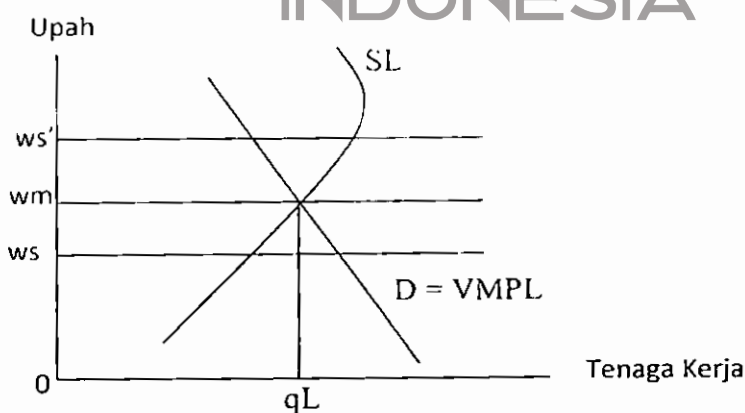
<sup>115</sup> M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Cet. 1, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hal. 225-228.

Tabel 22 Upah dalam Perspektif Kapitalis, Sosialis dan Islam

No	Argumen	Sistem Kapitalis	Sistem Sosialis	Sistem Islam
1	Penentuan tingkat upah	Kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja ( <i>market wage</i> )	Pemerintah	<i>Market wage</i> , kontribusi terhadap produktifitas dan aspek-aspek kemanusiaan.
2	Implikasi	Tenaga kerja manusia bersaing dengan mesin sebagai tenaga kerja substitusi –karena efisiensi produksi dan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dan tenaga murah tapi memiliki produktifitas tinggi. Akibatnya, pekerja 'dipaksa' mendapatkan upah yang rendah.	Penetapan upah bisa saja berada di atas atau di bawah <i>market wage</i> . Kebijakan berdasarkan kepentingan pemerintah (aspek ekonomi, politik dan lainnya)	Terciptanya keadilan dalam upah. <i>Musta'jir</i> memberi upah secara objektif (tingkat <i>market wage</i> ) dan secara subjektif (nilai kemanusiaan, seperti; tolong menolong, kasih sayang agar tercipta harmonisasi dalam masyarakat).

Sumber: M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*.

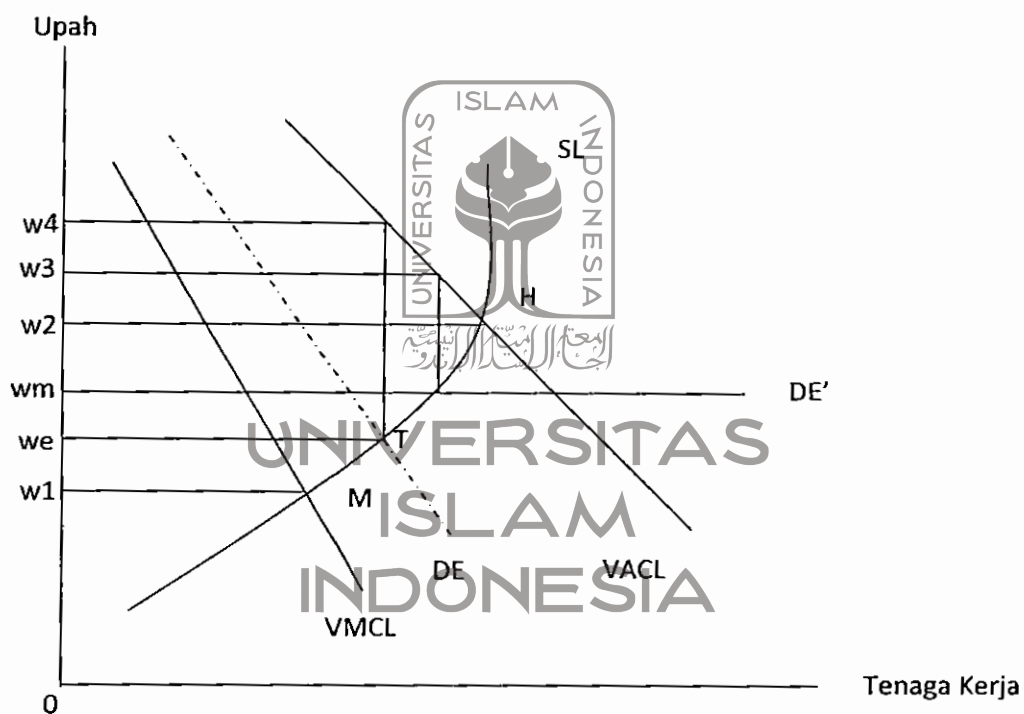
Penjelasan pada perbedaan-perbedaan sistem ekonomi di atas, dapat dilihat dalam gambar berikut<sup>116</sup>.



Gambar 24  
Penentuan Upah dalam Perekonomian Konvensional

<sup>116</sup>*Ibid.*, hal. 227 dan 229.

Dalam kapitalisme upah akan selalu berada pada *market wage*, yaitu  $w_m$ . Perubahan kondisi pasar dengan sendirinya akan merubah tingkat upah. Sedangkan dalam sosialisme tingkat upah ditentukan oleh pemerintah. Upah yang ditentukan pemerintah dapat saja berada di atas ( $w_s'$ ), di bawah ( $w_s$ ), atau pada *market wage* ( $w_m$ ).



Gambar 25  
Penentuan Upah dalam Perekonomian Islam

Dalam gambar di atas kondisi  $w_2$  (perpotongan antara VACL dengan SL) mengindikasikan tingkat upah tertinggi, sedangkan pada  $w_1$  (perpotongan antara VMCL dengan SL) menunjukkan tingkat upah terendah. Adapun kondisi keseimbangan pasar tenaga kerja yang mungkin terjadi berada pada kisaran MH, dengan tingkat upah minimum  $w_1$  dan maksimum  $w_2$ . Jika kondisi DE merupakan kurva permintaan tenaga kerja efektif (pada kisaran  $w_1$  dan  $w_2$ ), maka

perpotongan antara DE dengan SL terjadi pada titik T, sehingga tingkat upahnya adalah  $w_e$ . Dalam posisi ini, *musta'jir* memperoleh keuntungan sebanyak  $w_e - w_4$  dari setiap kontribusi tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat upah maka akan semakin rendah tingkat keuntungan yang diperoleh *musta'jir*, demikian pula sebaliknya.

Gambar di atas berlaku jika para pekerja berada pada posisi tawar yang kuat, namun jika pada kondisi tenaga kerja yang melimpah ditambah lagi dengan fenomena pekerja yang tidak memiliki *skill* yang memadai, maka otomatis para pekerja tersebut berada pada kondisi nilai tawar yang lemah, hal yang demikian ini 'dimanfaatkan' oleh para *employer* memberikan upah dibawah VMCL, hal sebaliknya terjadi pada *employee* yang bekerja lebih banyak (lembur) untuk mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini tentu saja tidak sesuai dengan Islam. Akan tetapi, kondisi tersebut terjadi pada negara-negara berkembang yang mayoritas penduduk muslim.



lebih lama lagi (titik maksimal). Dalam gambar di atas, kurva VMCL memotong kurva penawaran kerja pada tiga titik; a,b, dan c. Ini artinya, *employer* berdasarkan orientasi usaha atau target keuntungan akan memberikan upah pada  $w_3$ ,  $w_2$  atau  $w_1$ . Pada tingkat  $w_1$  inilah terjadi eksploitasi *employee* oleh *employer*, fenomena inilah yang terjadi pada negara berkembang, yang penduduknya mayoritas Islam, sehingga ketimpangan dalam distribusi pendapatan terjadi. Dalam Islam, karena mempertimbangkan nilai *ta'āwun*, kasih sayang dan kepedulian sosial, *employer* akan memberikan upah kepada *employee* pada kisaran  $w_3$  dan  $w_4$ , bukan pada  $w_1$  dan  $w_2$ <sup>117</sup>

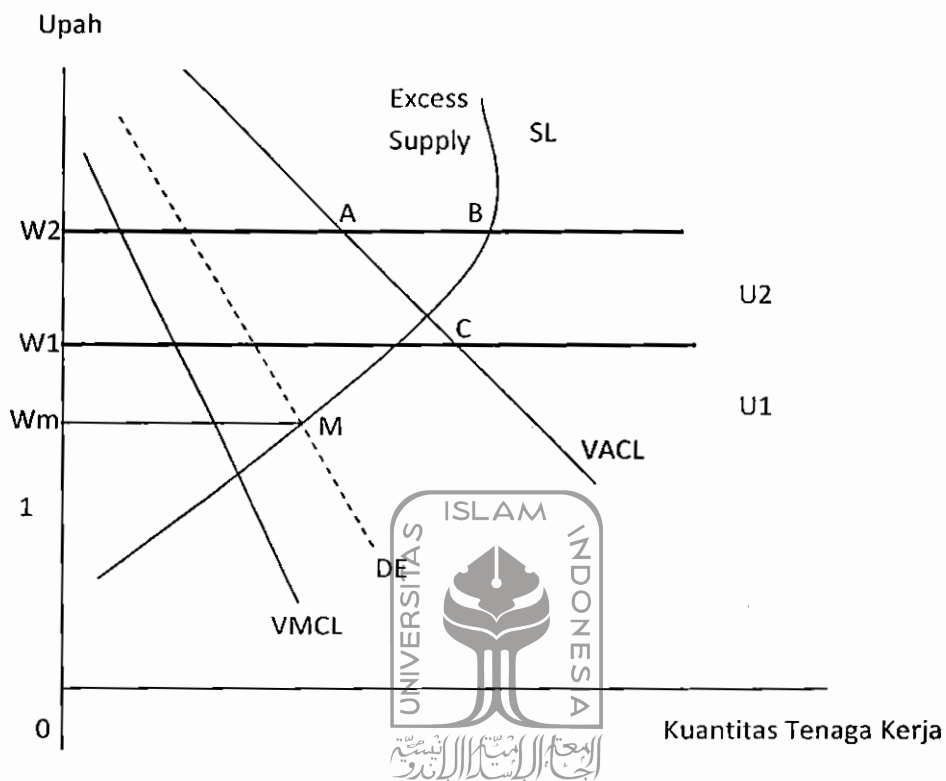
### 13. Kebijakan Upah Minimum dalam Ekonomi Islam

Prinsip dasar teori pengupahan dalam ekonomi Islam merupakan penghargaan terhadap mekanisme pasar yang berjalan dengan normal. Namun, pada kondisi yang sebaliknya yaitu terjadi distorsi dalam pasar, maka diperlukan peran pemerintah berupa intervensi agar upah yang diterima pekerja dapat memenuhi kebutuhan karena kebijakan penetapan upah ini bersifat temporer, yang intinya pertimbangan kemanusiaan yang mesti dijaga oleh pemerintah.

Dalam gambar berikut menjelaskan peran pemerintah dalam memberikan kebijakan terhadap upah, yaitu<sup>118</sup>:

<sup>117</sup>*Ibid.*, hal. 231.

<sup>118</sup>*Ibid.*, hal. 233.



Gambar 27

## Kebijakan Upah Minimum dalam Perekonomian Islam

Penjelasan kurva: titik keseimbangan pasar ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva permintaan efektif tenaga kerja (DE) dengan kurva penawarannya (SL) yaitu pada titik C, yang menunjukkan tingkat upah pasar pada  $W_m$ . Jika tingkat upah ini menurut pemerintah belum mencapai kesejahteraan bagi buruh maka pemerintah akan mengeluarkan kebijakan upah minimum yang tidak akan menyebabkan distorsi pasar karena berada di bawah VACL dari *employer*, karena kisaran upah *employer* yang Islami berada di antara VMCL dengan VACL. Prinsip inilah yang harus dilaksanakan, karena kenaikan upah oleh pemerintah masih berada dalam batas-batas toleransi pertimbangan ekonomi dan kemanusiaannya, dalam gambar ditunjukkan oleh garis  $W_1U_1$ . Hal sebaliknya, jika penetapan upah minimum ditetapkan di atas VACL, misalnya  $W_2U_2$  akan

terjadi *excess supply*. Hal tersebut karena penawaran tenaga kerja tidak seimbang dengan permintaannya. Permintaan efektif tenaga kerja sebanyak A sedangkan penawarannya adalah B, sehingga terdapat *excess supply* sebesar segitiga ABC, hal ini akan mengakibatkan pasar gelap/tidak resmi tenaga kerja karena peningkatan upah minimum di atas VACL yang tidak diterima oleh *employer*.

Dalam kondisi tersebut, Islam telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak para *employer* dan *employee* nya. Tingkat upah terendah, di mana upah tidak boleh turun lebih rendah lagi, akan melindungi hak-hak para pekerja; sedangkan batas tertinggi upah akan menjamin kepentingan para majikan<sup>119</sup>.

#### 14. Tingkat Upah yang Adil

Berdasarkan prinsip keadilan (keadilan bermakna proporsional,<sup>120</sup> jelas dan transparan),<sup>121</sup> dalam masyarakat muslim upah akan ditentukan melalui negosiasi di antara *employer*, *employee* dan *government*. Fungsi dari pemerintah adalah memastikan bahwa upah yang ditetapkan tidak terlalu rendah sehingga merugikan para pekerja, dan tidak pula terlalu tinggi yang dapat merugikan para majikan. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah ini bersifat temporer, artinya tingkat upah tersebut harus ditinjau kembali sewaktu-waktu untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan perubahan-perubahan dalam tingkat harga serta biaya hidup.

<sup>119</sup> Afzalurrahmān, *Muhammad.*, hal. 301.

<sup>120</sup> Makna proporsional mencakup aspek sesuai dengan produktifitas dan kondisi perusahaan. Dikutip dari Undang Nindin, *Upah.*, hal. 75.

<sup>121</sup> Tujuannya agar terhindar dari perselisihan. *Ibid.*, hal. 77.

Ada dua hal yang dianjurkan Islam untuk mempertahankan upah pada kondisi standar yang wajar. *Pertama*, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja, dan *kedua* memberikan kesempatan yang sepenuhnya untuk bekerja dan kebebasan dalam menentukan pekerjaannya –*halālan at-tayyibah*. Sebagai hasilnya, kekuatan tenaga kerja didistribusikan ke seluruh bidang pekerjaan ke seluruh negeri dengan proporsi yang dikehendaki, hal tersebut akan sangat membantu dalam menjaga stabilitas upah di seluruh negeri<sup>122</sup>.



### 15. Rasio Penduduk Muslim

Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan (*mathematical relationship*) antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain<sup>123</sup>. Rasio penduduk muslim adalah perbandingan antara jumlah penduduk muslim dan jumlah penduduk di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu. Dapat ditentukan dengan rumus:

$$MR = \frac{PM}{JP} \times 100$$

Keterangan:

MR = Muslim Ratio (Rasio Penduduk Muslim)

PM = Jumlah Penduduk Muslim

JP = Jumlah Penduduk

<sup>122</sup> Afzalurrahman, *Muhammad*, hal. 306.

<sup>123</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Rasio\\_finansial](http://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_finansial) diakses pada 9 Januari 2014.

Untuk memahami rasio penduduk muslim, hal yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai teori tentang kependudukan. Wiratno (1992) berpendapat penduduk merupakan gabungan dari berbagai unsur Sumber Daya Manusia (SDM) yang berfungsi sebagai modal pembangunan suatu negara, disamping modal Sumber Daya Alam (SDA) dan modal aktif. Hal ini karena SDM merupakan faktor produksi aktif dan faktor penentu karakteristik dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara, sedangkan SDA dan modal fisik bersifat pasif. Jadi, keberhasilan pembangunan suatu negara, sangatlah tergantung dari keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pendidikan rakyatnya<sup>124</sup>, sedangkan semua ini juga berbanding lurus terhadap meratanya penyebaran distribusi pendapatan pada negara tersebut.

Menurut Suparmoko (2002) Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara, karena SDM dapat mengembangkan sumber-sumber produksi yang ada, sehingga mampu melakukan kegiatan ekspor dan menekan kebutuhan impor sehingga mengurangi penggunaan devisa dan cadangan devisa negara akan menjadi semakin kuat<sup>125</sup>.

Jumlah penduduk dunia pada akhir 1995 pada angka 5,8 miliar jiwa. Menurut PBB, jumlah penduduk bumi lebih dari 6,3 miliar pada akhir abad kedua puluh dan 8,5 miliar pada tahun 2025, dan hampir 10 miliar pada tahun 2050.

---

<sup>124</sup> Masykur Wiratno, *Ekonomi Pembangunan: Ikhtisar, Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Media Widya Mandala, 1992), hal. 177-178.

<sup>125</sup> Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 106.

Lebih dari lima perenam dari jumlah penduduk tersebut menghuni negara-negara berkembang<sup>126</sup>.

## 16. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk pada Pembangunan Ekonomi

Todaro (1998) berargumen bahwa pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Hasil positif dari pertumbuhan penduduk tersebut sepenuhnya tergantung pada sistem perekonomian yang bersangkutan untuk menyerap dan secara produktif memanfaatkan tambahan tenaga kerja tersebut, kemampuan tersebut dipengaruhi oleh tingkat dan jenis akumulasi modal dan tersedianya input atau faktor-faktor penunjang, seperti kecakapan manajerial, administrasi<sup>127</sup> dan kemajuan teknologi yang dapat digunakan secara maksimal.

M.L. Jhingan (1988) dalam bukunya *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* mengutip Adam Smith dari bukunya *Wealth of Nations*: “Buruh tahunan setiap bangsa merupakan kekayaan yang pada mulanya memasok bangsa dengan segala kenyamanan hidup yang diperlukan”. Artinya, Smith tidak menganggap pertumbuhan penduduk merupakan aset dalam pertumbuhan bukan menjadi penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. Hanya Malthus dan

<sup>126</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan*, hal. 224.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal. 125.

Ricardo yang mencanangkan tanda bahaya dari pertumbuhan penduduk ini. Akan tetapi, kekhawatiran ini menjadi sirna ketika pertumbuhan penduduk di Eropa Barat dapat mengantarkan Eropa ke industrialisasi dengan proses lebih cepat. Setelah itu, pertumbuhan penduduk pada negara maju memberikan dampak positif pada pembangunan karena dapat meningkatkan produktifitas dan GNP (produk nasional bruto)<sup>128</sup>.

Pertumbuhan penduduk memberikan dampak negatif pada negara terbelakang karena berbagai faktor, di antaranya; kemiskinan, modal yang kurang sedangkan buruh melimpah yang mayoritas tidak memiliki keahlian dapat menghambat pembangunan ekonomi. Karena potensi penduduk tersebut tidak dimaksimalkan yang mengakibatkan angka pengangguran meningkat, anggaran pemerintah terkonsentrasi untuk penyediaan pangan, barang-barang konsumen, peralatan modal, perlu diimpor untuk memenuhi permintaan penduduk yang semakin membengkak, sehingga fasilitas pendidikan, dan sosial secara memadai semakin sulit terpenuhi<sup>129</sup>.

Penduduk yang meningkat secara cepat akan memperlambat seluruh usaha pembangunan di negara berkembang dan terbelakang kecuali kalau dibarengi dengan laju pembentukan modal dan kemajuan teknologi yang tinggi. Tetapi faktor yang menetralkan ini tidak ada dan akibatnya ledakan penduduk mengakibatkan produktivitas pertanian merosot, pendapatan perkapita rendah, standar hidup rendah, pengangguran dan tingkat pembentukan modal rendah<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup>M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, alih bahasa D. Guritno, Ed. I, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali, 1988), hal. 510.

<sup>129</sup>*Ibid.*, hal. 511.

<sup>130</sup>*Ibid.*, hal. 516.

Hananto Sigit (1987) mengatakan bahwa efek negatif faktor kependudukan pada pembangunan ekonomi telah cukup disadari di Indonesia<sup>131</sup>. Jumlah penduduk, tingkat pertumbuhan, serta struktur umur dan jenis kelamin sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi dan menentukan jumlah angkatan kerja. Permasalahannya terletak pada produktivitas tenaga kerja lemah, karena pendidikan rendah, tingkat kesehatan belum memuaskan, etos kerja lemah sehingga kurang ada motivasi untuk menimbulkan kegairahan kerja. Dengan demikian *output* akan rendah dan selanjutnya dengan rendahnya produk nasional akan makin berat usaha pengadaan kesempatan kerja bagi jumlah angkatan kerja yang lebih besar<sup>132</sup>.

Selain permasalahan produksi dan penciptaan lapangan kerja di atas, Sigit juga mengatakan bahwa dampak negatif dari peningkatan jumlah penduduk akan mengharuskan porsi yang cukup besar dari tabungan nasional untuk dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti untuk biaya pendidikan dan kesehatan.

Masalah kependudukan lain yang dihadapi adalah yang berhubungan dengan distribusi geografis, yang lebih terpusat di daerah perkotaan sedangkan di daerah pedesaan kurang diperhatikan. Akibatnya, akan terjadi urbanisasi dari penduduk desa ke kota.

Dua perspektif tentang dampak pertumbuhan penduduk terhadap distribusi pendapatan, seperti dalam tabel berikut:

---

<sup>131</sup> Hananto Sigit, "Faktor Kependudukan dan Angkatan Kerja dalam Ekonomi Indonesia: Suatu Telaah Metode Analisis", dalam Hendra Esmara (ed.) *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan; Kumpulan Esei untuk Menghormati Sunitro Djojohadikusumo*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia, 1987).

<sup>132</sup> M.L. Jhingan, *Ekonomi.*, hal. 573.

Tabel 23 Argumentasi Terhadap Pertumbuhan Penduduk di Dunia Ketiga

Pertumbuhan Penduduk Bukan Masalah yang Sebenarnya	Pertumbuhan Penduduk Adalah Masalah yang Sebenarnya
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada masalah lain di balik pertumbuhan penduduk;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbelakangan (<i>underdevelopment</i>).</li> <li>b. Penyusutan SDA dan kerusakan lingkungan.</li> <li>c. Penyebaran penduduk (dengan transmigrasi, yang akan mengatasi urbanisasi).</li> <li>d. Rendahnya posisi dan status kaum wanita (harus diusahakan pemberdayaan kaum wanita <i>empowerment of women</i>).</li> </ol> </li> <li>2. Pelemparan persoalan palsu secara sengaja. Yaitu upaya negara kaya (yang dominan berkulit putih) untuk mengurangi kemiskinan (yang mayoritas tidak berkulit putih) karena takut dominasi mereka terancam.</li> <li>3. Pertumbuhan penduduk itu perlu untuk mengolah SDA potensial.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Argumentasi garis keras: populasi dan krisis global;               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terjadinya “ledakan penduduk” sehingga harus ada upaya stabilisasi penduduk atau penurunan jumlah penduduk (seperti program sterilisasi dan peraturan formal dalam membatasi jumlah anak).</li> </ol> </li> <li>2. Argumentasi teoritis: siklus populasi-kemiskinan dan pentingnya program Keluarga Berencana.</li> </ol> <p>Argumentasi empiris: 7 konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang pesat;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi.</li> <li>b. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.</li> <li>c. Pendidikan tidak akan maksimal.</li> <li>d. Kesehatan (karena tingkat kelahiran tinggi, jarak kelahiran yang dekat sehingga menurunkan berat badan bayi, dan meningkatkan tingkat kematian bayi dan anak-anak).</li> <li>e. Penyediaan bahan pangan yang semakin meningkat.</li> <li>f. Kerusakan dan pengrusakan lingkungan hidup.</li> <li>g. Akan terjadi migrasi internasional yang akan memberatkan negara maju.</li> </ol>

Sumber: Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Duni Ketiga*, hal. 252-260

Pada intinya, permasalahan pertumbuhan penduduk ini terjadi pada negara-negara berkembang dan miskin yang digolongkan ke dalam negara dunia ketiga, hal ini terjadi karena kekhawatiran negara-negara maju terhadap peningkatan jumlah penduduk pada negara di dunia ketiga tersebut. Seperti pada

migrasi internasional yang otomatis negara maju menjadi tujuan, hal tersebut tentu saja harus dipikul oleh negara penerima. Masalah ini punya muatan politik, terutama di Amerika Utara dan Eropa.

Untuk konteks Indonesia yang termasuk ke dalam Negara Sedang Berkembang (NSB), populasi penduduk terjadi dengan pesat. Sehingga pemerintah dihadapkan pada persoalan yang berkaitan dengan masalah kependudukan, seperti penyebaran penduduk yang harus berbanding lurus dengan kualitas kehidupan penduduk.

Arsyad (2004) menyatakan bahwa masalah kependudukan di Indonesia yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan di Indonesia adalah pola penyebaran penduduk dan mobilitas tenaga kerja yang kurang seimbang, baik dilihat dari sisi antar pulau, antar daerah, maupun antara daerah perdesaan dan daerah perkotaan, serta antar sektor<sup>133</sup>.

## 17. Kependudukan Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Allah telah menundukkan langit dan bumi kepada manusia (QS.al-Jāsiyah (45): 12-13). Permasalahan kependudukan, Afzalurrahmān (1997) di dalam bukunya *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* menyatakan kekhawatiran tentang pertumbuhan penduduk oleh para ekonom konvensional yang didukung oleh berbagai lembaga Internasional seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan badan-badan PBB lain karena ketidakmampuan untuk menyediakan pangan.

---

<sup>133</sup> Lincolin Arsyad, *Ekonomi.*, hal. 270.

Sumber Daya Alam (yang mencakup bumi, laut dan udara) yang *disediakan* Allah jika dapat diolah manusia dengan maksimal akan dapat memecahkan masalah kependudukan dalam hal pangan ini<sup>134</sup>.

Alasan kedua, menurut Afzalurrahmān, pengurangan pertumbuhan penduduk karena takut kelaparan, dilarang keras oleh al-Qur'an dalam ayat:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ... ﴿١٥١﴾

*"Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka"* (QS. al-An'ām (6): 151).

Tegasnya ayat al-Qur'an ini melarang membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa segala bentuk pengendalian kelahiran, keluarga berencana, abortus, dan bahkan penundaan perkawinan yang dilakukan untuk menanggulangi pertumbuhan jumlah penduduk guna menjaga suatu taraf hidup yang tinggi adalah amoral dan oleh karenanya berdosa<sup>135</sup>. Karena al-Qur'an memberikan harapan tentang kemakmuran dan kebahagiaan dengan mengatakan bahwa sarana-sarana di dunia ini tidak terbatas, asalkan manusia bekerja keras untuk mendapatkannya.

Pentingnya kedudukan penduduk dalam perekonomian dan dalam bidang distribusi pendapatan ini serta ditambah lagi, mayoritas penduduk negara Indonesia beragama Islam, maka variabel penduduk muslim (yang dihitung melalui rasio penduduk muslim) menempati posisi yang strategis.

<sup>134</sup> Afzalurrahman, *Muhammad.*, hal. 247.

<sup>135</sup> *Ibid.*

Dengan penduduk mayoritas muslim hal ini menunjukkan bahwa potensi zakāh dan waqāf sangatlah besar. Dua hal tersebut jika mendapat perhatian dan pengelolaan intensif, akan menjadi solusi dari ketimpangan ekonomi yang dihadapi oleh penduduk Indonesia yang secara *de facto* beragama Islam.

Populasi penduduk muslim yang mayoritas ini, menurut Hasan (2007) kontrol populasi harus tidak terlepas dari norma-norma syāri‘ah yang terkandung dalam Maqāṣid asy-syāri‘ah<sup>136</sup>. Pengontrolan tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai ulul ‘amri melalui berbagai kebijakan dan undang-undang.

### C. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang sebagaimana telah diuraikan maka diperlukan hipotesis yang bertujuan untuk memberikan arah dalam penelitian ini. Adapun hipotesis yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

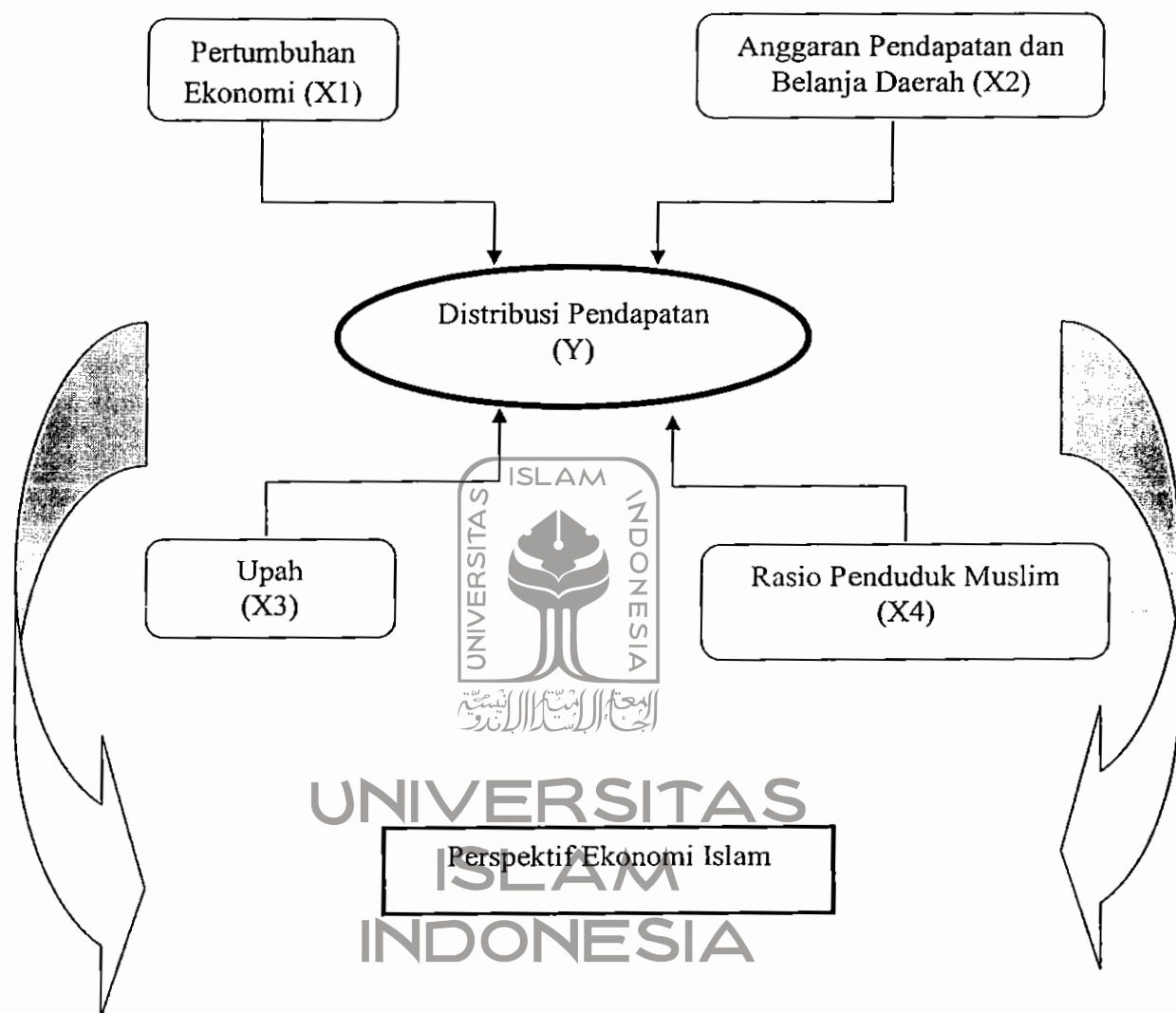
- a. Diduga bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
- b. Diduga pula APBD berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
- c. Diduga bahwa upah berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.
- d. Diduga bahwa rasio penduduk muslim berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

---

<sup>136</sup> Zubair Hasan, "Economic Development in Islamic Perspective: Concept, Objectives, and Some Issues". *MPRA Paper*, No. 3011 (2007), dalam <http://jurnalekis.blogspot.com/2011/09/ekonomi-pembangunan-perspektif-ekonomi.html> diakses pada 13 Januari 2014.

Hipotesis di atas berdasarkan kepada kerangka pemikiran yang menjelaskan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Dalam hal ini, kerangka pemikiran menghubungkan variabel bebas dan variabel terikat secara teoritis. Berdasarkan pada latar belakang, tinjauan pustaka serta landasan teoritis, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran antara hubungan pertumbuhan ekonomi (X1), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (X2), upah (X3), dan rasio penduduk muslim (X4) terhadap pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia pada tahun 2008-2012 yang dibingkai dalam kerangka perspektif ekonomi Islam. Pemilihan periode tahun 2008-2012 pada penelitian ini karena pada periode tersebut Indonesia mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tingkat kesenjangan pada periode tersebut juga meningkat. Sehingga hal tersebut memberikan pengaruh terhadap distribusi pendapatan di Indonesia.

Kemudian dapat diasumsikan jika keempat variabel bebas tersebut memberikan dampak signifikan serta didukung oleh prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, maka pemerataan distribusi pendapatan akan dapat terjadi. Keempat variabel tersebut secara sederhana dapat ditampilkan dalam kerangka pemikiran yang tertuang dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:



Gambar 28  
Kerangka Pemikiran Teoritis

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu<sup>137</sup>. Agar suatu penelitian lebih terarah dan sistematis, tentunya diperlukan suatu metode yang jelas. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif. Penelitian jenis ini dilakukan pada taraf atau kadar kajian dan analisis semata-mata ingin mengungkapkan suatu gejala/pertanda dan keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil semata-mata menggambarkan (membeberkan) suatu gejala/peristiwa seperti apa adanya yang nyata-nyata terjadi<sup>138</sup>.

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Secara teori, Penelitian kuantitatif menyisihkan dan menentukan ubahan-ubahan dan kategori-kategori variabel. Semua variabel terikat dalam bingkai hipotesis. Variabel tersebut merupakan sarana atau alat untuk menganalisis. Dalam hal pengamatan, dilakukan melalui lensa yang sempit pada serangkaian variabel yang telah didesain

---

<sup>137</sup>Sugiono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 2.

<sup>138</sup>Supardi, Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis, (Yogyakarta: UII-Press, 2005), hal. 27.

sebelumnya<sup>139</sup>. Sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu<sup>140</sup>. Dengan penelitian metode deskriptif, memungkinkan peneliti untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang memiliki validitas universal<sup>141</sup>.

Dengan demikian, di dalam penelitian deskriptif-kuantitatif (non-kausal) tidak mengacu pada hubungan satu variabel dan lain variabel. "*internal validity*" dalam hal ini hanya menunjuk pada validitas "instrumen" untuk mengumpulkan data. Jika instrumen telah valid (dan reliabel), maka data diharapkan juga valid dan reliabel. Jika proses analisis dan penyimpulan juga valid maka penelitian deskriptif ini telah dianggap valid<sup>142</sup>. Penelitian deskriptif kuantitatif berupa angka dapat digambarkan dalam bentuk statistik deskriptif<sup>143</sup>.

Untuk memfokuskan analisis dalam penelitian maka diperlukan pendekatan yang tepat. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Sedangkan metode dipahami lebih sempit dari pendekatan. Metode memiliki arti: cara atau jalan yang dipilih

---

<sup>139</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Ed: II, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal. 21.

<sup>140</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 75.

<sup>141</sup> <http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-definisi-penelitian.html> diakses pada 3 Februari 2014.

<sup>142</sup> <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/mapu5103/dokwebWilman/2.%20Penelitian%20Kuantitatif/2.hakikat%20PENELITIAN%20KUANTITATIF.doc>. diakses pada 3 Februari 2014.

<sup>143</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 130.

dalam upaya memahami sesuatu. Dalam hal ini, memahami ajaran agama yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis<sup>144</sup>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Menurut Hadidjah (2008), pendekatan normatif dapat diartikan studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal atau dari segi normatifnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks al-Qur'an dan hadis. Pendekatan normatif dapat juga dikatakan pendekatan yang bersifat domain keimanan tanpa melakukan kritik kesejarahan atas nalar lokal dan nalar zaman yang berkembang, serta tidak memperhatikan konteks kesejarahan al-Qur'an<sup>145</sup>.

Yuridis adalah hukum, jadi yang dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah pemahaman agama Islam secara hukum menurut Islam. Dalam penelitian ini, hukum-hukum yang menjadi objek adalah hukum yang berkaitan dengan ekonomi dan tertulis dalam Undang-undang. Seperti Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Jadi, pendekatan normatif yuridis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi konsep-konsep normatif yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta Undang-undang ke dalam konsep operasional yang tergambar dalam distribusi pendapatan di Indonesia.

---

<sup>144</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Berbagai Pendekatan dan Metode dalam Studi Islam*, hal. 62. dalam <http://dualmode.kemenag.go.id/file/dokumen/MSI3.pdf> diakses pada 25 Februari 2014.

<sup>145</sup> Ibid. hal. 64.

## **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian adalah pada Badan Pusat Statistik di Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta Pusat dan Kementerian Agama Republik Indonesia di Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat.

## **C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

### **1. Variabel Penelitian**



Penelitian ini menggunakan lima variabel, yaitu empat variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tingkat upah, dan rasio penduduk yang beragama Islam. Satu variabel dependen dalam penelitian ini adalah distribusi pendapatan.

### **2. Defenisi Operasional Variabel**

Definisi operasional masing-masing variabel pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi dan yang ditampilkan dengan data laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan 2000 menurut provinsi tahun 2008-2012 satuan ukuran dengan persen.

- b. APBD yang merupakan realisasi anggaran dan pengeluaran pemerintah provinsi tahun 2008-2012 yang di ukur dalam rupiah.
- c. Upah adalah upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah di masing-masing wilayah di Indonesia untuk tenaga kerja, serta kebutuhan hidup layak dari tahun 2008-2012 yang di ukur dalam rupiah.
- d. Rasio penduduk yang beragama Islam tahun 2008-2012 dalam persen.
- e. Distribusi pendapatan, merupakan pengeluaran atau saluran pendapatan yang diterima oleh negara kepada penduduknya. Menggunakan indikator rasio gini dalam persen.



#### D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Menurut Kuncoro, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data yaitu data yang bersumber pada instansi pemerintah yang telah dipublikasikan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) lembaga pemerintah yang diakui dan mempunyai legalitas dalam menerbitkan data statistik di Indonesia, publikasi oleh Kementerian Agama dan berbagai website serta berbagai instansi dan literatur-literatur lain yang terkait dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan yaitu:

1. Data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi tahun 2008-2012.
2. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (provinsi) tahun 2008-2012.
3. Data tingkat upah provinsi tahun 2008-2012.
4. Data rasio penduduk Indonesia (provinsi) yang beragama Islam tahun 2008-2012.
5. Angka Gini Rasio di Indonesia (provinsi) tahun 2008-2012.

Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah data panel yaitu gabungan dari data kerat lintang (*cross-section*) 33 provinsi dan deret waktu (*time-series*) tahun 2008-2012, dengan wilayah penelitian yang mencakup Negara Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini secara umum diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jakarta dan Kementerian Agama Republik Indonesia.

#### **Data Panel**

Dalam penelitian ini digunakan regresi data panel. Data panel adalah data yang memiliki jumlah *cross-section* dan jumlah *time series*. Data dikumpulkan dalam suatu rentang waktu terhadap banyak individu. Ada dua macam panel data yaitu data panel *balance* dan data panel *unbalance*. Data panel *balance* adalah keadaan di mana unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama. Sedangkan data panel *unbalance* adalah keadaan di mana unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang tidak sama.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat dan realistis. Dalam penelitian ini data diperoleh dengan cara dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian dari berbagai sumber antara lain data publikasi oleh BPS dan Kementerian Agama RI, buku-buku, koran dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian ini.



## F. Uji Asumsi

### 1. Uji t (Pengujian variabel secara individu)

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Hipotesis uji t sebagai berikut:

1. Jika hipotesis signifikan positif
  - a.  $H_0 : \beta_i \leq 0$
  - b.  $H_1 : \beta_i > 0$
2. Jika hipotesis signifikan negatif
  - a.  $H_0 : \beta_i \geq 0$
  - b.  $H_1 : \beta_i < 0$
3. Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yaitu sebesar 5%.
4. Kriteria pengujian:

- a. Jika nilai prob. t-statistic  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
- b. Jika nilai prob. t-statistic  $\leq 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

## 2. Uji F (Uji Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh)

Uji F digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidak signifikannya antara variabel independen terhadap variabel dependen secara menyeluruh (bersama-sama). Uji F ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1.  $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  
 $H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.
2. Menentukan besarnya nilai F hitung dan Signifikansi F (Sig-F)
3. Menentukan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) yaitu sebesar 5%
4. Kriteria pengujian :
  - a. Jika nilai sig -F  $> 0.05$ , maka  $H_0$  diterima, artinya variabel bebas secara serentak tidak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.
  - b. Jika nilai sig -F  $\leq 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak, artinya variabel bebas secara serentak mempengaruhi variabel terikat secara signifikan.

## G. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data panel. Analisis data panel merupakan kombinasi dari deret waktu (*time-series data*) dan kerat lintang (*cross-section*). Menurut Baltagi, keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah :

- a. Data panel membuat data lebih informatif, lebih bervariasi dan mengurangi kolinearitas antar variabel sehingga lebih efisien.
- b. Studi data panel lebih memuaskan untuk menentukan perubahan dinamis dibandingkan dengan studi berulang dari *cross-section*.
- c. Data panel membantu studi untuk menganalisis perilaku yang lebih kompleks.
- d. Data panel lebih mendeteksi dan mengukur efek yang secara sederhana tidak dapat diukur oleh data *time-series* dan data *cross-section*.
- e. Estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam setiap individu.

### 1. Estimasi Model Regresi

Persamaan model regresi dalam bentuk linier data panel dapat dirumuskan dalam model berikut:

$$DP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PE_{it} + \beta_2 APBD_{it} + \beta_3 Upah_{it} + \beta_4 Muslim_{it} + \varepsilon_{it}$$

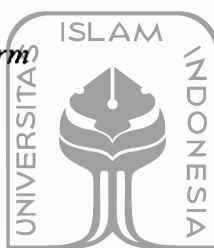
Keterangan :

DP = Distribusi Pendapatan

i = Provinsi di Indonesia (33 provinsi)

$t$	=	Waktu (2008 hingga 2012)
$\beta_0$	=	Konstanta
$\beta_1$ - $\beta_4$	=	Koefisien variabel independent
PE	=	Pertumbuhan Ekonomi
APBD	=	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Upah	=	Upah Minimum Regional
Muslim	=	Rasio Penduduk Muslim
$\varepsilon$	=	<i>Error Term</i>

## 2. Analisis Data Panel



Dalam analisis model panel data dikenal, tiga macam pendekatan yang terdiri dari pendekatan *common effect*, pendekatan *fixed effect* dan pendekatan *random effect*. Ketiga pendekatan yang dilakukan dalam analisis panel data dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Pendekatan *Pooled Least Square* (PLS) atau *common effect*

Estimasi pada *common effect* merupakan teknik regresi sederhana untuk mengestimasi data panel. Pada dasarnya estimasi pada *common effect* hanya mengkombinasikan data *time-series* dengan data *cross section* tanpa melihat perbedaan pada waktu dan individu, sehingga dapat juga digunakan metode OLS dalam mengestimasi model data panel. Asumsinya perilaku data dianggap sama tanpa memperhatikan kurun waktu. Model persamaan regresinya, yaitu: ada tiga macam pendekatan dari model data panel, yaitu pendekatan gabungan kuadrat terkecil, pendekatan efek tetap, pendekatan efek acak.

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

b. Pendekatan Slope Konstan tetapi Intersep Berbeda Antar Individu  
(*Fixed Effect*)

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time-series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*). Model *Fixed Effect* dengan variabel *dummy* dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 D_{1it} + \beta_5 D_{2it} + \beta_6 D_{3it} + \varepsilon_{it}$$

c. Pendekatan efek acak (*random effect*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) akan dapat mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya akan mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model komponen error (*error component model*) atau disebut juga model efek acak (*random effect*). Pendekatan estimasi *Random Effect* ini menggunakan variabel gangguan (*error terms*). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar daerah.

Penulisan konstanta dalam model *Random Effects* tidak lagi tetap tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dalam model sebagai berikut:

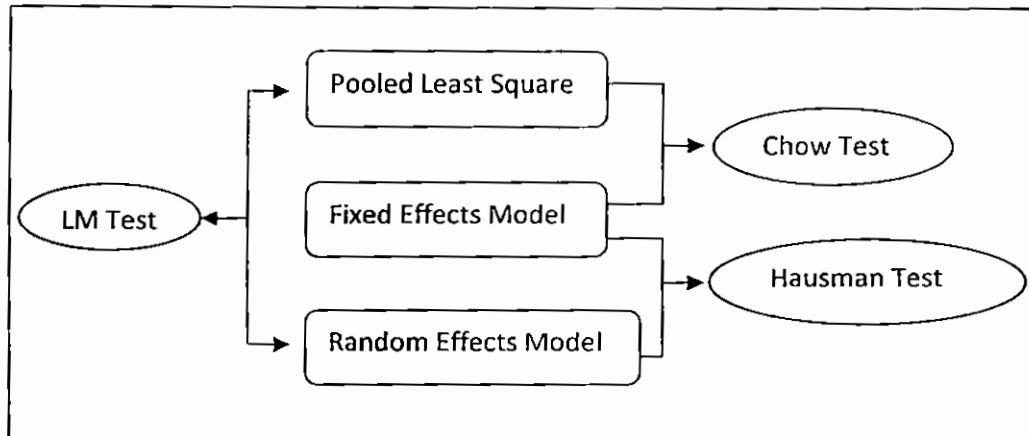
$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

### 3. Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data

Dalam mengestimasi regresi data panel terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan yaitu Metode Model *Common Effect*, model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*.

Pemilihan model yang akan digunakan dalam sebuah penelitian sangat perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien. Dan beberapa metode yang paling baik untuk digunakan adalah:

- a) *Chow Test* (uji F-statistik) adalah pengujian untuk memilih model *Common Effect* (tanpa variabel *dummy*) atau dengan model *Fixed Effect*.
- b) Uji *Langrange Multiplier (LM)* atau lengkapnya *The Breusch-Pagan LM Test*. Digunakan untuk memilih model *Common Effect* (tanpa variabel *dummy*) atau dengan model *Random Effect*.
- c) Dan yang terakhir dengan menggunakan uji Hausman untuk membandingkan antara model *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang lebih baik untuk digunakan.



Gambar 31 Pengujian Pemilihan Model dalam Pengolahan Data Panel

Sumber: Baltagi<sup>146</sup>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

<sup>146</sup>Baltagi, Badi H. "Econometric Analysis of Panel", Third edition, (England: John Wiley & Sons Ltd, 2005). Dalam [http://faculty.ksu.edu.sa/mahmoud/Doc Lib7/Baltagi%20%20 Econometric%20Analysis%20of%20Panel%20Data.pdf](http://faculty.ksu.edu.sa/mahmoud/Doc%20Lib7/Baltagi%20%20Econometric%20Analysis%20of%20Panel%20Data.pdf) diakses pada 29 Januari 2014.

## BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

### A. Hasil Penelitian

#### 1. Diskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data panel yaitu data runtut waktu atau *time series* dan data *cross section*. Variabel yang digunakan yaitu variabel independen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi (PE), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), upah, dan rasio penduduk muslim (Muslim). Variabel dependennya sendiri ialah distribusi pendapatan (DP) di Indonesia.

Alat bantu yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini berupa alat bantu *Econometric E-Views 5.1 (eviews)*. Penelitian ini menggunakan analisis secara ekonometrik.

#### 2. Diskripsi Objek Data Penelitian

##### a) Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa

pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu sepenuhnya tidak hanya tergantung pada hasil produksi, tapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara berlebihan di setiap negara, tapi jika distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan, akan mengakibatkan negara tersebut belum dikatakan berhasil.

Di antara indikator untuk menghitung distribusi pendapatan, dapat digunakan *Gini Ratio*. Rasio Gini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (tidakmerataan sempurna). Adapun rasio gini provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2012 berdasarkan analisis statistik deskriptif antara lain:

Tabel 41 Rasio Gini Menurut Provinsi, 2008-2012 (Persen)

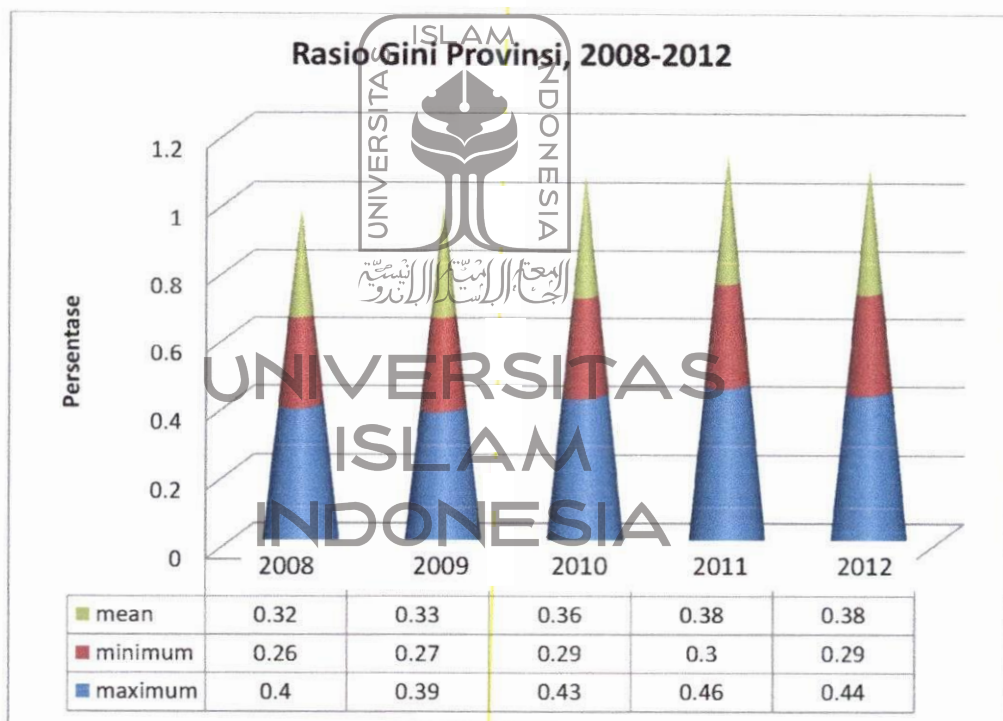
No	Tahun	Maximum	Minimum	Mean
1	2008	0,40	0,26	0,32
2	2009	0,39	0,27	0,33
3	2010	0,43	0,29	0,36
4	2011	0,46	0,30	0,38
5	2012	0,44	0,29	0,38

Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

Tabel 41 di atas menunjukkan secara deskriptif dari statistik variabel penelitian pada Rasio Gini Menurut Provinsi. Hasil pengujian menunjukkan dari 33 provinsi yang diamati variabel yang memiliki nilai *maximum* pada tahun 2008 adalah provinsi Papua (0,40). Pada tahun 2009 adalah provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai Rasio Gini sebesar 0,39. Kemudian pada 2010-2011 adalah provinsi Gorontalo dengan Rasio Gini antara lain; 0,43 (2010) dan 0,46 (2011) dan pada tahun 2012 provinsi Papua bersama provinsi Gorontalo dengan tingkat kesenjangan 0,40. Selanjutnya nilai *minimum* Rasio Gini pada tahun 2008 adalah

provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Rasio Gini sebesar 0,27. Provinsi Jambi pada tahun 2009 dengan Rasio Gini sebesar 0,27. Pada tahun 2010 adalah provinsi Kepulauan Riau dengan Rasio Gini sebesar 0,29. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011 dan 2012 adalah provinsi dengan tingkat rasio gini sebesar 0,30 dan 0,29. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) terendah adalah pada tahun 2008 (0,32), disusul tahun 2009 (0,33), tahun 2010 (0,36), dan tertinggi adalah tahun 2011 dan 2012 (0,38).

Dari tabel di atas akan tergambar dalam grafik di bawah ini:



Grafik 41 Rasio Gini Menurut Provinsi, 2008-2012

Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

Adapun gambaran rasio gini provinsi, 2008-2012 di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:



Grafik 42 Rasio Gini Indonesia, 2008-2012  
Sumber: Olahan data sekunder, BPS



#### b) Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan GDP riil per kapita. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*, GDP) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuah negara. Kenaikan GDP dapat muncul melalui: kenaikan penawaran tenaga kerja, kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia, dan kenaikan produktivitas.

Adapun manfaat pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut: *pertama*, laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapita dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya. *Kedua*, sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan

penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga internasional lainnya. *Ketiga*, sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya (tenaga kerja dan modal)<sup>147</sup>.

Adapun pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2008-2012 berdasarkan analisis statistik deskriptif antara lain:

Tabel 42 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2008 - 2012 (Persen)

No	Tahun	Maximum	Minimum	Mean
1	2008	12,07	-5,24	5,75
2	2009	22,22	-5,51	5,88
3	2010	28,47	-3,19	6,65
4	2011	27,08	-5,32	6,69
5	2012	15,84	-1,12	6,61

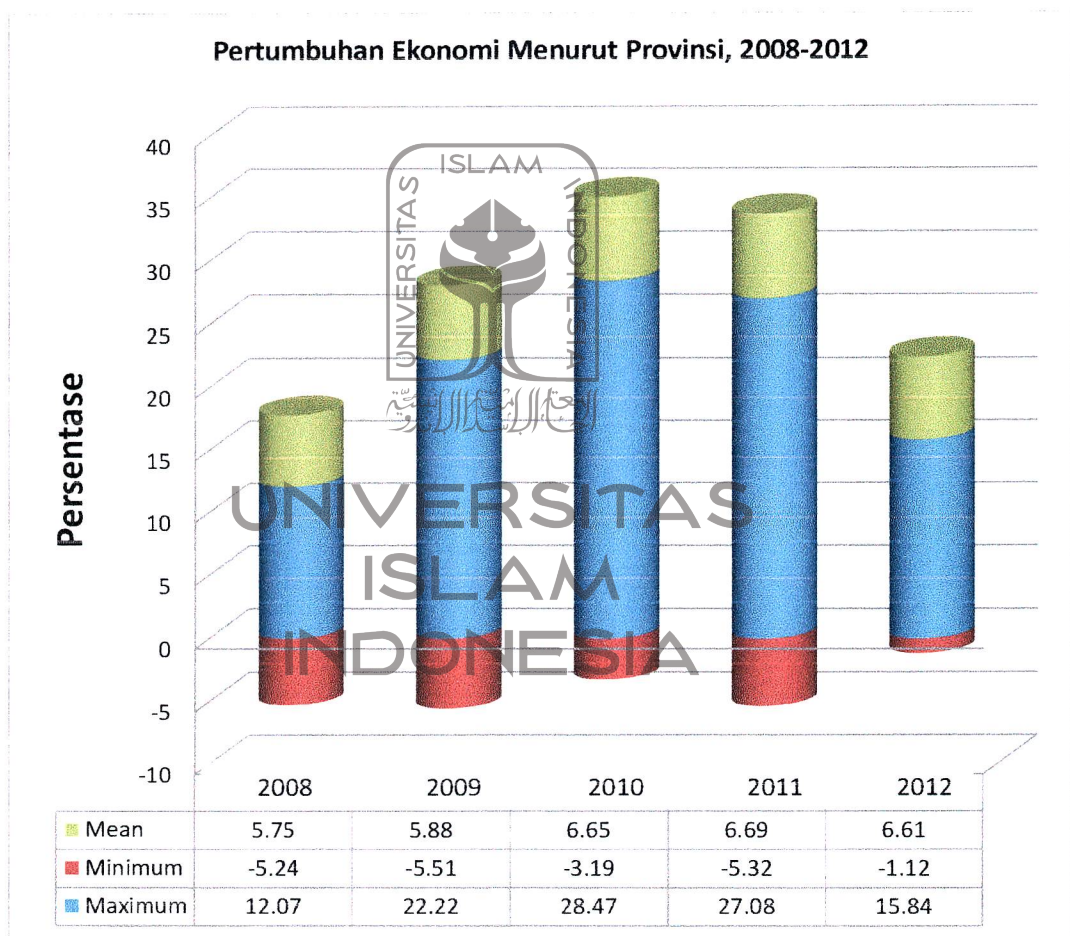
Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

Tabel 42 di atas menunjukkan secara deskriptif dari statistik variabel penelitian pada Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi. Hasil pengujian menunjukkan dari 33 provinsi yang diamati variabel yang memiliki nilai *maximum* pada tahun 2008 adalah provinsi Sulawesi Barat (12,07), pada tahun 2009 adalah provinsi Papua dengan laju pertumbuhan sebesar 22,22. Kemudian pada 2010-2012 adalah provinsi Papua Barat dengan laju pertumbuhan antara lain; 28,47 (2010), 27,08 (2011) dan 15,84 (2012). Selanjutnya nilai *minimum* laju pertumbuhan pada tahun 2008 dan 2009 adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan laju pertumbuhan sebesar -5,24 (2008) dan -5,51 (2009). Pada

<sup>147</sup> <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/pertumbuhan-ekonomi-definisi-sumber.html> diakses pada 2 Januari 2014.

tahun 2010-2011 adalah provinsi Papua dengan laju pertumbuhan sebesar -3,19 (2010) dan -5,32 (2011). Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2012 adalah provinsi dengan laju pertumbuhan sebesar -1,12. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) terendah adalah pada tahun 2008 (5,75), disusul tahun 2009 (5,88), tahun 2012 (6,61), tahun 2010 (6,65) dan tertinggi adalah tahun 2011 (6,69).

Dari tabel di atas akan tergambar dalam grafik di bawah ini:



Grafik 43 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2008 - 2012 (Persen)

Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

### c) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan daerah<sup>148</sup>.

Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah diberikan hak untuk mengurus daerahnya. Sidik (2002) menegaskan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal harus dapat:

1. Meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pembangunan daerah.
2. Dapat memenuhi aspirasi daerah.
3. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.
4. Memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

<sup>148</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/33083/4/Chapter%20II.pdf> diakses tanggal 23 Desember 2013.

Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya. Dengan kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya daerah baik, sumber daya keuangan maupun non keuangan menunjukkan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam menyejahterakan rakyat. Artinya bila pemerintah daerah memiliki kepekaan yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan daerah, maka pemerintah daerah berusaha melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran dan berusaha untuk melakukan pengeluaran, terutama belanja modal yang berorientasi pada upaya peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Namun, fungsi dan kewenangan yang diserahkan kepada daerah kurang didukung oleh kesiapan daerah dalam membiayai pembangunan, karena kemampuan daerah yang satu dengan yang lain dalam hal finansial tidak sama. Untuk itu, pemerintah perlu untuk menindak lanjuti dengan seperangkat perundang-undangan yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk membiayai pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, yaitu desentralisasi fiskal. Hal ini menandakan bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan yang jelas dan tegas, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan publik<sup>149</sup>.

Adapun Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Indonesia pada tahun 2008-2012 berdasarkan analisis statistik deskriptif antara lain:

---

<sup>149</sup> Machfud Sidik, "Format Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional", *Seminar Nasional Publik Sektor*, Jakarta, (April, 2002).

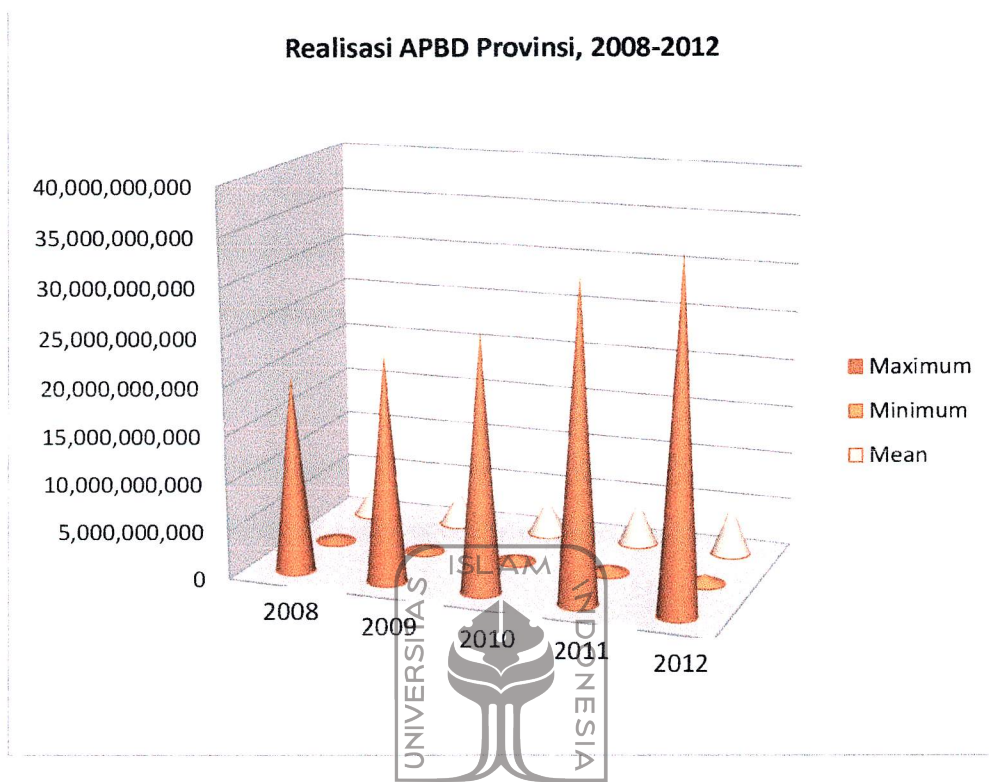
Tabel 43 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2008-2012

No	Tahun	Maximum	Minimum	Mean
1	2008	20.586.014.202	581.008.353	3.333.444.183
2	2009	23.698.266.946	614.124.505	3.585.670.868
3	2010	26.774.499.140	633.599.140	3.925.677.309
4	2011	33.223.439.441	744.622.517	4.720.718.909
5	2012	36.023.344.857	971.008.830	5.356.653.737

Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

Tabel 43 di atas menunjukkan secara deskriptif dari statistik variabel penelitian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil pengujian menunjukkan dari 33 provinsi yang diamati variabel yang memiliki nilai *maximum* pada tahun 2008-2012 adalah provinsi DKI Jakarta Rp 20,6 Miliar (2008), Rp 23,7 Miliar (2009), Rp 26,8 Miliar (2010), Rp 33,2 Miliar (2011) dan Rp 36 Miliar (2012). Selanjutnya nilai *minimum* pada tahun 2008-2012 adalah provinsi Sulawesi Barat dengan APBD sebesar Rp 581 Juta (2008), Rp 614 Juta (2009), Rp 634 Juta (2010), Rp 745 Juta (2011) dan Rp 971 Juta (2012). Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) tertinggi adalah pada tahun 2012 (Rp 5,4 Miliar), disusul tahun 2011 (Rp 4,7 Miliar), tahun 2010 (Rp 3,9 Miliar), tahun 2009 (Rp 3,6 Miliar), dan terendah adalah tahun 2008 (Rp 3,3 Miliar).

Dari tabel di atas akan tergambar dalam grafik di bawah ini:



Grafik 44 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2008-2012  
 Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

#### d) Tingkat Upah Minimum Regional

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi. Menurut Keputusan Menteri No.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan

melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan<sup>150</sup>.

Upah Nominal adalah upah yang diterima buruh sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah Riil menggambarkan daya beli dari pendapatan/upah yang diterima buruh. Upah riil dihitung dari besarnya upah nominal dibagi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Penghitungan upah nominal buruh tani menggunakan rata-rata tertimbang, sedangkan upah nominal buruh bangunan menggunakan rata-rata hitung biasa. Pengumpulan data upah buruh tani dilakukan melalui Survei Harga Perdesaan dengan responden petani. Data upah buruh bangunan diperoleh dari Survei Harga Konsumen Perkotaan dengan responden buruh bangunan. Survei Harga Perdesaan dilaksanakan di 32 provinsi, sedangkan Survei Harga Konsumen Perkotaan dilaksanakan di 66 kota<sup>151</sup>.

Terkait data upah dalam penelitian ini berdasarkan kepada data BPS. Survei Upah Buruh (SUB) diselenggarakan BPS sejak tahun 1979/1980, empat kali dalam setahun (kuartalan) dengan pendekatan perusahaan (*establishment approach*). Dalam pelaksanaannya survei ini mengalami berbagai perubahan baik dari segi metodologi maupun cakupan. Pada mulanya sampel perusahaan relatif besar dan pertanyaan yang diajukan relatif rinci. Mulai tahun 1992 jumlah sampel dikurangi dan kuesioner disederhanakan. Kemudian mulai tahun 2008, pemilihan sampel perusahaan untuk semua sektor dilakukan dengan teknik *probability*

---

<sup>150</sup> Ayu Wafi Lestari dan Nenek Woyanti, "Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 1, Vol. 13, hal. 11.

<sup>151</sup> Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, BPS, Edisi 31, Desember 2012, hal. 116.

*proporsional to size with Control Selection*. Total sampel perusahaan industri adalah 2.177 perusahaan, mencakup perusahaan besar (total pekerja 100 orang atau lebih) dan perusahaan sedang (total pekerja 20-99 orang), sampel hotel menjadi 868 hotel, dan sampel perusahaan pertambangan menjadi 59 perusahaan. Tujuan utama SUB adalah mengumpulkan data upah secara berkala bagi buruh yang berstatus di bawah mandor/supervisor. Upah Buruh adalah pendapatan yang diterima buruh dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji pokok, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kuartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin, dan tunjangan dalam bentuk natura<sup>152</sup>.

Adapun Upah Minimum Provinsi di Indonesia pada tahun 2008-2012 berdasarkan analisis statistik deskriptif antara lain:

Tabel 44 Upah Minimum Provinsi per Bulan (Rupiah). 2008-2012

No	Tahun	Maximum	Minimum	Mean
1	2008	1.105.500	500.000	756.612
2	2009	1.216.100	570.000	843.448
3	2010	1.316.500	630.000	908.825
4	2011	1.410.000	675.000	988.829
5	2012	1.585.000	837.500	1.121.460

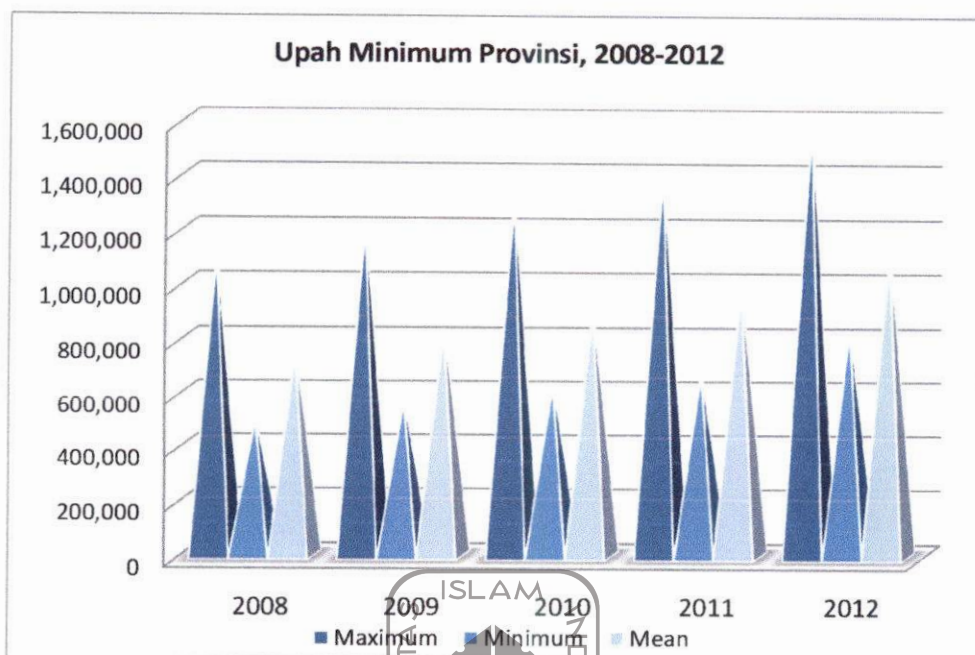
Sumber: Olahan Data Sekunder. BPS

Tabel 44 di atas menunjukkan secara deskriptif dari statistik variabel penelitian pada tingkat Upah. Hasil pengujian menunjukkan dari 33 provinsi yang diamati variabel yang memiliki nilai *maximum* pada tahun 2008 adalah provinsi

<sup>152</sup> Statistik Indonesia 2011, katalog BPS: 1101001, hal. 73.

Papua Barat bersama provinsi Papua dengan tingkat upah minimum sebesar Rp 1.105.500. Pada tahun 2009, 2010 dan 2012 provinsi dengan tingkat upah minimum tertinggi adalah provinsi Papua, dengan tingkat upah sebesar Rp 1.216.100 (2009), Rp 1.316.500 (2010) dan Rp 1.585.000 (2012). Selanjutnya provinsi Papua Barat pada tahun 2011 sebesar Rp 1.410.000. Kemudian, nilai *minimum* pada tahun 2008-2010 adalah provinsi Jawa Timur dengan tingkat upah minimum terendah sebesar Rp 500.000 (2008), Rp 570.000 (2009), dan Rp 630.000 (2010). Sedangkan untuk tahun 2011 provinsi dengan tingkat upah minimum terendah adalah provinsi Jawa Tengah yaitu Rp 675.000 dan untuk tahun 2012, provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menetapkan upah minimum. Selain dari tiga provinsi tersebut, provinsi dengan tingkat upah minimum terendah pada tahun 2012 adalah provinsi Gorontalo dengan tingkat upah Rp 837.500. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) tertinggi tingkat upah minimum adalah pada tahun 2012 (Rp 1.121.460), disusul tahun 2011 (Rp 988.829), tahun 2010 (908.825), tahun 2009 (843.448), dan terendah adalah tahun 2008 (756.612).

Dari tabel di atas dapat ditampilkan dalam grafik di bawah ini:



Grafik 45 Upah Minimum Provinsi per Bulan (Rupiah), 2008-2012  
 Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

#### e) Rasio Penduduk Muslim

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010 pada bulan Mei yang lalu. Dalam publikasi yang dikeluarkan oleh BPS, data hasil SP2010 yang disajikan merupakan angka sementara atau dari hasil olah cepat. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps

diplomasi negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan wawancara antara petugas sensus dengan responden. Pencacahan penduduk menggunakan konsep *usual residence* yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal. Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam 'Hari Sensus'. Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing dan pengungsi. Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap, tetapi sedang bertugas ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya<sup>153</sup>. Pada penelitian ini akan menggunakan data penduduk muslim dengan satuan rasio. Rasio penduduk muslim adalah perbandingan antara banyaknya penduduk yang beragama Islam dengan banyaknya penduduk pada suatu daerah (provinsi) dan waktu tertentu (tahun 2008-2012).

Adapun Rasio Penduduk Muslim di Indonesia pada tahun 2008-2012 berdasarkan analisis statistik deskriptif antara lain:

Tabel 45 Rasio Penduduk Muslim Indonesia, 2008-2012 (Persen)

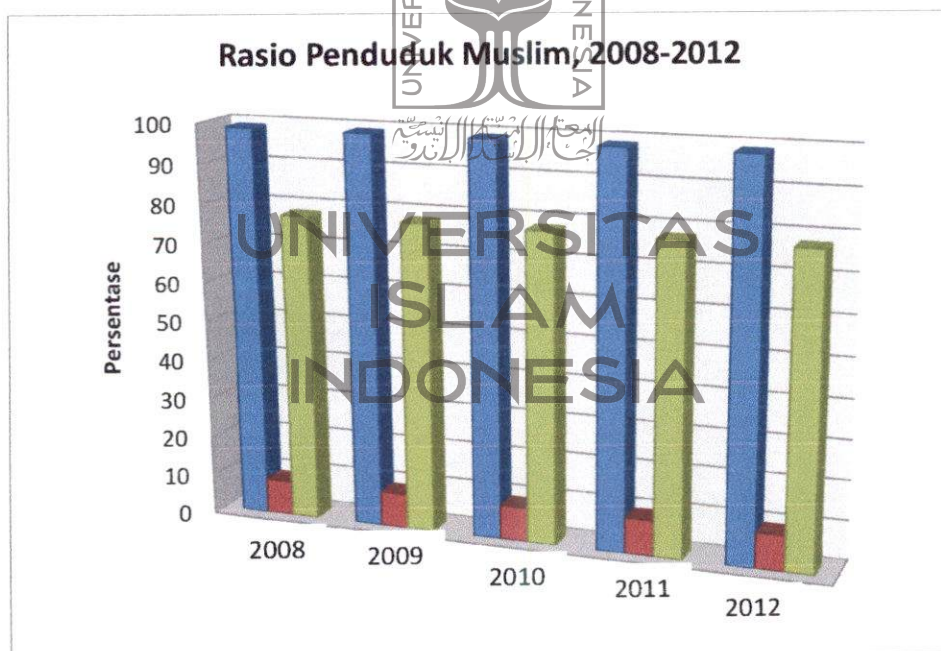
No	Tahun	Maximum	Minimum	Mean
1	2008	98,69	8,66	77,63
2	2009	98,69	8,66	77,63
3	2010	98,69	8,66	77,63
4	2011	98,37	9,06	77,41
5	2012	98,37	9,06	77,41

Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

<sup>153</sup> Statistik Indonesia 2011, katalog BPS: 1101001, hal. 69.

Tabel 45 di atas menunjukkan secara deskriptif dari statistik variabel penelitian pada rasio penduduk muslim. Hasil pengujian menunjukkan dari 33 provinsi yang diamati variabel yang memiliki nilai *maximum* pada tahun 2008-2012 adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan rasio penduduk muslim sebesar 98,69 (2008-2010), dan 98,37 pada tahun 2011 dan 2012. Selanjutnya nilai *minimum* pada tahun 2008-2012 adalah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rasio penduduk muslim sebesar 8,66 (2008-2010), dan 9,06 pada tahun 2011 dan 2012. Sedangkan nilai rata-rata (*mean*) tertinggi adalah pada tahun 2008-2010 (77,63), disusul tahun 2011 dan 2012 (77,41).

Dari tabel di atas, dapat ditampilkan dalam grafik di bawah ini:



Grafik 46 Rasio Penduduk Muslim Indonesia, 2008-2012 (Persen)  
Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

## B. Analisis Penelitian

### 1. Pemilihan Model

Pemilihan model yang digunakan dalam sebuah penelitian perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan statistik. Hal ini ditujukan untuk memperoleh dugaan yang efisien.

#### a. Uji F-statistik (Chow Test)

Uji ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model estimasi *Fixed Effect*, dengan uji hipotesis:

1. Ho: memilih menggunakan model estimasi *Common Effect*.
2. H1: memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*.

Uji ini menggunakan distribusi statistik *Chi Square*, bila nilai hitung lebih besar dari pada nilai tabelnya maka model yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*, sebaliknya bila nilai hitung lebih kecil dari pada nilai tabel maka model yang digunakan adalah model estimasi *Common Effect*.

Tabel 46 Hasil Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Redundant Fixed Effects Tests  
Pool: DP  
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.511642	(32,125)	0.0000
Cross-section Chi-square	222.418030	32	0.0000

Sumber : Olahan Data Eviews 5.1

Nilai distribusi statistic *Chi Square* dari perhitungan menggunakan *Eviews5.1* adalah sebesar 222.418030 dengan probabilitas 0,0000 (kurang dari 5%), sehingga secara statistik  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ , maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

### b. Uji Hausman

Uji Hausman ini digunakan untuk memilih model yang akan digunakan antara model estimasi *Fixed Effect* atau model estimasi *Random Effect*, dengan uji hipotesis:

1.  $H_0$ : memilih menggunakan model estimasi *Random Effect*.
2.  $H_1$ : memilih menggunakan model estimasi *Fixed Effect*.

Uji Hausman ini menggunakan distribusi statistik *Chi Square*, bila nilai hitung lebih besar dari pada nilai tabelnya maka model yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*, sebaliknya bila nilai hitung lebih kecil dari pada nilai tabel maka model yang digunakan adalah model estimasi *Random Effect*.

Tabel 47 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: DP  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	31.001256	4	0.0000

Sumber: Olahan Data *Eviews 5.1*

Nilai distribusi statistik *Chi Square* dari perhitungan menggunakan *Eviews5.1* adalah sebesar 31.001256 dengan probabilitas 0.0000 (kurang dari

5%), sehingga secara statistik  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ , maka model yang tepat digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Setelah membandingkan hasil uji tersebut maka penulis memakai model estimasi *Fixed Effect*.

### c. Estimasi *Fixed Effect*

Model ini dikenal dengan model regresi *Fixed Effect* (efek tetap). Efek tetap di sini maksudnya adalah bahwa satu objek, memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode tertentu. Demikian juga dengan regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu (*time invariant*).

Tabel 48 Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: Y?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 01/06/14 Time: 16:05  
 Sample: 2008 2012  
 Included observations: 5  
 Cross-sections included: 33  
 Total pool (unbalanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.083060	0.079478	1.045065	0.2980
X1?	0.000251	0.000670	0.374230	0.7089
X2?	1.60E-12	1.74E-12	0.914929	0.3620
X3?	1.66E-07	1.79E-08	9.256393	0.0000
X4?	0.001407	0.001021	1.378127	0.1706
Fixed Effects (Cross)				
_NAD—C	-0.142165			
_SUMUT—C	-0.022326			
_SUMBAR—C	-0.059885			
_RIAU—C	-0.042325			
_KEPRI—C	-0.048738			
_JAMBI—C	-0.069171			
_SUMSEL—C	-0.046551			
_KEPBABEL—C	-0.077234			
_BENGKULU—C	-0.012917			

Lanjutan Tabel 48

_LAMPUNG—C	0.005936
_DKI—C	-0.067947
_JABAR—C	0.022901
_BANTEN—C	0.002339
_JATENG—C	0.003241
_DIY—C	0.055155
_JATIM—C	0.003662
_BALI—C	0.120591
_NTB—C	-0.011123
_NTT—C	0.129873
_KALBAR—C	0.059538
_KALTENG—C	-0.050852
_KALSEL—C	-0.035426
_KALTIM—C	-0.021923
_SULUT—C	0.058569
_GORONTALO—C	0.061070
_SULTENG—C	0.036719
_SULSEL—C	0.014669
_SULBAR—C	-0.034082
_SULTENGG—C	0.020108
_MALUKU—C	0.054648
_MALUT—C	0.004485
_PAPUA—C	0.066849
_PAPBAR—C	0.028272



## Effects Specification

## Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.776803	Mean dependent var	0.352346
Adjusted R-squared	0.712522	S.D. dependent var	0.041978
S.E. of regression	0.022507	Akaike info criterion	-4.552435
Sum squared resid	0.063323	Schwarz criterion	-3.847243
Log likelihood	405.7473	F-statistic	12.08451
Durbin-Watson stat	1.684406	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Olahan Data Eviews 5.1

$$DP = 0.083060 + 0.000251 PE + 1.60E-12 APBD + 1.66E-07 Upah + 0.001407$$

Muslim + e

Std.er	0.079478	0.000670	1.743E-12	1.793E-08	0.001021
t-Stat	(1.045065)	(0.374230)	(0.914929)	(9.256393)	(1.378127)

Keterangan :

DP = Distribusi Pendapatan (satuan persen)

PE = Pertumbuhan Ekonomi (satuan persen)

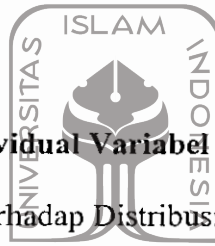
APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (satuan rupiah)

Upah = Upah Minimum Regional (satuan rupiah)

Muslim = Rasio Penduduk Pemeluk Agama Islam (satuan persen)

Std.er = Standard Error

t-Stat = t-Statistik



### 1) Pengujian Individual Variabel (Uji t)

#### a) Pengujian terhadap Distribusi Pendapatan (DP)

Distribusi Pendapatan (DP) disimbolkan dengan Y. Nilai Y dapat diketahui dengan rumus  $Y = C + X_1 + X_2 + X_3 + X_4$ . Untuk nilai C dalam penelitian adalah 0.083060. Adapun makna nilai konstanta dalam penelitian adalah, nilai tersebut akan tetap ada walaupun variabel-variabel lainnya tidak dihitung atau tidak termasuk dalam penelitian. Sebagai contoh konstanta untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah  $0.083060 - 0.142165 = -0.05911$  ini artinya nilai Y pada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebesar adalah sebesar -0.05911 jika tidak ada variabel lain. Sedangkan untuk provinsi Nusa Tenggara Timur nilai konstantanya adalah  $0.083060 + 0.129873 = 0.225225$ . Hal ini menunjukkan semakin tinggi nilainya maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.

b) Pengujian terhadap PE (Pertumbuhan Ekonomi)

Koefisien variabel PE adalah 0.000251 dan t-hitung sebesar 0.374230 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.7089 (lebih dari  $\alpha 5\%$ ), sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel PE tidak signifikan mempengaruhi variabel DP. Artinya  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ , maka dalam model estimasi *Fixed Effect*, variabel PE (pertumbuhan ekonomi) tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan.

c) Pengujian terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Koefisien variabel PE adalah  $1.60E-12$  dan t-hitung sebesar 0.914929 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.3620 (lebih dari  $\alpha 5\%$ ), sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel APBD tidak signifikan mempengaruhi variabel DP. Artinya  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ , maka dalam model estimasi *Fixed Effect*, variabel APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan.

d) Pengujian terhadap Upah

Koefisien variabel Upah adalah  $1.66E-07$  dan t-hitung sebesar 9.256393 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.0000 (kurang dari  $\alpha 5\%$ ), sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel Upah berpengaruh signifikan terhadap variabel DP. Itu artinya  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_1$ , maka dalam model

estimasi *Fixed Effect*, variabel Upah berpengaruh terhadap Distribusi Pendapatan.

↳) Pengujian terhadap Muslim (Rasio Penduduk Muslim)

Koefisien variabel Muslim adalah 0.001407 dan t-hitung sebesar 1.378127 sedangkan probabilitasnya sebesar 0.1706 (lebih dari  $\alpha 5\%$ ), sehingga secara statistik menunjukkan bahwa variabel Muslim tidak signifikan mempengaruhi variabel DP.

Artinya  $H_0$  diterima dan menolak  $H_1$ , maka dalam model estimasi *Fixed Effect*, variabel Muslim (Rasio Penduduk Muslim) tidak berpengaruh terhadap distribusi pendapatan.



**2) Pengujian Serempak/Bersamaan Variabel (Uji F)**

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen bersama-sama mempengaruhi variabel dependen atau tidak.

F-hitung dalam perhitungan menggunakan *E-views5.1* sebesar 12.08451 dan probabilitasnya sebesar 0.000000 (kurang dari 5%), sehingga dapat disimpulkan bahwa secara estimasi *Fixed Effect*, variabel-variabel independen seperti PE, APBD, Upah, dan Muslim bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen DP (Distribusi Pendapatan).

### 3) Koefisien Determinasi ( $\bar{R}^2$ )

Koefisien determinasi ( $\bar{R}^2$ ) adalah sesuatu yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen DP dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen PE, APBD, Upah, dan Muslim. Pada model estimasi *Fixed Effect*, ( $\bar{R}^2$ ) sebesar 0.776803 sehingga variasi tingkat distribusi pendapatan dapat dijelaskan oleh model variabel PE, APBD, Upah, dan Muslim sebesar 77.68% dan sisanya sebesar 22.32% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sedangkan koefisien determinasi yang disesuaikan ( $\bar{R}^2$ ) sebesar 0.712522. Nilai koefisien  $\bar{R}^2$  lebih kecil dari koefisien  $\bar{R}^2$ .



## 2. Pembahasan dan Analisis

Berdasarkan analisis perhitungan yang dilakukan di atas dengan menggunakan uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah model estimasi *Fixed Effect*.

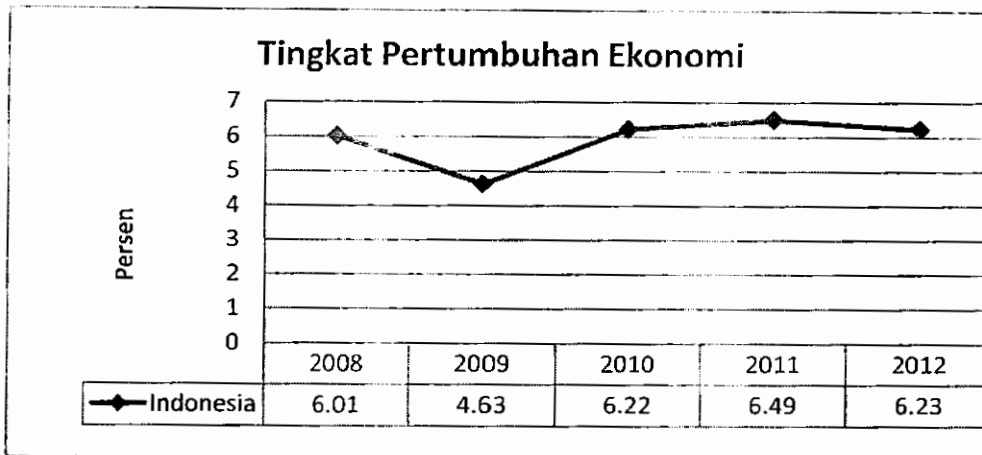
Dilihat dari hasil estimasi model *fixed effect* (tabel 48), persentase Distribusi Pendapatan di Indonesia tahun 2008-2012 sebesar 0.083060. Dilihat dari wilayah yang memiliki persentase ketimpangan distribusi pendapatan tertinggi adalah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan nilai sebesar 0.129873 sedangkan wilayah yang memiliki persentase ketimpangan distribusi pendapatan terendah adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nilai sebesar -0.142165.

### a. Analisis Pengaruh PE (Pertumbuhan Ekonomi) terhadap Distribusi Pendapatan

Berdasarkan model estimasi Fixed Effect, diketahui bahwa variabel PE mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada taraf nyata lima persen terhadap persentase DP dengan nilai probabilitas (p-value) 0.7089. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa PE memiliki kolerasi positif terhadap DP. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditandai pada tolak ukur pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tidak cukup menjadi indikator kesejahteraan masyarakatnya, namun juga didasarkan pada bagaimana pendapatan nasional itu didistribusikan secara lebih merata ataukah timpang. Ini adalah masalah keadilan dan tidak berarti kalau pendapatan nasional didistribusikan secara merata sempurna dianggap adil. Pendapatan dianggap didistribusikan secara merata bila setiap individu memperoleh bagian yang sama dari output perekonomian. Distribusi pendapatan dianggap kurang adil bila jika sebagian besar output nasional dikuasai oleh lebih sebagian kecil penduduk. Tetapi distribusi pendapatan menjadi sangat tidak adil bila sangat besar bagian output nasional yang dikuasai oleh segelintir kelompok masyarakat<sup>154</sup>. Berikut Grafik Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Laju Pertumbuhan PDB atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2008-2012.

---

<sup>154</sup>Rahardja, Prahatma dan Manurung, Mandala. Pengantar Ilmu Ekonomi, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, 2008).



Grafik 47 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia  
Sumber: Olahan Data Sekunder, BPS

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi belum tentu mencerminkan meratanya terhadap distribusi pendapatan. Kenyataan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak selalu merata, bahkan kecenderungan yang terjadi justru sebaliknya. Distribusi pendapatan yang tidak merata akan mengakibatkan terjadinya disparitas. Semakin besar perbedaan pembagian “kue” pembangunan, semakin besar pula disparitas distribusi pendapatan yang terjadi. Indonesia yang tergolong dalam negara yang sedang berkembang tidak terlepas dari permasalahan ini<sup>155</sup>.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak secara otomatis meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bahkan pertumbuhan ekonomi ini di beberapa negara telah menimbulkan absolut dalam tingkat hidup orang miskin di perkotaan dan perdesaan. Apa yang disebut dengan proses “*trickle down effect*” dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi orang miskin tidak

<sup>155</sup>A. Kholil Ashari, “Disparitas Distribusi Pendapatan Nasional Bagaimana Mendistribusikan Pendapatan Nasional Secara Merata?”, *Jurnal Distribusi Pendapatan Nasional*.

terjadi<sup>156</sup>. Meskipun gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah relatif tinggi, tetapi tidak berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja, pada akhirnya akan membuat jurang kemiskinan yang semakin melebar. Inilah kondisi paradok pertumbuhan ekonomi (*paradox of economics growth*) yang kini terjadi di Indonesia. Karena pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tinggi lebih banyak ditopang oleh laju pertumbuhan tingkat konsumsi dari pada investasi. Dampak selanjutnya, karena masih rendahnya tingkat investasi, khususnya investasi *human capital* dan teknologi, maka nilai tambah dari produktivitas menjadi tetap rendah dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi tidak berkualitas.

Sebagaimana yang dikatakan Todaro (1998) bahwa GNP adalah Indeks Kesejahteraan dan Pembangunan Nasional yang Bias. Hal tersebut merupakan kelemahan konsep GNP sebagai indikator makro atas tingkat kesejahteraan dan kemajuan pembangunan nasional suatu negara. karena pada hakikatnya, angka-angka GNP per kapita memang sama sekali tidak memberikan indikasi atau petunjuk yang jelas mengenai bagaimana sesungguhnya pendapatan nasional dibagikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Bahkan, angka kenaikan GNP per kapita itu mengandung kelemahan yang sangat fatal, yakni dapat menyamarkan kenyataan fundamental yang sebenarnya, yaitu sama sekali belum membaiknya kondisi kesejahteraan kelompok penduduk yang relatif paling miskin. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan GNP sebaiknya tidak digunakan

---

<sup>156</sup><http://repository.binus.ac.id/content/J0052/J005259373.doc> diakses pada 27 Januari 2014.

secara tersendiri, atau sebagai suatu indeks untuk mengukur membaiknya kesejahteraan<sup>157</sup>.

Sebagai ilustrasi, sebuah perekonomian yang hanya terdiri dari 10 orang. Sembilan orang di antaranya sama sekali tidak mempunyai penghasilan, sedangkan satu orang yang kesepuluh menerima pendapatan sebesar 100 unit moneter. GNP perekonomian ini adalah 100 unit dan GNP per kapitanya 10 unit. Selanjutnya, misalkan pendapatan setiap orang naik 20% sehingga GNP meningkat menjadi 120 dan GNP per kapita menjadi 12. Bagi orang-orang yang sebelumnya tidak mempunyai penghasilan sama sekali, kondisinya yang sekarang tetap seperti sebelumnya (yaitu:  $120 \times 0 = 0$ ). Dengan demikian, jelaslah bahwa kenaikan pendatan per kapita tersebut tidak menyebabkan mereka lebih sejahtera. Satu orang yang kesepuluh tersebut tetap saja menguasai seluruh pendapatan<sup>158</sup>.

**b. Analisis Pengaruh APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap Distribusi Pendapatan**

Berdasarkan model estimasi *Fixed Effect*, diketahui bahwa variabel APBD mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada taraf nyata lima persen terhadap persentase DP dengan nilai probabilitas (p-value) 0.3620. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa APBD memiliki kolerasi yang positif terhadap Distribusi Pendapatan Indonesia.

<sup>157</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, alih bahasa: Haris Munandar, Edisi Keenam, (Jakarta: Erlangga, 1998), hal. 196.

<sup>158</sup> *Ibid.*

Menurut Noor (2007) APBD tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap distribusi pendapatan disebabkan oleh beberapa fakta, antara lain:<sup>159</sup>

- a. Modal atau dana cenderung mengalir dari daerah yang kurang maju ke daerah yang lebih maju perekonomiannya. Hal ini mengakibatkan daerah yang kurang maju, penyediaan modalnya semakin menipis atau sulit dan pada gilirannya menyebabkan daerah yang kurang maju cenderung lebih terbelakang.
- b. Tenaga kerja produktif cenderung pindah dari daerah kurang maju ke daerah yang lebih maju karena dianggap daerah yang lebih maju mempunyai lebih banyak potensi untuk mengembangkan karir mereka yang bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini juga menyebabkan jurang yang makin lebar antara daerah yang kaya dan daerah yang miskin.
- c. Dalam transaksi perdagangan antar daerah biasanya daerah yang lebih maju akan cenderung mendikte daerah yang kurang maju, mereka merasa lebih berwenang dalam menentukan keputusan dan seterusnya.

Sehubungan dengan hal di atas masing-masing pemerintah daerah juga harus bisa melihat peluang kerja sama antar daerah dan memanfaatkannya secara sinergi sehingga dapat diciptakan arus balik yang lebih adil untuk kepentingan masyarakat di kawasan tersebut secara keseluruhan. Dalam hal ini peranan pemerintah pusat juga perlu untuk mengurangi ketimpangan antar daerah dan menciptakan ekonomi yang lebih adil di tengah masyarakat. Karena jika melihat

---

<sup>159</sup> Henry Faizal Noor, *Ekonomi Manajerial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 413.

pada kenyataannya saat ini di Indonesia masih terjadi disparitas atau ketimpangan yang sangat tinggi antar daerah. Pembangunan di bidang ekonomi dan lainnya pun belum bisa dikatakan mencapai hasil yang maksimal. Pembangunan lebih terlihat hanya di daerah-daerah maju padahal jika daerah lain pun masih mempunyai banyak potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya<sup>160</sup>.

Kemandirian suatu daerah sangat terkait dengan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pembangunannya yang ditunjukkan oleh besarnya kontribusi pendapatan asli daerahnya terhadap APBD daerah tersebut. Dengan demikian, maka pemerintah perlu menata perekonomian nasional bangsa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dan mengurangi disparitas yang ada.

Kemudian menurut Fozzard (2001) dalam Tuasikal (2008) Permasalahan seputar alokasi belanja tersebut menjadi lebih parah bila kewenangan pemerintah daerah secara mandiri dalam pengelolaan keuangan daerah tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal<sup>161</sup>. Ini artinya kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya sangatlah diperlukan agar kedepannya APBD dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap distribusi pendapatan.

---

<sup>160</sup>A. Kholil Ashari, *Disparitas*.

<sup>161</sup>Adrian Fozzard, "The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resources Allocation in The Public Sector and Their Implication for Pro-Poor Budgeting. Center for Aid and Public Expenditure, Overseas Development Institute (ODI)", *Working paper*, 2001, dalam Askam Tuasikal, "Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia", *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, No. 2. Vol. 1, (Juli, 2008) hal. 143.

Halim (2001) Alokasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun harus betul-betul dimanfaatkan untuk aktivitas-aktivitas yang produktif<sup>162</sup>. Saragih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan<sup>163</sup>. Sejalan dengan Halim dan Saragi, Stine (1994) menyatakan bahwa penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik<sup>164</sup>. Gagasan yang dikemukakan baik oleh Halim, Saragi maupun Stine menunjukkan bahwa pengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik merupakan hal yang sangat penting dan strategis dalam mendorong perekonomian daerah. Dikatakan penting dan strategis karena, dengan peningkatan sarana publik, misalnya membangun jembatan dan jalan dapat mempermudah akses masyarakat dalam melakukan aktivitas bisnis maupun non bisnis. Ini artinya bahwa pengaruh langsung desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi jika desentralisasi fiskal tidak berjalan secara efisien<sup>165</sup>.

---

<sup>162</sup>Abdul Halim, "Anggaran Daerah dan Fiscal Stress (sebuah studi kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 2001, hal. 346-357.

<sup>163</sup>Juli Panglima Saragih. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

<sup>164</sup>William F Stine, "Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania County Government in an Era Of Retrenchment", *National Tax Journal*, No. 4, Vol. 47, (1994), hal. 799-816.

<sup>165</sup>R. Abdul Maqin, Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat, dalam <http://bisnis-jabar.com/wp-content/uploads/2011/03/R-Abdul-Maqin-disparitas2.pdf> diakses pada 27 Januari 2014.

### c. Analisis Pengaruh Upah terhadap Distribusi Pendapatan

Berdasarkan model estimasi *Fixed Effect*, diketahui bahwa variabel upah mempunyai pengaruh yang signifikan pada taraf nyata lima persen terhadap persentase DP dengan nilai probabilitas (p-value) 0.0000 dan memiliki kolerasi yang positif terhadap kemiskinan antar provinsi. Koefisien upah diperoleh sebesar  $1.66E-07$ , artinya apabila jumlah upah meningkat sebesar 1, maka DP akan bertambah sebesar  $1.66E-07$ . Hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa upah memiliki kolerasi positif terhadap DP.

Ini mengindikasikan bahwa kenaikan upah berakibat pada kenaikan tingkat DP. Hasil ini sesuai yang dinyatakan Hijrahman (1984) menyatakan bahwa: “Upah adalah suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang, serta peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja”. Dari hal tersebut dapat ditarik benang merah, bahwa upah memberikan kontribusi positif bagi penerimanya karena dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam skala yang lebih besar, distribusi pendapatan sangatlah dipengaruhi oleh tingkat upah yang diterima oleh para pekerja.

#### d. Analisis Pengaruh Rasio Penduduk Muslim (Muslim) terhadap Distribusi Pendapatan

Berdasarkan model estimasi *Fixed Effect*, diketahui bahwa variabel muslim mempunyai pengaruh yang tidak signifikan pada taraf nyata lima persen terhadap persentase DP dengan nilai probabilitas (p-value) 0. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa Muslim memiliki kolerasi yang positif terhadap Distribusi Pendapatan Indonesia.

Ini mengindikasikan bahwa kenaikan muslim tidak berakibat pada kenaikan tingkat DP. Kemajuan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi ketersediaan sumber daya alam, kualitas sumber daya manusia, modal dan kewirausahaan. Faktor eksternal meliputi keadaan perekonomian nasional maupun internasional yang terkait kebijakan sektor riil maupun moneter, serta perkembangan harga minyak dunia<sup>166</sup>.

Sadono (1997), Pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif apabila penduduk-penduduknya dapat mengembangkan teknologi, meningkatkan tabungan, dan meningkatkan efisiensi penanaman modal (investasi) yang dijalankan<sup>167</sup>. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk,

<sup>166</sup>Didi Setyopurwanto, "Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia dan Investasi Modal Terhadap Pendapatan Per Kapita Masyarakat Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, hal.1, dalam <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/554/497> diakses pada 27 Januari 2014.

<sup>167</sup>Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 465.

pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan per kapita) akan mengalami penurunan. Apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan penambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan<sup>168</sup>.

Peranan penduduk dalam perekonomian sangat nyata, sesuai dengan asumsi klasik bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran pasar yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi. Tersedianya pasar yang luas serta input produksi yang banyak merupakan pendorong bagi keberlangsungan produksi. Namun jumlah penduduk yang besar juga merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi apabila tidak terjadi adanya akumulasi kapital<sup>169</sup>.

Masalah besar dari kependudukan adalah kepadatan penduduk, dan selalu menjadi problema tersendiri bagi suatu wilayah karena akan memunculkan masalah lain seperti: permukiman, penyediaan lapangan pekerjaan, sarana dan prasarana, dan masalah sosial lainnya. Jika sebagian besar penduduk (seperti: penduduk usia lanjut, anak-anak, dan para penganggur) tidak ikut berpartisipasi terhadap aktifitas ekonomi regional maka pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor dinamika dalam perkembangan ekonomi jangka panjang, bersama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya alam, dan kapasitas produksi yang terpasang, dalam masyarakat yang bersangkutan. Selain jumlah penduduk juga distribusi penduduk

---

<sup>168</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30382/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 27 Januari 2014.

<sup>169</sup>*Ibid.*

yang serasi diharapkan dapat menunjang pembangunan ekonomi nasional secara lebih mantap dan terarah. Kemajuan pembangunan ekonomi nasional diukur dari hasil produksi menurut sektor dan pembangunan kependudukan nasional dilihat dari jumlah penduduk menurut wilayah dan kaitan antara produksi menurut sektor dan penduduk di berbagai wilayah dicerminkan oleh alokasi kegiatan ekonomi di berbagai wilayah dan kapasitas penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor<sup>170</sup>.

Pendidikan merupakan salah satu bentuk modal manusia (*human capital*) yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan *utilitas* dengan meningkatkan pendapatan<sup>171</sup>.

Menurut Sitepu bahwa dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan oleh meningkatnya pengetahuan dan keterampilan seseorang. Peningkatan pengetahuan dan keahlian akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja seseorang. Perusahaan akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga perusahaan akan bersedia memberikan upah/gaji yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik, yang dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Rendahnya produktivitas tenaga

---

<sup>170</sup> *Ibid.*

<sup>171</sup> <http://repository.upnyk.ac.id/883/1/resume.pdf> diakses pada 27 Januari 2014.

kerja kaum miskin salah satu tak lain disebabkan oleh karena rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan<sup>172</sup>.

Dari hal di atas, kuantitas penduduk muslim yang mayoritas di negeri ini hendaknya lebih berkualitas. Karena agama Islam telah memberikan *dustūr* yang telah komprehensif, selain kewajiban untuk menuntut ilmu dan beramal, agama Islam juga memberikan tuntunan dalam hal ekonomi termasuk masalah distribusi pendapatan yang dikenal dengan distribusi kekayaan, salah satunya dengan zakāh, infāq, ṣadaqah, waqāf dan kebajikan lainnya. Menurut Sasongko (2014) Perolehan zakāh oleh Badan Amil Zakat Nasional sejak tahun 2008 hingga 2013 memang mengalami peningkatan yaitu sebesar 920 M (2008), 1,2 T (2009), 1,5 T (2010), 1,73 T (2011), meningkat menjadi 2,2 T (2012) dan 2,5 pada tahun 2013. Namun, penerimaan zakāh ini masih sekitar 0,93% dari potensi zakāh sebesar 270 T<sup>173</sup>, di antara faktor yang menyebabkan perolehan yang tidak maksimal ini disebabkan oleh tingkat kepercayaan umat Islam yang masih rendah terhadap amil dan kebiasaan umat Islam yang membayar zakāh kepada keluarga dan daerah sekitar. Ini artinya zakāh yang berhasil dikumpulkan dan dilaporkan secara resmi masih belum signifikan. Menjadikan zakāh sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal oleh negara ini, dapat meningkatkan pendapatan negara serta didukung oleh pengalokasiannya akan lebih efektif dan efisien karena sasaran penerima zakāh telah ditetapkan di dalam al-Qur'ān.

<sup>172</sup> Rasidin K. Sitepu, "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah tangga di Indonesia", hal. 131, dalam <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5CRasidin%20Sitepu%20-%20Dampak%20investasi%20Sumber%20Daya%20Manusia.pdf> diakses pada 27 Januari 2014.

<sup>173</sup> Agung Sasongko, "Zakāh Belum Maksimal", *Republika*, (Jum'at, 24 Januari 2014), hal. 26.

### e. Analisis Perspektif Ekonomi Islam terhadap Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam mengedepankan prinsip keadilan, karena dengan keadilan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata, serta dapat meminimalisir kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Prinsip keadilan ini, menempati posisi yang penting dalam Islam, menegakkan keadilan dinyatakan oleh Allah sebagai salah satu tujuan utama yang akan dicapai oleh para rasul Allah dalam Surat al-Ḥadīd ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

*"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa." (QS. al-Ḥadīd (57): 25).*

Allah memberikan apresiasi kepada hamba-Nya yang berbuat adil dengan meletakkan keadilan paling dekat kepada takwa. sebagaimana dalam Firman-Nya dalam surat al-Mā'idah ayat 8:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(QS. al-Mā'idah (5): 8).

Dari dua kalam ilahi di atas, menjadi dasar dan pedoman bagi manusia dalam menjalankan perekonomian, yang jika direalisasikan akan memberikan dampak positif dalam distribusi pendapatan, sehingga *paradox of economic growth* yang kini terjadi di Indonesia secara perlahan dapat diperbaiki ke arah yang lebih baik, yaitu dengan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat berbanding lurus dengan pemerataan dalam distribusi pendapatan.

Sistem pemasukan dan pengeluaran dalam ekonomi Islam sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Rasūlullāh dan Khulāfaur Rāsyidūn, secara global mencakup: *kharāj* (sejenis pajak tanah), *zakāh*, *khums* (pajak 1/5), *jizyah* (sejenis pajak atas badan orang non muslim), dan penerimaan lain-lain (diantaranya *kaffārah*/denda). Kemudian di sisi *output* terdiri atas pengeluaran untuk kepentingan dakwah, pendidikan, hankam, kesejahteraan sosial, serta belanja pegawai<sup>174</sup>.

<sup>174</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 25.

Al-Mishri (1990) memberikan deskripsi ringkas mengenai Instrumen Kewajiban atas Harta<sup>175</sup> yang menjadi sumber pemasukan negara, seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 49 Instrumen Kewajiban atas Harta

No	Harta	Pengertian
1	Zakāh	Memberikan bagian tertentu atas harta yang telah mencapai niṣab, dan diberikan kepada orang tertentu (mustahik). Syaratnya; Islam, Sempurna ahliyah, sempurna kepemilikannya, harta yang berkembang, mencapai niṣab dan haul. Mustahik; fakir miskin, ‘āmil, muallaf, hamba sahaya, garimin, fī sabilillah dan ibnus sabīl.
2	Fai’ dan Ganīmah	Fai’ adalah harta yang diambil orang muslim atas non-muslim dengan jalan damai tanpa melalui peperangan. Sedangkan ganīmah merupakan harta yang didapatkan kaum muslimin melalui jalan perang.
3	Jizyah	Harta yang wajib dibayarkan oleh non-muslim dan tunduk dan hidup dalam wilayah kaum muslimin.
4	Kharaj	Upah yang dibayarkan sebagai kompensasi dari pemberdayaan tanah pertanian atau lainnya.
5	‘Uṣr	Harta yang didapatkan negara atas biaya-biaya perdagangan dalam kawasan muslim.
6	Infāq dan ṣadaqāh	Merupakan amal atas harta yang bertujuan untuk mendapatkan pahala Allah.

Sumber: Abdul Sami’ al-Mishri, dalam *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, hal. 135.

Sumber daya keuangan publik yang meliputi; unit zakāh-ṣadaqah, unit ganāim, unit kharāj-jizyah, unit dāribah malikiyah ‘āmmah. Bahwa dāribah merupakan bentuk pajak selain unit zakāh, ṣadaqah, serta unit ganāim. Dalam perkembangannya dāribah seperti pajak yang berlaku pada saat ini. Ketentuannya hampir sama dengan perhitungan niṣab dalam zakāh, tetapi batasanbatasannya sangat relatif dan berlainan satu negara dengan negara lainnya.

Dalam pemerintahan Islam, regulasi dāribah dalam bentuk pajak hanya dijadikan kebijakan pada saat-saat tertentu saja, pada saat kondisi keuangan Baitul

<sup>175</sup> Abdul Sami’ al-Mishri, *Pilar-pilar*, hal. 135.

Māl minus atau defisit dan tidak cukup untuk menyediakan kebutuhan pokok masyarakat. Penarikan pajak ini pun bersifat temporal, tidak berlaku terus-menerus, dan akan dihentikan apabila kondisinya sudah stabil kembali. Penarikan pajak dilakukan hanya kepada orang-orang kaya saja, tidak kepada masyarakat yang tidak mampu<sup>176</sup>.

Penerimaan zakāh dan khums dihitung secara proporsional, yaitu dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Secara ekonomi makro, hal ini menciptakan *built in stability*. Kebijakan ini akan menstabilkan harga dan menekan inflasi ketika permintaan agregat lebih besar dari pada penawaran agregat. Sistem zakāh perniagaan tidak akan mempengaruhi harga dan jumlah penawaran karena zakāh dihitung dari hasil usaha (*tax on quasi rent*). Ini berbeda dengan sistem pajak pertambahan nilai (PPN) yang populer sekarang. PPN dihitung atas harga barang sehingga harga bertambah mahal dan jumlah yang ditawarkan lebih sedikit (*up ward shift on supply curve*). Penetapan zakāh yang progresif (pada zakāh ternak) untuk memberikan insentif meningkatkan produksi. Makin banyak ternak yang dimiliki makin kecil *rate* zakāh yang harus dibayar. Hal ini akan mendorong tercapainya skala produksi yang lebih besar dan terciptanya efisiensi biaya produksi, sistem progresif ini hanya berlaku untuk zakāh ternak karena apabila terjadi kelebihan pasokan, ternak tidak akan busuk seperti sayur atau buah. Harga tidak akan jatuh karena kelebihan pasokan<sup>177</sup>. Menurut Hasan al-Banna, al-Qardāwī dan al-‘Abadi, menganggap bahwa sistem

---

<sup>176</sup> Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktek*, (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2008)

<sup>177</sup> Karim, *Ekonomi Islam.*, hal. 26.

pajak yang progresif benar-benar selaras dengan etos Islam karena sistem ini membantu mengurangi ketidakmerataan dalam pendapatan dan kekayaan<sup>178</sup>.

Namun demikian, analisis komprehensif mengenai pajak modern seperti pajak pendapatan dan perusahaan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak kekayaan serta pajak warisan dari sudut pandang kesesuaiannya dengan *maqāsid* dan kepraktisannya dalam masyarakat Muslim<sup>179</sup> (tapi yang membahas ini adalah para penulis Barat. Dari sudut pandang tujuan kemanusiaan dalam masyarakat sehingga tidak ada alasan bagi para penulis Islam untuk menganalisis pajak-pajak ini kecuali pada tingkat di mana pemberlakuan pajak-pajak ini mengarahkan pada pemungutan pajak yang berlebihan, ketidakefisienan, dan ketidakadilan sehingga melanggar prinsip-prinsip dalam syāri'ah).

Sistem perpajakan yang adil yang seirama dengan spirit Islam, menurut fuqahā' akan terjadi apabila memenuhi tiga kriteria; *pertama*, pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan *maqāsid*. *Kedua*, beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar, dan *ketiga*, dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya diwajibkan pajak. Suatu sistem pajak tidak memenuhi tiga hal ini dipandang menindas dan secara aklamasi dikutuk<sup>180</sup>.

Mengenai aplikasi penerimaan dan penyaluran APBN pada awal pemerintahan Islam yang kemudian menjadi rujukan dalam ekonomi Islam,

<sup>178</sup> Umer Chapra, *The Future of Economic.*, hal. 337.

<sup>179</sup> *Ibid.*,

<sup>180</sup> Umer Chapra, *Islam ...* hal. 295.

seperti Peranan Kebijakan Fiskal Rasūlullāh saw. pada masa Rasūlullāh, struktur APBN dan kebijakan yang diambil pada zaman pemerintahan Islam ditopang oleh sejumlah instrumen kebijakan fiskal yaitu:

- a) Peningkatan Pendapatan Nasional dan Partisipasi Kerja. Untuk meningkatkan pendapatan nasional dan partisipasi kerja, Rasūlullah saw. menerapkan kebijakan sebagai berikut:
  - 1) Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshar.
  - 2) Mendorong terjalinnya kerja sama kaum Muhajirin dengan Anshar.
  - 3) Membagikan tanah dan membangun perumahan untuk kaum Muhajirin.
  - 4) Membagikan 80% harta rampasan perang (dakwah).
- b) Pemungutan Pajak. *Khumus* yang dipraktekkan Rasūl dan sahabat terbukti dapat mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total. Kebijakan ini juga tidak menyebabkan penurunan harga maupun jumlah produksi.
- c) Pengaturan Anggaran. Dengan mengatur APBN secara cermat dan proporsional serta terus menjaga keseimbangan, tidak akan terjadi *budget deficit*, bahkan akan terjadi *budget surplus* seperti yang terjadi pada zaman Khulāfaur Rāsyidūn.
- d) Penerapan Kebijakan Fiskal Khusus. Pada masa Rasūlullāh diterapkan beberapa kebijakan fiskal khusus, yaitu:
  - 1) Meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasūlullāh.
  - 2) Meminjam peralatan dari kalangan non-Muslim dengan jaminan pengembalian dengan ganti rugi apabila barang tersebut rusak.

- 3) Meminjam uang kepada orang tertentu dan memberikannya kepada orang yang baru masuk Islam.
- 4) Menerapkan kebijakan pemberian insentif<sup>181</sup>.

Penekanan dalam ekonomi Islam, bahwa kebijakan di dalam distribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat menjamin kemaslahatan rakyatnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh disebutkan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Kebijakan Imam haruslah mengandung kemaslahatan"

Dari kaidah tersebut, menegaskan bahwa fungsi dari negara yang dijalankan oleh pemerintah yang telah dipilih oleh rakyatnya, setiap kebijakan yang dikeluarkan (seperti melalui Undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, dan sebagainya) hendaklah dapat mengcover kepentingan rakyat. Karena pemimpin tersebut akan mempertanggungjawabkan atas kepemimpinannya, sebagaimana Hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar di dalam Kitab al-Amwāl<sup>182</sup>, bab Hak pemimpin atas rakyatnya dan hak rakyat atas pemimpinnya:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَأَلَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْنُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْنُونٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

<sup>181</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 247-252.

<sup>182</sup> Abu 'Ubaid al-Qasim, *Kitābu al-Amwāl*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), hal. 10.

*Ibn Umar r.a berkata : saya telah mendengar Rasūlullāh saw bersabda : setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri yang memelihara rumah tangga suaminya akan ditanya perihal tanggungjawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu/pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya (diminta pertanggung jawaban) darihal hal yang dipimpinnya. (HR. Bukhāri dan Muslīm)*

Yang dimaksud tanggung jawab di sini adalah usaha negara (melalui pemimpinnya) untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, melalui berbagai kebijakan dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Menurut al-Māliki di dalam Politik Ekonomi Islam, kewajiban pemimpin atas rakyatnya dalam hal distribusi pendapatan ini pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh, juga memungkinkan setiap individu rakyat memuaskan kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya<sup>183</sup>. Kebutuhan primer, tidak hanya mencakup sandang, pangan dan papan saja, karena pada saat ini pendidikan dan kesehatan juga merupakan hal primer bagi tiap-tiap individu rakyat.

Hal tersebut merupakan fungsi sentral negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Al-Mubarak dalam Siddiqi menyatakan tentang peran negara dalam ekonomi: “Negara merupakan salah satu dari tiga soko guru sistem ekonomi Islam, bersama-sama dengan iman dan keterikatan pada nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip tertentu dalam organisasi. Fungsinya adalah untuk

---

<sup>183</sup> Abdurrahman al-Maliki, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa: Ibnu Sholah, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hal. 167.

menegakkan keadilan dan menjamin dipenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas-fasilitas umum dan sistem jaminan sosial<sup>184</sup>.”

Dalam konteks yuridis atau perundang-undangan, di Indonesia telah ada Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Dua Undang-undang ini dapat menjadi barometer bagi keuangan daerah dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak yang mengalokasikan, mendistribusikan dan sebagai stabilisator anggaran agar anggaran yang diterima dapat didistribusikan secara merata ke setiap individu masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yaitu pemerintah menjamin terhadap kebutuhan primer setiap penduduknya.

Fenomena di Indonesia, jika dilihat dari segi pemerataan distribusi pendapatan yang berada pada level ketidakmerataan sedang (0,41) pada tahun 2012, yang meningkat dari tahun 2008 yang berada pada angka 0,35. Pada saat bersamaan, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,23% pada tahun 2012. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak secara otomatis meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, ini menandakan ada “*trouble*” yang terjadi pada bidang distribusi pendapatan di Indonesia, di antaranya “kue” pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh segelintir orang saja sedangkan bagian besar masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan primernya. Hal tersebut menandakan bahwa ada sebuah permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh negara ini terkait masalah distribusi pendapatan.

---

<sup>184</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, alih bahasa: A.M. Saefuddin, (Jakarta: LIPPM, 1986), hal. 45.

Chapra beranggapan bahwa peranan ekonomi aktif oleh negara sebagai salah satu segi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi Islam<sup>185</sup>. Ciri khas strategi pengembangan ekonomi Islam terletak pada keadilan sosial dan kemakmuran yang berjalan secara bergandengan. Ini terjadi karena adanya motivasi bahwa Islam melaksanakan segala sesuatu untuk perkembangan ekonomi yang merata. Alasan mendapatkan keuntungan pribadi bukanlah menjadi pendorong utama dalam Islam. Usaha-usaha pengembangan umumnya bersifat sosial, dan kesejahteraan yang merata<sup>186</sup>. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kontrol negara sebagai sebuah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

---

<sup>185</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran*, hal. 46.

<sup>186</sup> *Ibid.*, hal. 26.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel PE (Pertumbuhan Ekonomi), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Upah, dan Rasio Penduduk Muslim (Muslim) terhadap Distribusi Pendapatan (DP) di Indonesia periode tahun 2008-2012. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Model estimasi regresi data panel yang digunakan adalah model *fixed Effect* dimana hasil uji koefisien determinasi ( $\bar{R}^2$ ) PE (Pertumbuhan Ekonomi), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Upah, dan Rasio Penduduk Muslim (Muslim) terhadap Distribusi Pendapatan (DP) di Indonesia periode tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa besarnya nilai  $\bar{R}^2$  menunjukkan angka yang relatif tinggi yaitu 0.776803. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk baik, dimana 77,68% nilai ini bisa diartikan bahwa variasi variabel dependen Distribusi Pendapatan (DP) dapat dijelaskan dengan baik oleh keempat komponen variabel independen yakni PE (Pertumbuhan Ekonomi), APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), Upah, dan Rasio Penduduk Muslim (Muslim). Sedangkan 22,32% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model.

2. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai pengaruh tidak signifikan dalam mempengaruhi Distribusi Pendapatan (DP). Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan PE tidak selalu diikuti oleh penurunan DP. Ini juga berarti kenaikan tingkat PE belum tentu menurunkan tingkat DP.
3. Variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai pengaruh tidak signifikan dalam mempengaruhi Distribusi Pendapatan (DP). Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan APBD tidak selalu diikuti oleh penurunan DP. Ini juga berarti kenaikan tingkat APBD belum tentu menurunkan tingkat DP. Diperlukan kebijakan pemerintah daerah yang secara teliti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan potensi daerah bersangkutan, seperti sektor migas, pariwisata, pertanian, perkebunan, industri, perdagangan, hasil laut, industri dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan APBD serta dengan kebijakan *output* oleh pemerintah agar peningkatan APBD dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.
4. Variabel Upah mempunyai pengaruh positif dan signifikan di mana artinya semakin tinggi jumlah Upah, maka pemerataan Distribusi Pendapatan akan mengalami kenaikan. Data yang signifikan menandakan bahwa jumlah Upah mempengaruhi pemerataan Distribusi Pendapatan.
5. Variabel Rasio Penduduk Muslim (Muslim) mempunyai pengaruh tidak signifikan dalam mempengaruhi Distribusi Pendapatan (DP). Hal ini dikarenakan bahwa peningkatan Muslim tidak selalu diikuti oleh

penurunan Distribusi Pendapatan (DP). Ini juga berarti kenaikan tingkat Muslim belum tentu menurunkan tingkat DP. Diperlukan usaha komprehensif antara negara dengan penduduk muslim agar populasi ini dapat memberikan dampak signifikan, diantaranya dengan memaksimalkan pengumpulan zakat. Negara, dapat berkontribusi dengan menjadikan zakat sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal yang pada saat ini, zakat hanya menjadi kewajiban yang mengikat secara spiritual, belum mencapai tahap legal formal dalam Undang-undang kebijakan fiskal. Dari segi penduduk muslim, yaitu dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola zakāh, karena dalam kondisi ini pemerintah sebagai *ʿāmil* yang menjadi perantara antara muzakkī dengan mustahiq.

6. Dalam perspektif ekonomi Islam pada prinsipnya semua kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Hasil dari pendapatan negara harus didistribusikan pada jalur yang sesuai dengan anggaran pengeluaran. Hal tersebut untuk menciptakan stabilitas ekonomi, untuk menciptakan lapangan kerja, dan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Hal inilah yang menjadi inti dari prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

## B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, beberapa saran yang dapat ditawarkan untuk perbaikan pemerataan distribusi pendapatan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Pemerataan ekonomi oleh pemerintah melalui kementerian terkait perlu ditingkatkan agar peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah dapat dirasakan oleh semua masyarakat.
2. Pembangunan antar wilayah Republik Indonesia perlu ditingkatkan terutama pada Indonesia bagian timur, agar kesenjangan antara Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian barat dapat diminimalisir.
3. Pemerintah melalui kementerian terkait dapat memanfaatkan potensi sumber daya insani untuk dapat menggunakan sumber daya alam secara efektif dan efisien agar mayoritas penduduk muslim yang dimiliki oleh Indonesia dapat berperan positif dalam distribusi pendapatan di negara ini.

## C. Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia dari perspektif Ekonomi Islam. Namun penelitian ini masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, antara lain:

1. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian, yaitu tahun 2008-2012 masih terlalu singkat.
2. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari empat variabel yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tingkat upah, dan rasio penduduk muslim. Penelitian kurang memperhatikan faktor-faktor lain yang mungkin mempunyai hubungan signifikan terhadap distribusi pendapatan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian tersebut, maka bagi peneliti selanjutnya hendaknya meneliti variabel lain yang lebih memiliki dampak yang signifikan bagi distribusi pendapatan di Indonesia, serta membahas lebih lanjut tentang variabel-variabel yang dapat mempresentasikan dari perspektif ekonomi Islam.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Taufik Zainal. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial di Kabupaten Asahan (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan SWOT)", *QE Journal*, Vol. 02, No. 01.
- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad sebagai Pedagang*. Alih bahasa: Dewi Nurjulianti dkk. Jakarta: Yayasan Swarna Bumi.
- Ahmad, Ausaf. 2000, "Economic Development in Islamic Perspective: Revisited". *Review of Islamic Economics*, No. 9. Dalam <http://jurnalekis.blogspot.com/2011/09/ekonomi-pembangunan-perspektif-ekonomi.html#sthash.3mGqoEI5.dpuf> diakses pada 13 Januari 2014.
- Anto, M.B. Hendrie. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Cet. 1. Yogyakarta: Ekonisia.
- Antonio, M. Safi'i. 2004. "Konsep Distribusi Islam". Dalam *Republika*, 5 April 2004. Jakarta. dalam Euis Amalia, 2009. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Cet. 2. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010.
- Ashari, A. Kholil. "Disparitas Distribusi Pendapatan Nasional Bagaimana Mendistribusikan Pendapatan Nasional Secara Merata?", *Jurnal Distribusi Pendapatan Nasional*.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Statistik Indonesia 2009*, katalog BPS: 1101001. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Statistik Indonesia 2010*, katalog BPS: 1101001. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Statistik Indonesia 2011*, katalog BPS: 1101001. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi Tahun 2008-2011*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Indikator Ekonomi 2012*, katalog BPS: 9201001. Jakarta.

- \_\_\_\_\_. 2012. Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi. Ed. 31. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. Statistik Indonesia 2012, katalog BPS: 1101001. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi Tahun 2009-2012. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. Gorontalo Dalam Angka 2013. Jakarta.
- Bakhtiari, Sadegh. dan Hossein Meisami, 2010. "An Empirical Investigation Of The Effects Of Health And Education On Income Distribution And Poverty In Islamic Countries", *International Journal of Social Economics*, Vol. 37, No. 4.
- Baltagi, Badi H. 2005. *Econometric Analysis of Panel*, Third edition, England: John Wiley & Sons Ltd. Dalam <http://faculty.ksu.edu.sa/mahmoud/DocLib7/Baltagi%20%20Econometric%20Analysis%20of%20Panel%20Data.pdf> diakses pada 29 Januari 2014.
- Bellante, Don. dan Mark Jackson, 1983. *Ekonomi Ketenaga Kerjaan*: Terjemahan oleh Wimandjaja K. Liotohe. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Boediono. 1985. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Bumulo, Frahmawati. 2009. "Peran APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah", *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 NO. 1.
- Chairil, dkk. *Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2013*. Dalam [http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6765 &Itemid=29](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6765&Itemid=29) diakses pada 7 September 2013.
- Chapra, Umer. 2001. *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, Jakarta: SEBI.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Ahmad. 2008. *Keuangan Publik Islam: Teori dan Praktek*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Berbagai Pendekatan dan Metode dalam Studi Islam*. dalam <http://dualmode.kemenag.go.id/file/dokumen/MSI3.pdf> diakses pada 25 Februari 2014.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi, Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

- Ernita, Dewi dkk. 2013. "Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Konsumsi di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi*, Vol. I, No. 02.
- Gemmell, Norman (ed.), 1992. *Ilmu Ekonomi Pembangunan, beberapa survai*. Alih bahasa: Nirwono, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Gribaldi. 2008. "Otonomi Daerah dan Paradigma Baru Penyusunan APBD", *Jurnal on-line dinamika FISIP UNBARA*, Vol. 1, No. 2. Dalam <http://jod-fisipunbara.blogspot.com/2012/05/otonomi-daerah-dan-paradigma-baru.html> diakses pada 8 Januari 2014.
- Halim, Abdul. 2001, "Anggaran Daerah dan Fiscal Stress (sebuah studi kasus pada Anggaran Daerah Provinsi di Indonesia)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.
- Hasan, Zubair. 2007. "Economic Development in Islamic Perspective: Concept, Objectives, and Some Issues". *MPRA Paper*. No. 3011, dalam <http://jurnalekis.blogspot.com/2011/09/ekonomi-pembangunan-perspektif-ekonomi.html> diakses pada 13 Januari 2014.
- Hidayanto, Fajar. 2010. *Jurnal Ekonomi Islam La\_Riba*, Vol. IV, No. 1.
- <http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-makro/pengertian-gross-domestic-product-produk-domestik-bruto-gdp/> diakses pada 13 Januari 2014.
- <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-26463-3509201003-Chapter1.pdf> diakses pada 14 Januari 2014.
- <http://dimastidano.wordpress.com/2011/12/22/filosofi-ekonomi-dalam-penentuan-upah-minimum-regional-umr/> diakses pada 20 November 2013.
- <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2009/11/19/mudahnya-menghitung-pertumbuhan-ekonomi-27316.html> diakses pada 20 November 2013.
- <http://eprints.undip.ac.id/29172/1/JURNAL.pdf> diakses pada 27 Desember 2013.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Rasio\\_finansial](http://id.wikipedia.org/wiki/Rasio_finansial) diakses pada 9 Januari 2014.
- <http://inafinance.com/2013/01/19/wilayah-indonesia-makin-luas/> diakses pada 7 September 2013.
- <http://juprimalino.blogspot.com/2012/02/pengertian-definisi-penelitian.html> diakses pada 3 Februari 2014.
- <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2010/01/pertumbuhan-ekonomi-definisi-sumber.html> diakses pada 2 Januari 2014.

- <http://matakristal.com/teori-upah-menurut-david-ricardo-adam-smith-dan-ferdinand-lasalle/> diakses pada 19 September 2013.
- <http://repository.binus.ac.id/content/J0052/J005259373.doc> diakses pada 27 Januari 2014.
- <http://repository.upnyk.ac.id/883/1/resume.pdf> diakses pada 27 Januari 2014.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16824/4/Chapter%20II.pdf> diakses pada 19 September 2013.
- <http://rossyatesyak.blogspot.com/2013/08/negara-dengan-penduduk-muslim-terbanyak.html> diakses pada 8 Januari 2014.
- [http://statistik.ptkpt.net/\\_a.php?\\_a=#area&info1=6](http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=#area&info1=6) diakses pada 7 September 2013.
- <http://www.kajianpustaka.com/2012/10/penyusunan-anggaran-pemerintah-daerah.html> diakses pada 14 Januari 2014.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/06/mela7d-inilah-instrumen-pengukur-tingkat-korupsi> diakses pada 8 Januari 2014.
- <http://www.ut.ac.id/html/suplemen/mapu5103/dokweb/Wilman/2.%20Penelitian%20Kuantitatif/2.hakikat%20PENELITIAN%20KUANTITATIF.doc> diakses pada 3 Februari 2014.
- [https://www.google.co.id/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ut.ac.id%2Fhtml%2Fsuplemen%2Fespa4319%2FNASKAHWEB%2FSISTEM%2520PENGUPAHAN.doc&ei=CRCMUoP8DYjZrQf32IGgBQ&usq=AFQjCNEOv1ddU-dUOf1p1GyKvn-q3gX\\_Q&bvm=bv.56753253,d.bmk](https://www.google.co.id/url?sa=t&rc=1&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEIQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.ut.ac.id%2Fhtml%2Fsuplemen%2Fespa4319%2FNASKAHWEB%2FSISTEM%2520PENGUPAHAN.doc&ei=CRCMUoP8DYjZrQf32IGgBQ&usq=AFQjCNEOv1ddU-dUOf1p1GyKvn-q3gX_Q&bvm=bv.56753253,d.bmk) diakses pada 20 November 2013.
- Ibrahim dkk, 2011, "Sustainable Economic Development: Concept, Principles and Management from Islamic Perspective". *European Journal of Social Sciences*, Vol. 24, No. 3.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Ed. II. Jakarta: Erlangga.
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Alih bahasa: Anshari Thayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Istiqomah, Supriyati. 2008. "Pemberdayaan dalam Konteks Pengembangan Masyarakat Islam", *Komunitas, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*,

- Vol. 4, No. 1. Dalam <http://komunitas.wikispaces.com/file/view/PEMBERDAYAAN+DALAM+KONTEKS+PENGEMBANGAN+MASYARAKAT+ISLAM.pdf> diakses pada 8 Januari 2014.
- Jhingan, M.L. 1988. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Alih bahasa: D. Guritno. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Rajawali.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia offline versi 1.3.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama RI. 2009. *Kementerian Agama RI dalam Angka 2008*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kementerian Agama RI dalam Angka 2009*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Kementerian Agama RI dalam Angka 2010*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kementerian Agama RI dalam Angka 2011*. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Kementerian Agama RI dalam Angka 2012*. Jakarta.
- Kunardjo. 1996. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Ed. III. Jakarta: UI- Press.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. "Mengurangi Ketimpangan". Dalam *Kompas*, 2 Maret 2013. Jakarta.
- Kusreni, Sri. dan Sultan Suhab. 2009. "Kebijaksanaan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5 No. 3.
- Lestari, Ayu Wafi dan Neni Woyanti. "Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol. 13 No. 1.
- Ma'ruf, Ahmad. dan Latri Wihastuti. 2008. "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 9, No. 1.
- Mahrusy, Atidyet al. 2009. "Pembangunan Ekonomi dalam Islam". *Paper Ekonomi Islam*. Dalam <http://jurnalekis.blogspot.com/2011/09/ekonomi->

- pembangunan-perspektif-ekonomi. html#sthash.3mGqoEI5.dpuf diakses pada 13 Januari 2014.
- Maipita, Indra dkk. 2010. "Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*.
- Maliki, Abdurrahman. 2009. *Politik Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Ibnu Sholah. Bogor: Al Azhar Press.
- Mamesah, D.J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maqin, R. Abdul. "Analisis Disparitas Pendapatan Antar Daerah di Jawa Barat". Dalam <http://bisnis-jabar.com/wp-content/uploads/2011/03/R-Abdul-Maqin-disparitas2.pdf> di-akses pada 27 Januari 2014.
- Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Alih bahasa: Dimyauddin Djuwani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nabhani, Taqyuddin. 2009. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam*. Alih bahasa: Moh. Maghfur Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Nindin, Undang. 2006. "Upah Minimum Regional (UMR) dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Nissan, Edward. dan Farhang Niroomand. 2010. "Distribution Of Income And Expenditures Across Nations", *Journal of Economics and Finance*, Vol. 34, No. 2.
- Noor, Henry Faizal. 2007. *Ekonomi Manajerial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Noor, Ruslan Abdul Ghafur. 2012. "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2.
- Prasetyo, P. Eko. 2008. "The Quality of Growth: Peran Teknologi dan Investasi Human Capital sebagai Pemacu Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1.
- Prishardoyo, Bambang. 2008. "Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*. Vol. 1, No. 1.

- Qarḍawi, Yusuf. 2004. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Alih bahasa: Didin Hafiduddin dkk. Jakarta: Robbani Press.
- Qasim, Abu 'Ubaid. tt. *Kitābu al-Amwāl*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Qur'an dan Terjemahnya.
- Rahardja, Prahatma dan Mandala Manurung. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia).
- Report, Annual. 2008. *Gini Rasio Kabupaten Bandung Tahun 2008*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. Dalam [http://bapeda.bandungkab.go.id/index2.php?option=com\\_docman&task=doc\\_view&gid=50](http://bapeda.bandungkab.go.id/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=50), diakses pada 7 September 2013.
- Rinaldi, Udin. 2012. "Kemandirian Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal EKSOS*, Vol. 8, No. 2
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi Daerah*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasongko, Agung. 2014. "Zakāh Belum Maksimal". Dalam *Republika*, Jum'at, 24 Januari 2014. Jakarta.
- Setyopurwanto, Didi. "Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia dan Investasi Modal Terhadap Pendapatan Per Kapita Masyarakat Indonesia", *Jurnal ilmiah*. Dalam [http:// jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/554/497](http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/554/497) diakses pada 27 Januari 2014.
- Sidik, Machfud. 2002. "Format Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah Yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional". *Seminar Nasional Publik Sektor*. Jakarta. (April, 2002).
- Sigit, Hananto. 1987. "Faktor Kependudukan dan Angkatan Kerja dalam Ekonomi Indonesia: Suatu Telaah Metode Analisis", dalam Hendra Esmara (ed.) *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan; Kumpulan Esei untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo*. Cet. 2. Jakarta: Gramedia.
- Sitepu, Rasidin K. "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Distribusi Pendapatan Rumah tangga di Indonesia". Dalam [http:// www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5CRasidin%20Sitepu%20-%20 Dampak%20investasi%20Sumber%20Daya%20Manusia.pdf](http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2012%5Ckajian%5CRasidin%20Sitepu%20-%20Dampak%20investasi%20Sumber%20Daya%20Manusia.pdf) diakses pada 27 Januari 2014.
- \_\_\_\_\_ dkk. 2009. "Dampak Investasi Sumber Daya Manusia terhadap Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia (The Impact of

- Human Capital Investment on Income Distribution and Poverty Incidence in Indonesia)", *Jurnal Forum Pascasarjana*, Vol. 32 No. 2.
- Sitepu, Wilsa R.B. dkk, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Singapura", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34824/1/Appendix.pdf> diakses pada 9 Januari 2014.
- Soekarni, Muhammad. 2005. "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islam". Dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (ed.). *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Stine, William F. 1994. "Is Local Government Revenue Response to Federal Aid Symmetrical? Evidence From Pennsylvania Country Government in an Era Of Retrenchment", *National Tax Journal*, No. 4, Vol. 47.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiono. 2006. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono, 2007. *Makro Ekonomi Modern Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supardi. 2005. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII-Press.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2002. "Kebijakan Upah Minimum yang Akomodatif", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 5, No. 3.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suryabrata, Sumardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1986. *Pemikiran Ekonomi Islam; Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*. Alih bahasa: A.M. Saefuddin. Jakarta: LIPPM
- Tim Peneliti SMERU. 2001. "Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Tingkat Upah dan Penyerapan Tenaga Kerja di Daerah Perkotaan Indonesia", *Laporan dari Lembaga Penelitian SMERU dengan dukungan dari USAID/PEG*, dalam [http://www.smeru.or.id/report/research/minimum\\_wage/minimumwage\\_exumind.pdf](http://www.smeru.or.id/report/research/minimum_wage/minimumwage_exumind.pdf) diakses pada 27 Desember 2013.

- Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Duni Ketiga*. Alih bahasa: Haris Munandar, (ed.): Yati Sumiharti. Ed. 6. Cet. 1. Jakarta: Erlangga.
- Tuasikal, Askam. 2008, "Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia", *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, No. 2. Vol. 1, (Juli, 2008).
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Ed. II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widarjono, Agus. 2013. *Ekonometrika*. Ed. IV. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Wie, Thee Kian. 1981. *Pemerataan, Kemiskinan, Ketimpangan; Beberapa Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wiratno, Masykur. 1992. *Ekonomi Pembangunan: Ikhtisar, Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: Media Widya Mandala.
- Yaumidin, Umi Karomah. 2005. *Teori Ekonomi Dalam Islam*. (ed.) Masyhuri, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Yulianita, Anna. "Analisis Sektor Unggulan dan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Ogan Komering Ilir", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Dalam [http://eprints.unsri.ac.id/2834/1/Analisis\\_Sektor\\_Unggulan\\_dan\\_Pengeluaran\\_Pemerintah\\_di\\_Kab\\_OKI--isi.pdf](http://eprints.unsri.ac.id/2834/1/Analisis_Sektor_Unggulan_dan_Pengeluaran_Pemerintah_di_Kab_OKI--isi.pdf) diakses pada 9 Januari 2014.
- Yusran. 2012. "Kerjasama Indonesia-UNCAC Menangani Kejahatan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional: Transnasional*, Vol.7 No.1. Dalam [http://fisip.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/TRANSNASI-ONAL.VOL7\\_1-2012.pdf](http://fisip.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2013/06/TRANSNASI-ONAL.VOL7_1-2012.pdf) diakses pada 8 Januari 2014.



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Lampiran I. Rasio Gini Menurut Provinsi, 2008-2012

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	0,27	0,29	0,30	0,33	0,32
2	Sumatera Utara	0,31	0,32	0,35	0,35	0,33
3	Sumatera Barat	0,29	0,30	0,33	0,35	0,36
4	Riau	0,31	0,33	0,33	0,36	0,40
5	Kepulauan Riau	0,30	0,29	0,29	0,32	0,35
6	Jambi	0,28	0,27	0,30	0,34	0,34
7	Sumatera Selatan	0,30	0,31	0,34	0,34	0,40
8	Kepulauan Bangka Belitung	0,26	0,29	0,30	0,30	0,29
9	Bengkulu	0,33	0,30	0,37	0,36	0,35
10	Lampung	0,35	0,35	0,36	0,37	0,36
11	DKI Jakarta	0,33	0,36	0,36	0,44	0,42
12	Jawa Barat	0,35	0,36	0,36	0,41	0,41
13	Banten	0,34	0,37	0,42	0,40	0,39
14	Jawa Tengah	0,31	0,32	0,34	0,38	0,38
15	DI Yogyakarta	0,36	0,38	0,41	0,40	0,43
16	Jawa Timur	0,33	0,33	0,34	0,37	0,36
17	Bali	0,30	0,31	0,37	0,41	0,43
18	Nusa Tenggara Barat	0,33	0,35	0,40	0,36	0,35
19	Nusa Tenggara Timur	0,34	0,36	0,38	0,36	0,36
20	Kalimantan Barat	0,31	0,32	0,37	0,40	0,38
21	Kalimantan Tengah	0,29	0,29	0,30	0,34	0,33
22	Kalimantan Selatan	0,33	0,35	0,37	0,37	0,38
23	Kalimantan Timur	0,34	0,38	0,37	0,38	0,36
24	Sulawesi Utara	0,28	0,31	0,37	0,39	0,43
25	Gorontalo	0,34	0,35	0,43	0,46	0,44
26	Sulawesi Tengah	0,33	0,34	0,37	0,38	0,40
27	Sulawesi Selatan	0,36	0,39	0,40	0,41	0,41
28	Sulawesi Barat	0,31	0,30	0,36	0,34	0,31
29	Sulawesi Tenggara	0,33	0,36	0,42	0,41	0,40
30	Maluku	0,31	0,31	0,33	0,41	0,38
31	Maluku Utara	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34
32	Papua	0,40	0,38	0,41	0,42	0,44
33	Papua Barat	0,31	0,35	0,38	0,40	0,43
	Indonesia	0,35	0,37	0,38	0,41	0,41

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat, BPS

**Lampiran II. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar  
Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi. 2008 - 2012 (Persen)**

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-5,24	-5,51	2,74	5,09	5,20
2	Sumatera Utara	6,39	5,07	6,42	6,63	6,22
3	Sumatera Barat	6,88	4,28	5,94	6,25	6,35
4	Riau	5,65	2,97	4,21	5,04	3,55
5	Kepulauan Riau	6,63	3,52	7,19	6,66	8,21
6	Jambi	7,16	6,39	7,35	8,54	7,44
7	Sumatera Selatan	5,07	4,11	5,63	6,50	6,01
8	Kepulauan Bangka Belitung	4,60	3,74	5,99	6,46	5,72
9	Bengkulu	5,75	5,62	6,10	6,45	6,61
10	Lampung	5,35	5,26	5,88	6,43	6,48
11	DKI Jakarta	6,23	5,02	6,50	6,73	6,53
12	Jawa Barat	6,21	4,19	6,20	6,48	6,21
13	Banten	5,77	4,71	6,11	6,39	6,15
14	Jawa Tengah	5,61	5,14	5,84	6,03	6,34
15	DI Yogyakarta	5,03	4,43	4,88	5,17	5,32
16	Jawa Timur	5,94	5,01	6,68	7,22	7,27
17	Bali	5,97	5,33	5,83	6,49	6,65
18	Nusa Tenggara Barat	2,82	12,14	6,35	-3,15	-1,12
19	Nusa Tenggara Timur	4,84	4,29	5,25	5,63	5,42
20	Kalimantan Barat	5,45	4,80	5,47	5,97	5,83
21	Kalimantan Tengah	6,17	5,57	6,50	6,77	6,69
22	Kalimantan Selatan	6,45	5,29	5,59	6,12	5,73
23	Kalimantan Timur	4,90	2,28	5,10	4,08	3,98
24	Sulawesi Utara	10,86	7,85	7,16	7,39	7,86
25	Gorontalo	7,76	7,54	7,63	7,68	7,71
26	Sulawesi Tengah	7,78	7,71	8,74	9,15	9,27
27	Sulawesi Selatan	7,78	6,23	8,19	7,61	8,37
28	Sulawesi Barat	12,07	6,03	6,03	11,89	10,32
29	Sulawesi Tenggara	7,27	7,57	8,22	8,96	10,41
30	Maluku	4,23	5,44	6,47	6,06	7,81
31	Maluku Utara	5,99	6,07	7,95	6,40	6,67
32	Papua	-1,40	22,22	-3,19	-5,32	1,08
33	Papua Barat	7,84	13,87	28,47	27,08	15,84

**Sumber: Badan Pusat Statistik**

Lampiran III. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 2008-2012

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	10.053.496.967	10.057.848.068	8.810.803.761	8.917.046.360	9.518.938.689
2	Sumatera Utara	3.620.112.147	3.823.149.652	4.232.169.602	5.363.366.625	8.032.564.793
3	Sumatera Barat	1.981.806.904	2.340.270.447	2.594.858.704	2.406.382.408	3.193.460.223
4	Riau	4.630.963.040	4.102.988.966	4.461.432.658	5.861.960.938	6.441.656.082
5	Kepulauan Riau	1.540.890.058	1.850.953.213	2.095.763.572	2.251.884.458	2.411.289.578
6	Jambi	1.795.869.258	1.740.202.069	1.841.390.735	2.432.067.298	1.942.503.557
7	Sumatera Selatan	2.675.473.262	2.686.370.175	3.539.410.239	4.354.299.788	5.152.352.272
8	Kepulauan Bangka Belitung	1.094.814.862	1.203.391.013	1.112.154.849	1.433.929.598	1.460.019.259
9	Bengkulu	1.528.368.652	1.133.060.449	1.011.430.779	1.206.660.964	1.586.154.929
10	Lampung	1.903.356.381	1.926.059.226	2.170.713.197	2.689.172.531	2.853.249.945
11	DKI Jakarta	20.586.014.202	23.698.266.946	26.774.499.140	33.223.439.441	36.023.344.857
12	Jawa Barat	8.625.321.490	10.243.086.750	11.531.944.465	13.503.602.460	16.197.296.979
13	Banten	2.500.484.635	2.673.816.449	3.374.933.134	4.291.462.622	4.166.075.000
14	Jawa Tengah	6.051.713.397	6.380.477.669	7.530.673.277	8.786.745.596	11.395.744.293
15	DI Yogyakarta	1.795.670.310	1.571.892.164	1.630.773.451	1.859.142.795	2.156.863.309
16	Jawa Timur	8.799.027.458	9.888.941.344	11.976.298.202	13.058.158.965	15.772.030.678
17	Bali	1.949.845.742	2.370.335.993	2.776.160.210	3.366.462.269	3.706.633.235
18	Nusa Tenggara Barat	1.137.789.836	1.237.434.737	1.345.732.900	1.706.631.279	2.303.557.144
19	Nusa Tenggara Timur	1.256.404.418	1.291.681.545	1.312.183.980	1.444.705.016	2.237.178.663
20	Kalimantan Barat	1.608.529.296	1.800.044.633	1.951.936.412	2.433.951.120	2.952.408.853
21	Kalimantan Tengah	1.452.390.075	1.513.335.718	1.613.311.669	2.054.045.455	2.276.744.204

Lanjutan Lampiran III.

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
22	Kalimantan Selatan	2.145.463.517	2.658.830.563	2.772.436.617	3.472.921.497	3.157.443.629
23	Kalimantan Timur	8.488.741.122	7.356.134.996	7.853.125.779	11.469.537.476	10.602.613.100
24	Sulawesi Utara	1.351.136.380	1.442.453.456	1.505.696.923	1.474.978.923	1.817.969.042
25	Gorontalo	665.305.933	684.462.657	658.485.627	794.420.246	973.401.827
26	Sulawesi Tengah	1.150.485.182	1.241.844.212	1.354.662.118	1.631.299.007	1.937.199.415
27	Sulawesi Selatan	2.342.294.334	2.359.456.231	2.794.524.134	3.401.081.587	4.760.942.065
28	Sulawesi Barat	581.008.353	614.124.505	633.599.140	744.622.517	971.008.830
29	Sulawesi Tenggara	1.019.452.467	1.155.185.334	1.161.371.237	1.487.712.745	2.026.706.570
30	Maluku	848.750.828	1.073.409.828	1.011.046.393	1.193.672.798	1.434.857.396
31	Maluku Utara	702.766.404	766.878.094	698.701.493	952.524.378	1.270.032.917
32	Papua	5.757.078.135	6.237.822.338	5.803.839.101	7.183.483.923	7.370.601.882
33	Papua Barat	1.696.275.178	2.871.598.049	3.536.962.988	4.053.067.799	4.023.381.839

Sumber: Badan Pusat Statistik



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Lampiran IV. Upah Minimum Provinsi per Bulan (Rupiah). 2008-2012

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.000.000	1.200.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
2	Sumatera Utara	822.205	929.500	965.000	1.035.500	1.200.000
3	Sumatera Barat	800.000	880.000	940.000	1.055.000	1.150.000
4	Riau	800.000	901.600	1.016.000	1.120.000	1.238.000
5	Kepulauan Riau	833.000	892.000	925.000	975.000	1.015.000
6	Jambi	724.000	800.000	900.000	1.028.000	1.142.500
7	Sumatera Selatan	743.000	824.730	927.825	1.048.440	1.195.220
8	Kepulauan Bangka Belitung	813.000	850.000	910.000	1.024.000	1.110.000
9	Bengkulu	690.000	728.000	780.000	815.000	930.000
10	Lampung	617.000	691.000	767.500	855.000	975.000
11	DKI Jakarta	972.604	1.069.865	1.180.000	1.290.000	1.529.150
12	Jawa Barat	568.193	628.191	671.500	732.000	-
13	Banten	837.000	917.500	955.300	1.000.000	1.042.000
14	Jawa Tengah	547.000	575.000	660.000	675.000	-
15	DI Yogyakarta	586.000	700.000	745.694	808.000	892.660
16	Jawa Timur	500.000	570.000	630.000	705.000	-
17	Bali	682.650	760.000	829.316	890.000	967.500
18	Nusa Tenggara Barat	730.000	832.500	890.775	950.000	1.000.000
19	Nusa Tenggara Timur	650.000	725.000	800.000	850.000	925.000
20	Kalimantan Barat	645.000	705.000	741.000	802.500	900.000
21	Kalimantan Tengah	765.868	888.400	986.590	1.134.580	1.327.459

Lanjutan Lampiran IV.

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
22	Kalimantan Selatan	825.000	930.000	1.024.500	1.126.000	1.225.000
23	Kalimantan Timur	889.654	955.500	1.002.000	1.084.000	1.177.000
24	Sulawesi Utara	845.000	929.500	1.000.000	1.050.000	1.250.000
25	Gorontalo	600.000	675.000	710.000	762.500	837.500
26	Sulawesi Tengah	670.000	720.000	777.500	827.500	885.000
27	Sulawesi Selatan	740.520	905.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
28	Sulawesi Barat	760.500	909.400	944.200	1.006.000	1.127.000
29	Sulawesi Tenggara	700.000	770.000	860.000	930.000	1.032.300
30	Maluku	700.000	805.000	840.000	900.000	975.000
31	Maluku Utara	700.000	770.000	847.000	889.350	960.498
32	Papua	1.705.500	1.216.700	1.316.500	1.403.000	1.585.000
33	Papua Barat	1.105.500	1.180.000	1.210.000	1.410.000	1.450.000

Sumber: Badan Pusat Statistik

Catatan: Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur tidak menetapkan UMP tahun 2012

Lampiran V. Rasio Penduduk Muslim Indonesia, 2008-2012 (Persen)

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nangroe Aceh Darussalam	98,69	98,69	98,69	98,37	98,37
2	Sumatera Utara	71,50	71,50	71,50	66,07	66,07
3	Sumatera Barat	97,79	97,79	97,79	97,44	97,44
4	Riau	92,77	92,77	92,77	87,91	87,91
5	Kepulauan Riau	85,91	85,91	85,91	79,03	79,03
6	Jambi	96,05	96,05	96,05	95,52	95,52
7	Sumatera Selatan	97,82	97,82	97,82	96,95	96,95
8	Kepulauan Bangka Belitung	86,14	86,14	86,14	89,02	89,02
9	Bengkulu	98,01	98,01	98,01	97,41	97,41
10	Lampung	95,43	95,43	95,43	95,64	95,64
11	DKI Jakarta	87,87	87,87	87,87	85,53	85,53
12	Jawa Barat	97,81	97,81	97,81	97,08	97,08
13	Banten	95,91	95,91	95,91	94,57	94,57
14	Jawa Tengah	97,12	97,12	97,12	96,75	96,75
15	DI Yogyakarta	92,54	92,54	92,54	92,08	92,08
16	Jawa Timur	97,84	97,84	97,84	96,36	96,36
17	Bali	11,68	11,68	11,68	13,37	13,37
18	Nusa Tenggara Barat	97,66	97,66	97,66	96,54	96,54
19	Nusa Tenggara Timur	8,66	8,66	8,66	9,06	9,06
20	Kalimantan Barat	58,61	58,61	58,61	59,26	59,26
21	Kalimantan Tengah	73,66	73,66	73,66	74,63	74,63

Lanjutan Lampiran V.

No	Provinsi	2008	2009	2010	2011	2012
22	Kalimantan Selatan	96,99	96,99	96,99	96,68	96,68
23	Kalimantan Timur	85,06	85,06	85,06	85,44	85,44
24	Sulawesi Utara	28,67	28,67	28,67	30,97	30,97
25	Gorontalo	98,06	98,06	98,06	97,96	97,96
26	Sulawesi Tengah	79,79	79,79	79,79	77,77	77,77
27	Sulawesi Selatan	88,79	88,79	88,79	89,65	89,65
28	Sulawesi Barat	80,15	80,15	80,15	82,68	82,68
29	Sulawesi Tenggara	95,46	95,46	95,46	95,32	95,32
30	Maluku	45,70	45,70	45,70	50,68	50,68
31	Maluku Utara	75,04	75,04	75,04	74,47	74,47
32	Papua	24,29	24,29	24,29	15,78	15,78
33	Papua Barat	24,29	24,29	24,29	38,38	38,38

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kemenang RI

## Lampiran VI.

Regresi Common Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/30/13 Time: 18:00

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (unbalanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.312481	0.019617	15.92891	0.0000
X1?	0.001230	0.000827	1.487492	0.1389
X2?	1.33E-12	6.83E-13	1.947802	0.0532
X3?	4.18E-08	1.64E-08	2.552633	0.0117
X4?	-0.000137	0.000123	-1.115319	0.2664
X5?	-5.94E-14	7.44E-14	-0.798706	0.4257
R-squared	0.122632	Mean dependent var		0.352346
Adjusted R-squared	0.094511	S.D. dependent var		0.041978
S.E. of regression	0.039945	Akaike info criterion		-3.566281
Sum squared resid	0.248917	Schwarz criterion		-3.451926
Log likelihood	294.8688	F-statistic		4.360905
Durbin-Watson stat	0.496066	Prob(F-statistic)		0.000963

## Lampiran VII.

Regressi Fixed Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled Least Squares

Date: 12/30/13 Time: 18:35

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (unbalanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.079618	0.079691	0.999081	0.3197
X1?	0.000260	0.000671	0.387949	0.6987
X2?	1.50E-12	1.75E-12	0.857787	0.3927
X3?	1.65E-07	1.80E-08	9.202833	0.0000
X4?	0.001448	0.001023	1.415149	0.1595
X5?	5.23E-14	6.36E-14	0.822835	0.4122

### Fixed Effects (Cross)

_NAD—C	-0.147155
_SUMUT—C	-0.021706
_SUMBAR—C	-0.061028
_RIAU—C	-0.043045
_KEPRI—C	-0.049787
_JAMBI—C	-0.070554
_SUMSEL—C	-0.046651
_KEPBABEL—C	-0.076844
_BENGKULU—C	-0.013062
_LAMPUNG—C	0.005975
_DKI—C	-0.067478
_JABAR—C	0.018545
_BANTEN—C	0.002278
_JATENG—C	-0.006224
_DIY—C	0.054230
_JATIM—C	0.004309
_BALI—C	0.124107
_NTB—C	-0.011156

_NTT—C	0.133414
_KALBAR—C	0.060828
_KALTENG—C	-0.050428
_KALSEL—C	-0.035577
_KALTIM—C	-0.021937
_SULUT—C	0.061232
_GORONTALO—C	0.060684
_SULTENG—C	0.037232
_SULSEL—C	0.013150
_SULBAR—C	-0.033548
_SULTENGG—C	0.019755
_MALUKU—C	0.056662
_MALUT—C	0.005187
_PAPUA—C	0.070682
_PAPBAR—C	0.031237

---

Effects Specification

---

Cross-section fixed (dummy variables)

---

R-squared	0.778015	Mean dependent var	0.352346
Adjusted R-squared	0.711777	S.D. dependent var	0.041978
S.E. of regression	0.022537	Akaike info criterion	-4.545535
Sum squared resid	0.062979	Schwarz criterion	-3.821284
Log likelihood	406.1883	F-statistic	11.74582
Durbin-Watson stat	1.667472	Prob(F-statistic)	0.000000

---

## Lampiran VIII.

Uji Signifikasi Fixed Effects

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: DP

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	11.440430	(32,124)	0.0000
Cross-section Chi-square	222.639051	32	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/30/13 Time: 18:36

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (unbalanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.312481	0.019617	15.92891	0.0000
X1?	0.001230	0.000827	1.487492	0.1389
X2?	1.33E-12	6.83E-13	1.947802	0.0532
X3?	4.18E-08	1.64E-08	2.552633	0.0117
X4?	-0.000137	0.000123	-1.115319	0.2664
X5?	-5.94E-14	7.44E-14	-0.798706	0.4257
R-squared	0.122632	Mean dependent var		0.352346
Adjusted R-squared	0.094511	S.D. dependent var		0.041978
S.E. of regression	0.039945	Akaike info criterion		-3.566281
Sum squared resid	0.248917	Schwarz criterion		-3.451926
Log likelihood	294.8688	F-statistic		4.360905
Durbin-Watson stat	0.496066	Prob(F-statistic)		0.000963

## Lampiran IX.

Regresi Random Effect

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 12/30/13 Time: 18:39

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (unbalanced) observations: 162

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.217973	0.021543	10.11828	0.0000
X1?	0.000714	0.000621	1.149582	0.2521
X2?	7.70E-13	9.36E-13	0.822636	0.4120
X3?	1.36E-07	1.47E-08	9.253381	0.0000
X4?	2.21E-05	0.000196	0.112436	0.9106
X5?	3.33E-14	5.88E-14	0.566442	0.5719

Random Effects

(Cross)

_NAD--C	-0.088194
_SUMUT--C	-0.027289
_SUMBAR--C	-0.028456
_RIAU--C	-0.017381
_KEPRI--C	-0.038190
_JAMBI--C	-0.041320
_SUMSEL--C	-0.015678
_KEPBABEL--C	-0.057267
_BENGKULU--C	0.008496
_LAMPUNG--C	0.023136
_DKI--C	-0.024740
_JABAR--C	0.039779
_BANTEN--C	0.024962
_JATENG--C	0.015804
_DIY--C	0.061548
_JATIM--C	0.024211

_BALI--C	0.024211
_NTB--C	0.013171
_NTT--C	0.026585
_KALBAR--C	0.024990
_KALTENG--C	-0.048348
_KALSEL--C	-0.005209
_KALTIM--C	-0.002846
_SULUT--C	-0.006601
_GORONTALO--C	0.071639
_SULTENG--C	0.028256
_SULSEL--C	0.027385
_SULBAR--C	-0.028233
_SULTENGG--C	0.035747
_MALUKU--C	0.008364
_MALUT--C	-0.003667
_PAPUA--C	0.004371
_PAPBAR--C	-0.029234



Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.028705	0.6187
Idiosyncratic random	0.022537	0.3813

Weighted Statistics

R-squared	0.398468	Mean dependent var	0.117611
Adjusted R-squared	0.379188	S.D. dependent var	0.031050
S.E. of regression	0.024465	Sum squared resid	0.093373
F-statistic	20.66753	Durbin-Watson stat	1.118069
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	-0.084629	Mean dependent var	0.352346
Sum squared resid	0.307719	Durbin-Watson stat	0.339262

## Lampiran X.

Uji Signifikasi Random Effects

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: DP

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq.		
	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32.920764	5	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1?	0.000260	0.000714	0.000000	0.0744
X2?	0.000000	0.000000	0.000000	0.6210
X3?	0.000000	0.000000	0.000000	0.0043
X4?	0.001448	0.000022	0.000001	0.1556
X5?	0.000000	0.000000	0.000000	0.4327

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y?

Method: Panel Least Squares

Date: 12/30/13 Time: 18:40

Sample: 2008 2012

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (unbalanced) observations: 162

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.079618	0.079691	0.999081	0.3197
X1?	0.000260	0.000671	0.387949	0.6987
X2?	1.50E-12	1.75E-12	0.857787	0.3927
X3?	1.65E-07	1.80E-08	9.202833	0.0000

X4?	0.001448	0.001023	1.415149	0.1595
X5?	5.23E-14	6.36E-14	0.822835	0.4122

---



---

Effects Specification

---



---

Cross-section fixed (dummy variables)

---



---

R-squared	0.778015	Mean dependent var	0.352346
Adjusted R-squared	0.711777	S.D. dependent var	0.041978
S.E. of regression	0.022537	Akaike info criterion	-4.545535
Sum squared resid	0.062979	Schwarz criterion	-3.821284
Log likelihood	406.1883	F-statistic	11.74582
Durbin-Watson stat	1.667472	Prob(F-statistic)	0.000000

---



---



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## CURRICULUM VITAE MAHASISWA



Nama : **FEBRI KUSUMA**  
NIM : 11913007  
TTL : Pekanbaru, 20 Februari 1986  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat di Jogja : Jl Tampar No. 39, CT VIII, Depok, Sleman,  
Yogyakarta  
Alamat Asal : Jl. Nusa Indah Gg. Buntu No. 7 Labuhbaru,  
Pekanbaru-Riau

### Nama Orang Tua

Ayah : Drs. M. Idrees AlFasya (alm)

Ibu :  Sumarni

Alamat : Jl. Nusa Indah Gg. Buntu No. 7 Labuhbaru,  
Pekanbaru-Riau

### Pendidikan

- **SDN** (Sekolah Dasar Negeri) 025 Pekanbaru Selesai Tahun 1998
- **MTs** (Madrasah Tsanawiyah) Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang Selesai Tahun 2001
- **MA** (Madrasah Aliyah) Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang Selesai Tahun 2004

- **Ma'had 'Aly** Pondok Pesantren Al-Badr Bangkinang Selesai Tahun 2008
- **STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam) Iqra Annisa Pekanbaru** Selesai Tahun 2010
- **Magister Studi Islam** Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam Selesai Tahun 2014.

**Penghargaan Ilmiah yang Pernah Diraih dan Sertifikat atas Partisipasi yang Pernah Diikuti:**

- a. Juara III, Olimpiade Ekonomi Islam Temu Ilmiah Regional Sumbangteng, 2009.
- b. Peringkat I, Lulusan Program Studi (S.1) Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra' An-Nisa', Pekanbaru, Angkatan III T.A. 2009/2010.
- c. Partisipasi dalam Training Hisab dan Rukyat oleh Masjid Jendral Sudirman-Yogyakarta, Juli 2012/Sya'ban 1433.
- d. Partisipasi dalam Konferensi Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Se-Indonesia II dengan tema "Globalisasi dan Kearifan Lokal" oleh Universitas Budi Luhur, Jakarta, Oktober 2012.
- e. Partisipasi dalam Kegiatan Orasi Kebangsaan dan Seminar Nasional HMPI dengan tema "Menyongsong Undang-Undang Pendidikan Tinggi: Tantangan, Peluang, dan Harapan untuk Indonesia" oleh Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia, Yogyakarta, November 2012.
- f. Certificate of Participation; International Seminar oleh Forum Studi dan Diskusi Ekonomi 2012 Universitas Gadjah Mada dengan Tema "Dreaming the World Without Poverty: A Guide To Eradicate Global Poverty", Yogyakarta, November 2012.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

- g. Partisipasi dalam “Seminar Bedah Buku dengan Judul: Pribumisasi Hukum Islam, Pembacaan Kontemporer Hukum Islam di Indonesia” oleh Program Pascasarjana UII bekerjasama dengan PSI UII, Yogyakarta, November 2012.
- h. Partisipasi dalam “Seminar Nasional dan Sarasehan Pemuda dengan tema: Siasat Kaum Muda dalam Membendung Terorisme dan Radikalisme Agama” oleh Pengcab. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia DIY di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, November 2012.
- i. Partisipasi dalam “Seminar Membangun Budaya Damai dan Toleransi di Kampus” oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI bekerjasama dengan STIA ALMA ATA, Yogyakarta, April 2013.
- j. Partisipasi dalam “Simposium Internasional Hukum Islam” oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Agustus 2013.
- k. Partisipasi dalam One-Day Training, “Metode Penelitian Ekonomi Islam” oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, November 2013.
- l. Attendance in Workshop on Urbanization, Community-Based Planning and Poverty in Indonesia by Prof. Victoria A. Beard (Cornell University) Held at Universitas Islam Indonesia initiated by Institut Studi Indonesia Amerika (ISIA). Yogyakarta. January 2014.